



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA KUPANG  
TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman perencanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang sejahtera;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2013–2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 – 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

## Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  - b. Sebagai acuan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam perencanaan program-program pembangunan yang terinci, terukur dan terintegrasi; dan
  - c. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

## BAB II

### ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

## Pasal 3

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Sistematika RPJMD meliputi :
- a. BAB I. PENDAHULUAN
  - b. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - e. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - g. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - h. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - i. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
  - j. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
  - k. LAMPIRAN – LAMPIRAN.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

##### Pengendalian

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

## Pasal 5

### Evaluasi

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Agustus 2013



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG  
  
BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA  
KUPANG TAHUN 2013 – 2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013–2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007–2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kupang 2013–2017 terdiri dari 4 Bab dan 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ruang untuk melakukan



penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang (RPJMD) 2013-2017.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

(1) Cukup Jelas

(2) Huruf a

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan

Huruf b

Memuat tentang Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek sosial budaya daerah, aspek prasarana dan sarana daerah, serta pemerintahan umum

Huruf c

Memuat tentang belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah, dan kerangka pendanaan.

Huruf d

Memuat tinjauan kebijakan dan analisis isu-isu strategis.

Huruf e

Memuat visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang

Huruf f

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah

Huruf g

Memuat tentang Kebijakan umum daerah dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan

Huruf h

Memuat tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tahun 2013-2017.

Huruf i

Memuat tentang indikator kinerja daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017

Huruf j

Memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 242

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD  
KOTA KUPANG**

Pada hari Selasa tanggal 8 bulan Januari tahun 2013 telah diselenggarakan musrenbang RPJMD yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Walikota Kupang pada acara pembukaan musrenbang jangka menengah daerah;
- b. Pemaparan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, isu-isu strategis dan program jangka menengah oleh Kepala BAPPEDA Kota Kupang;
- c. Gambaran ringkas rancangan RPJMD mencakup isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif oleh Kepala BAPPEDA Kota Kupang;
- d. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka menengah daerah terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 8 Januari 2013  
J a m : 09.00 WITA – selesai.  
Tempat : Aula Sasando, Kantor Walikota Kupang.

musrenbang RPJMD Kota Kupang :

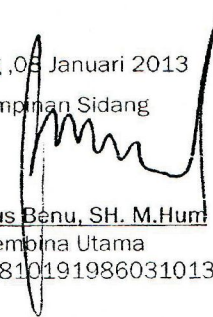
**MENYEPAKATI**

- KESATU : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Kupang Tahun 2013- 2017 berdasarkan visi dan misi Walikota dan wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah rancangan RPJMD Kota Kupang Tahun 2013 - 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan rancangan RPJMD Kota Kupang Tahun 2013 - 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJMD Kota Kupang Tahun 2013 - 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Kupang, Tahun 2013 - 2017.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 08 Januari 2013

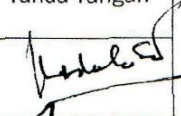
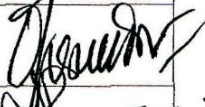



Pimpinan Sidang

  
Bernadus Benu, SH. M.Hum

Pembina Utama

Nip. 195810191986031013

Mewakili Peserta Musrenbang Kota Kupang

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Ndolu Eoh	LPM Kel. Oebobo	Ketua	
2.	Dikson D. Wabang	LPM Kel. Lasiana	Ketua	
3.	Uly J. Riwu Kaho, Sp. M.Si	Univ. PGRI	Ka. Biro AAKPSI	
4.	Johanis A. L	LPM Kel. Nunhila	Ketua	
5.	Thitus Bistolen	LPM Kel.Kohua	Ketua	

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERATURAN DAERAH.....	ii
BERITA ACARA .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	I-1
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-5
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-7
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-9</b>
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	II-9
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-9
2.1.2 Topografi dan Klimatologis.....	II-10
2.1.3 Potensi Wilayah.....	II-10
2.1.4 Penataan Ruang .....	II-11
2.1.5 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota .....	II-15
2.1.6 Demografi.....	II-17
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II-18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-18
2.2.2 Kesejahteraan Sosial .....	II-24
2.2.3 Pendapatan Daerah.....	II-29
2.2.4 Belanja Daerah.....	II-32
2.2.5 Investasi.....	II-33
2.3 SOSIAL BUDAYA DAERAH.....	II-34
2.4 PRASARANA DAN SARANA DAERAH.....	II-35
2.5 PEMERINTAHAN UMUM.....	II-44
<b>BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>III-51</b>
3.1 BELANJA DAERAH.....	III-57
3.2 PEMBIAYAAN DAERAH .....	III-59
3.3 NERACA DAERAH.....	III-59
3.4 KERANGKA PENDANAAN .....	III-59
<b>BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>IV-61</b>
4.1 TINJAUAN KEBIJAKAN .....	IV-61
4.2 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-64

<b>BAB V.</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V-77</b>
5.1	VISI .....	V-77
5.2	MISI .....	V-78
5.3	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-79
<b>BAB VI.</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	
	<b>DAERAH .....</b>	<b>VI-89</b>
6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-90
6.2	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-100
<b>BAB VII.</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VII-103</b>
7.1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	VII-103
7.2	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA KUPANG YANG BERKUALITAS.....	VII-107
7.3	MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM.....	VII-110
7.4	MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN.....	VII-113
7.5	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.....	VII-115
<b>BAB VIII.</b>	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN</b>	
	<b>PENDANAAN .....</b>	<b>VIII-117</b>
<b>BAB IX.</b>	<b>PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....</b>	<b>IX-197</b>
<b>BAB X.</b>	<b>PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>X-205</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang Tahun 2011.....	9
Tabel	2.2.	Penggunaan Lahan Eksisting Kota Kupang Tahun 2009.....	12
Tabel	2.3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Kupang Tahun 2007-2012 .....	17
Tabel	2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Tahun 2007-2012 .....	18
Tabel	2.5.	PDRB Per Kapita dan Pendapatan Perkapita Kota Kupang Menurut Harga Berlaku Dan Konstan 2000 Tahun 2007-2011 .....	19
Tabel	2.6.	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Kupang menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 .....	20
Tabel	2.7.	Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2007-2011.....	22
Tabel	2.8.	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2007-2011 .....	23
Tabel	2.9.	Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	24
Tabel	2.10.	Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Tahun 2007-2011 .....	25
Tabel	2.11.	Sarana dan Prasarana Kesehatan, Para Medis serta Rasio Tahun 2007-2011 .....	25
Tabel	2.12.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	26
Tabel	2.13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	27
Tabel	2.14.	Jumlah Penduduk Kota Kupang Berdasarkan Usia .....	27
Tabel	2.15.	Kondisi Keamanan, Ketertiban dan Kriminalitas di Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	28
Tabel	2.16.	Data-Data Objek, Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2007-2011.....	29
Tabel	2.17.	Penerimaan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2011.....	30
Tabel	2.18.	Perkembangan Pendapatan Daerah dan Sektor Pajak Daerah .....	31
Tabel	2.19.	Perkembangan Pendapatan Daerah Dan Sektor Retribusi Daerah.....	32
Tabel	2.20.	Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2007-2011 .....	33
Tabel	2.21.	Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi.....	34
Tabel	2.22.	Perkembangan Jumlah Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah di Kota Kupang.....	35
Tabel	2.23.	Jumlah Sekolah dan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 .....	36
Tabel	2.24.	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Kupang.....	37
Tabel	2.25.	Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan Tahun 2007-2011 .....	37
Tabel	2.26.	Panjang Jalan Kota di Kota Kupang Menurut Jenis Permukaan Tahun 2007-2011.....	38

Tabel	2.27. Volume Bongkar Muat, Arus Penumpang Transportasi Laut dan Udara di Kota Kupang Tahun 2007-2011.....	38
Tabel	2.28. Banyaknya Kendaraan Bermotor, dan Trayek Angkutan dan Terminal di Kota Kupang Tahun 2007-2011.....	39
Tabel	2.29. Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM Kota Kupang Tahun 2007:2011.....	40
Tabel	2.30. Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan .....	42
Tabel	2.31. Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	43
Tabel	2.32. Data Pegawai PTT dan PNS.....	44
Tabel	2.33. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	44
Tabel	2.34. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural .....	45
Tabel	2.35. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional .....	45
Tabel	3.1. Realisasi Pengelolaan Keuangan Kota Kupang Tahun 2007-2011 .....	52
Tabel	3.2. Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2011.....	53
Tabel	3.3. Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Kupang Pada Tahun 2013-2017 .....	56
Tabel	3.4. Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2007-2011 .....	57
Tabel	3.5. Proyeksi Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 .....	58
Tabel	9.1. Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 .....	198



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota, yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang Tahun 2007 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011 – 2031;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.

Hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

#### **1. RPJMD dan RPJP Kota Kupang**

RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 merupakan RPJM Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Kupang 2007-2025. RPJM Kota Kupang Tahun 2013-2017

merupakan penjabaran dari program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Kupang masa bakti 2012-2017.

## 2. RPJMD dan RTRW Kota Kupang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang. RTRW Kota Kupang sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Kupang.

## 3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang.

## 4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Kupang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kota Kupang yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat tentang: Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek sosial budaya daerah, aspek prasarana dan sarana daerah, serta pemerintahan umum.

**BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Memuat tentang belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah, dan kerangka pendanaan.

**BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat tentang tinjauan kebijakan dan analisis isu-isu strategis.

**BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang visi, misi Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang.

**BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah.

**BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat tentang kebijakan umum daerah dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan.

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Memuat tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tahun 2013-2017.

**BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Memuat tentang indikator kinerja daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017.

**BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

### **1.5.1. Maksud**

Penyusunan RPJM Kota Kupang Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kupang dengan memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Kupang.

### **1.5.2. Tujuan**

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 ini bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD serta penyusunan RKPD.
2. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam perencanaan program-program pembangunan yang terinci, terukur, dan terintegrasi.
3. Menjamin terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Kupang





## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

##### 2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis terletak pada 123° 32' 23" - 123° 37' 01" Bujur Timur dan 10° 36' 14" - 10° 39' 58" Lintang selatan. Secara administratif, Kota Kupang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan, dengan luas wilayah 260,127 Km<sup>2</sup>, terdiri dari matra darat seluas 165,337 Km<sup>2</sup> dan matra laut 94,790 Km<sup>2</sup>.

Kota Kupang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Teluk Kupang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
- Sebelah Barat : Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Adapun luas wilayah menurut kecamatan Kota Kupang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang**  
**Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kota Kupang
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Alak	70,40	42,58
02	Maulafa	55,67	33,67
03	Oebobo	14,72	8,90
04	Kota Raja	6,19	3,74
05	Kelapa Lima	15,31	9,26
06	Kota Lama	3,05	1,85
Kota Kupang		165,34	100,00

*Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2012*

### **2.1.2. Topografi dan Klimatologis**

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian rata-rata 0-50 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi terletak dibagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% - 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2-15%.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April sampai dengan November dan musim penghujan antara bulan Desember sampai dengan Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 23<sup>0</sup> C sampai dengan 34<sup>0</sup> C, dengan kelembaban udara rata-rata 77 persen.

Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah sudah dimanfaatkan sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tadah hujan, kebun musiman dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan (reboisasi) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan (*cacthment area*) untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang.

### **2.1.3. Potensi Wilayah**

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki fungsi pengembangan wilayah yang luas, tidak saja dalam tataran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dalam tataran regional maupun nasional. Hal tersebut tercermin dan telah ditegaskan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kota Kupang sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang mengemban fungsi pengembangan regional yang luas, dan diarahkan agar memiliki fungsi-fungsi pengembangan sebagai berikut :

- a. Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi;

c. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Selain itu dalam kebijakan pengembangan kawasan andalan, Kota Kupang termasuk salah satu kawasan andalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan utama adalah sektor industri, pariwisata, dan perikanan laut.

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Tenau sampai LLBK kawasan strategis Provinsi NTT, selanjutnya dari LLBK sampai Lasiana merupakan kawasan strategis kota dan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup terdapat di Kelurahan Naioni, Fatukoa dan Kolhua.

#### **2.1.4. Penataan Ruang**

Pola tata guna lahan pada umumnya dimanfaatkan untuk Pemukiman, Ruang Terbuka Hijau, Sawah, Hutan, Perkantoran Perdagangan, Jasa, Industri dimana penggunaannya masih mengikuti jaringan jalan arteri dengan titik pusat aktivitas berada pada bagian pusat kota dan timur kota. Data penggunaan lahan menunjukkan bahwa sebaran Perumahan sebesar 52,26 persen yang terdiri dari: Pemukiman Kepadatan tinggi 10,67%, sedang 20,06% dan kepadatan rendah 21,53% Perdagangan sebesar 1,83%, Industri sebesar 6,35%, terdiri dari : Industri berat 4,30% dan Industri Ringan 2,05%. Jalur Hijau 28,24%, Pelabuhan Udara sebesar 2,86%, Pelabuhan Laut sebesar 0,53%, Perkantoran/Pemerintahan sebesar 1,31%. Pertambangan 0,18%, Pariwisata sebesar 0,81%, Terminal sebesar 0,03%, Pendidikan sebesar 1,37%, Militer dan Kepolisian sebesar 0,54%, Pergudangan sebesar 0,49% dan lain sebagainya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2011-2031, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang

mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Secara garis besar pola penggunaan lahan di Kota Kupang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni : kawasan terbangun seluas 3.445,12 atau 20,84% dan kawasan tidak terbangun seluas 13.088,58 atau 79,16 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Penggunaan Lahan Eksisting Kota Kupang Tahun 2009**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
<b>Kawasan Terbangun :</b>			
1	Pemukiman	1.698,08	10,27
2	Perkantoran	115,72	0,70
3	Perdagangan	116,77	0,71
4	Sekolah dan Perguruan Tinggi	173,98	1,05
5	Peribadatan	17,09	0,10
6	Kesehatan	2,84	0,02
7	Kawasan Polisi dan Militer	112,05	0,68
8	Industri dan Pergudangan	55,63	0,34
9	Lapangan Olah Raga	4,29	0,03
10	TPU	10,17	0,06
11	Terminal	2,61	0,02
12	Kawasan Bandara dan Landasan Pacu	487,94	2,95
13	Kawasan Pelabuhan dan Dermaga	86,63	0,52
14	Jaringan Jalan	561,34	3,40
<b>Jumlah</b>		<b>3.445,12</b>	<b>20,84</b>
<b>Kawasan Tidak Terbangun :</b>			
1	Sawah	415,72	2,51
2	Kebun	998,54	6,04
3	Ladang Tegalan	6.631,79	40,11
4	Tambak	5,55	0,03
5	Pertambangan	73,53	0,44
6	Hutan	2.522,19	15,25
7	Hutan Bakau	32,42	0,20
8	Semak Belukar	203,21	1,23
9	Padang Rumput	1.923,54	11,63
10	Tanah Kosong	212,48	1,29
11	Embung	9,20	0,06
12	Pasir Pasut	9,35	0,06
13	Pasir Pantai	51,06	0,31
<b>Jumlah</b>		<b>13.088,58</b>	<b>79,16</b>
<b>Kota Kupang</b>		<b>16.533,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kota Kupang 2011-2031

Adapun rencana pembagian ruangnya adalah sebagai berikut;

- **Kawasan Pusat Perkantoran**

1. Kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di Kelurahan Oebobo, Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Airnona, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Oepura, Kelurahan Naikolan dan Kelurahan Fontein;
2. Kawasan perkantoran pemerintahan Kota Kupang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Oesapa;
3. Kawasan perkantoran swasta yang diarahkan menyatu dengan lokasi pengembangan kegiatan jasa, terutama pada kawasan di sisi jaringan jalan arteri dan kolektor.

- **Kawasan Perdagangan, Jasa dan Campuran**

1. Kawasan Perdagangan Grosir terletak di Kota Lama Kelurahan LLBK, Kelurahan Solor, sekitar Jl. Timor Raya, Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana.
2. Kawasan Perdagangan Modern terletak di Kota Lama, sekitar Jalan Moh. Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Suharto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Timor Raya dan Jalan Bundaran PU, Jalan Veteran, Jalan Tompello, Jalan Cak Doko, serta Jalan W.J.Lalamentik, Jalan HR.Koroh, Jalan Amabi, Jalan Vetor Foenay, Jalan Untung Surapati, Jalan Badak, Jalan RW. Monginsidi, dan Jalan El Tari, Jalan Frans Seda, Jalan Piet A. Tallo, dan Jalan Herman Johannes serta di setiap lokasi sub pusat kota dan pusat lingkungan dengan besaran yang disesuaikan dengan jangkauan pelayanan.
3. Kawasan Perdagangan Tradisional terletak di Pasar Kasih (Naikoten I), Pasar Kuanino, Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Oesapa, Pasar Penfui dan, pengembangan di Kelurahan Maulafa, Kelurahan Sikumana, Kelurahan Manulai II, dan Kelurahan Alak dan bertahap akan dibangun di tiap kelurahan.

- **Kawasan Industri**

Arahan penempatan lokasi kegiatan industri di Kota Kupang adalah :

1. Untuk industri berat (*polutif*) berlokasi di BWK IV Kecamatan Alak pada kawasan industri Tenau dan sekitarnya.
2. Untuk industri ringan berlokasi di BWK II di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) dan Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo
3. Untuk industri kecil / rumah tangga berlokasi menyebar di setiap BWK menyatu dengan lingkungan perumahan.

- **Kawasan Pariwisata**

1. Kawasan pariwisata alam terletak di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa, Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Kelurahan Alak, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Batuplat;
2. Rencana kawasan pariwisata buatan terletak di Kelurahan Kolhua, Kelurahan Penfui, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Fatululi, Kelurahan TDM dan Kelurahan Kelapa Lima;
3. Kawasan pariwisata cagar budaya Tugu Jepang di Kelurahan Penfui, Meriam Jepang di Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Nun Baun Delha; kawasan Gereja dan Klenteng Tua di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan; kawasan Goa Jepang di Kelurahan Penfui, Kelurahan Bakunase, Kelurahan Liliba dan Kelurahan Nun Bau Delha; benteng *Concordia* di Kelurahan Fatufeto; kawasan Makam Raja Kupang di Kelurahan Bakunase; makam Raja-Raja Taebenu di Kelurahan Manutapen; dan kawasan Makam Belanda di Kelurahan Nunhila dan Kelurahan Fatufeto.

- **Kawasan Pendidikan dan Olah raga**

1. Kawasan pendidikan di Kota Kupang, khususnya untuk pendidikan tinggi di arahkan ke Kelurahan Merdeka (Unwira), Kelurahan Oesapa, Kelurahan Lasiana (Undana, Unkris, STIM), di Kelurahan Kayu Putih UMK, Uyelindo, Stikes CHMK, PGRI, di Kelurahan Naikoten I Kampus Undana Lama, Kampus San Pedro, di Kelurahan Kelapa Lima STIE Oemathonis, Kelurahan

Oesapa Barat STIBA Mentari dan STIBA Cakrawala, di Kelurahan Oesapa Selatan Akademi Farmasi, di Kelurahan Fatubesi Akademi Keuangan Efata.

2. Kawasan olah raga di Kota Kupang, untuk skala regional berada di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo (Stadion Oepoi) dan Tingkat lokal (kecamatan dan kota) diarahkan pada dua daerah utama, yaitu Kelurahan Lasiana (Lapangan Lasitarda) dan Kelurahan Merdeka (Stadion Merdeka). Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan.

### **2.1.5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota**

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Kupang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dengan fungsinya masing-masing.

Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan kegiatan kota dengan lingkup wilayah pelayanan sebagian wilayah kota sebagaimana diatur dalam rencana perwilayahan kota, sehingga disebut juga dengan Pusat Bagian Wilayah Kota (Pusat BWK).

Adapun rencana pembagian BWK di Kota Kupang dibagi dalam 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :

1. BWK I meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, sebagian Kecamatan Kota Lama sebagian Kecamatan Oebobo, sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Naikoten I; dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - Kawasan perdagangan,
  - Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI),
  - Kawasan pemerintahan provinsi,
  - Kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan permukiman,
  - Kawasan pariwisata dan,
  - Kawasan reklamasi pantai dengan intensitas kegiatan tinggi.

2. BWK II meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima dan sebagian Kecamatan Oebobo dan sebagian Kecamatan Kota Lama dengan Pusat BWK terletak di sekitar kawasan Pasar Oebobo Kelurahan Fatululi; dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - Sebagai kawasan pelayanan pemerintahan kota,
  - Perdagangan, kawasan pariwisata dan reklamasi pantai dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.
3. BWK III meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima, sebagian Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kelurahan Liliba di Kecamatan Oebobo dengan Pusat BWK terletak di Pertigaan Kelurahan Oesapa dan Oesapa Barat (Bundaran Undana); dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - Kawasan pengembangan pendidikan tinggi,
  - Kawasan perdagangan dan jasa,
  - Kawasan pusat pelayanan transportasi udara dan darat,
  - Kawasan pariwisata, reklamasi pantai,
  - Kawasan permukiman kepadatan sedang.
4. BWK IV meliputi sebagian Kecamatan Alak dan sebagian kecil Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Alak dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - Kawasan pengembangan industri, pergudangan,
  - Kawasan strategis Minapolitan, pelabuhan perikanan, pariwisata, reklamasi pantai, permukiman,
  - Kawasan Pusat Listrik Tenaga Diesel Tenau serta tempat pembuangan akhir sampah.
5. BWK V meliputi sebagian Kecamatan Maulafa serta sebagian Kelurahan Liliba dan Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo dengan Pusat BWK di Kelurahan Kolhua, dengan arah pengembangan adalah sebagai berikut :
  - Kawasan pengembangan permukiman kepadatan sedang,
  - Kawasan perdagangan dan jasa.



6. BWK VI meliputi Kelurahan Naioni Kecamatan Alak dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Naioni; dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- Kawasan pengembangan permukiman terbatas,
  - Kawasan agropolitan,
  - Kawasan pemakaman dan,
  - Kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air.
7. BWK VII meliputi sebagian Kelurahan Sikumana, sebagian Kelurahan Bello, dan sebagian Kelurahan Kolhua di Kecamatan Maulafa dan sebagian Kecamatan Alak dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Bello, dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- Kawasan pengembangan permukiman terbatas,
  - Kawasan agropolitan dan,
  - Kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan daerah tangkapan air dan Rencana Bendungan Kolhua.

#### 2.1.6. Demografi

Perkembangan jumlah dan kepadatan Penduduk Kota Kupang selama 5 tahun terakhir 2007-2012 secara rinci perkecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2012**

Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan Penduduk Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	43.981	45.945	45.803	51.230	53.186	3,82%
Maulafa	55.379	55.944	55.853	65.851	68.630	4,22%
Oebobo	111.006	111.140	114.979	79.675	82.718	3,82%
Kota Raja	-	-	-	47.876	49.705	3,82%
Kelapa Lima	71.669	73.277	75.159	61.411	63.756	3,82%
Kota Lama	-	-	-	30.196	31.349	3,82%
<b>Jumlah</b>	<b>282.035</b>	<b>286.306</b>	<b>291.794</b>	<b>336.239</b>	<b>349.344</b>	<b>3,89%</b>

*Sumber : Kota Kupang Dalam Angka*

Memperhatikan luas wilayah Kota Kupang yang tercatat 165,34 km<sup>2</sup>, serta tingkat

pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun sebesar 3,89%, maka pada tahun 2012 diperkirakan penduduk Kota Kupang akan mencapai 362.933 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Kupang sebesar 3,89% tidak saja disebabkan oleh angka kelahiran tetapi juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Kepadatan penduduk tahun 2011 rata-rata sebesar 2.112 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan kepadatan penduduk menjadi 2.195 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa masalah kependudukan di masa yang akan datang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, oleh karena itu upaya pengendalian penduduk secara sistematis harus dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan tanah, ketenagakerjaan, serta fokus pada seni budaya dan olah raga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Kupang tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi kota Kupang**  
**Tahun 2007 – 2011**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Pertahun (%)
1	2007	9,00
2	2008	7,45
3	2009	6,49
4	2010	7,84
5	2011	8,26
Rata-Rata Pertumbuhan		7,81

*Sumber : Kota Kupang dalam angka*

Dari tabel 2.4. menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 sampai 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang cukup menggembirakan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 9,00 %, tahun 2008 melambat menjadi 7,45 % dan pada tahun 2009 juga mengalami perlambatan menjadi 6,13 %, sedangkan pada tahun 2010 mengalami percepatan menjadi 8,23 % dan pada tahun 2011 mencapai 8,26 %. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi kota kupang selama lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan setiap tahun sebesar 0,59 % maka dapat diprediksikan pada akhir tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Kupang mencapai angka kurang lebih 11,46 %. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas.

#### 2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Pendapatan Per kapita

Pada Tahun 2008 pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang atas dasar harga konstan sebesar Rp. 5.463.599,- atau mengalami pertumbuhan 5,75 %, dari tahun 2007 sebesar Rp. 5.166.347,- pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.630.187,- meningkat sebesar 3,05 %, dari tahun 2008, Tahun 2010 sebesar Rp. 5.907.672,- meningkat sebesar 4,93 % dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 6.304.420,- atau bertumbuh sebesar 6,72%. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun adalah sebesar 5,11%. Selengkapnya rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Penduduk Tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita**  
**Kota Kupang menurut Harga Berlaku dan Konstan 2000**  
**Tahun 2007 – 2011**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	PDRB Perkapita	Pendapatan Perkapita	PDRB Perkapita	Pendapatan Perkapita
2007	8.642.100	7.549.908	5.902.601	5.166.347
2008	11.322.319	9.753.660	6.342.297	5.463.599
2009	12.355.434	10.643.642	6.531.879	5.630.187
2010*	13.296.613	12.052.893	6.831.223	5.907.672
2011**	15.591.940	13.329.102	7.252.310	6.304.420

Sumber : PDRB Kota Kupang, BPS Kota Kupang

Pendapatan perkapita Penduduk Kota Kupang atas harga konstan 2000 sejak tahun 2007-2011 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, hal ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat Kota Kupang selama kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 1,41% per tahun. Adapun kontribusi sektor ekonomi Kota Kupang Tahun 2007–2011 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Kupang**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Tahun 2007-2011**

No	Sektor	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
	<b>Primer</b>	<b>7,33</b>	<b>6,94</b>	<b>6,84</b>	<b>6,75</b>	<b>6,24</b>	<b>6,82</b>
1	Pertanian	5,22	5,00	5,10	4,97	4,61	4,86
2	Pertambangan dan Penggalian	2,11	1,94	1,74	1,78	1,63	1,80
	<b>Sekunder</b>	<b>12,87</b>	<b>14,05</b>	<b>16,82</b>	<b>16,64</b>	<b>16,79</b>	<b>15,43</b>
3	Industri Pengolahan	3,71	3,32	3,18	3,08	3,01	3,21
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,16	1,17	0,92	0,91	0,93	1,01
5	Bangunan	8,00	9,56	12,72	12,65	12,85	10,75
	<b>Tertier</b>	<b>79,80</b>	<b>79,01</b>	<b>76,34</b>	<b>76,61</b>	<b>76,97</b>	<b>84,48</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	29,18	29,68	28,18	28,63	28,89	28,96
7	Pengangkutan dan komunikasi	14,43	15,13	14,93	14,38	14,40	14,99
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	4,97	4,77	6,47	6,63	6,70	5,73
9	Jasa-jasa	31,22	29,43	26,76	26,97	26,98	28,70
	<b>PDRB Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : BPS Kota Kupang*

Tabel 2.6. menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran masih dominan dalam pembentukan PDRB Kota Kupang Tahun 2011 yakni sebesar 28,89% diikuti oleh sektor jasa 26,98 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 14,40%, sektor bangunan 12,85 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,70%, sektor pertanian 4,61 %, sektor industri pengolahan 3,01%, sektor pertambangan dan penggalian 1,63 % dan sektor listrik, gas dan air minum 0,93%.

Rata rata kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011) menggambarkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Kupang yakni sebesar 28,96 % diikuti oleh sektor jasa 28,70 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 14,99%, sektor

bangunan 10,75%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,73%, sektor pertanian 4,86%, sektor industri pengolahan 3,21%, sektor pertambangan dan penggalian 1,80% dan sektor listrik, gas dan air minum 1,01%.

Dominannya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa dalam pembentukan PDRB Kota Kupang merupakan suatu indikasi bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian masih kuat, yakni melalui penyediaan infrastruktur pembangunan berupa sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah, serta semakin kondusifnya keamanan yang memungkinkan semakin bergairahnya sektor jasa dan perdagangan di Kota Kupang selama kurun waktu lima tahun terakhir. Bagaimanapun juga perencanaan pembangunan ke depan mengarah pada semakin menurunnya peranan pemerintah dan di lain pihak memberikan keleluasan bagi pihak swasta dan masyarakat menjadi penentu utama dalam pembangunan.

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Australia di bagian selatan dan negara Timor Leste di bagian timur mempunyai peluang sebagai kota penghubung yang strategis bagi ke-dua negara bahkan bisa diperluas mencakup kawasan negara-negara Pasifik bagian selatan. Dengan demikian pembangunan di sektor pengangkutan dan komunikasi perlu menjadi prioritas untuk menangkap peluang-peluang yang ada.

Sektor bangunan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Kupang, hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi sehingga pembangunan infrastruktur perkotaan semakin pesat pula.

Pembangunan di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan memperkuat pembangunan pada tataran ekonomi rakyat sekaligus mendorong lebih berkembangnya usaha menengah dan besar. Selain itu dengan membaiknya kondisi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan menjadi pendorong bagi peningkatan investasi di daerah.

Dilihat dari kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan antara lain karena luas areal pertanian yang makin berkurang, bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal yang berimplikasi pada pengurangan akan luas lahan pertanian.

Sektor industri pengolahan mempunyai prospek yang cukup baik di masa depan, dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, bahan mentah yang tersedia semakin mudah diolah untuk menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Dengan demikian proses penciptaan nilai tambah komoditi akan memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan nilai ekonomi secara keseluruhan yang pada akhirnya memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sektor listrik, gas dan air minum menjadi sektor yang krusial dewasa ini untuk diperhatikan karena sektor ini erat kaitannya dengan isu-isu lingkungan dan kebutuhan khalayak ramai akan energi dan air bersih. Penanganan yang tepat dalam pembangunan sektor listrik, gas dan air minum akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan energi yang memadai.

### 2.2.1.3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar, pada tahun 2007 laju inflasi Kota Kupang sebesar 8,44%, tahun 2008 naik menjadi 10,90 %, tahun 2009 turun menjadi 6,49 %, pada tahun 2010 naik menjadi 9,97 % dan pada tahun 2011 turun menjadi 4,32 %; pada tahun 2017 diperkirakan kurang lebih 3,42%. Untuk lebih jelasnya mengenai laju inflasi Kota Kupang tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan kelompok Pengeluaran**  
**Tahun 2007-2011**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bahan Makanan	12,07	11,34	18,56	16,96	-1,31
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	13,63	12,78	11,46	8,62	4,62
3	Perumahan	3,55	18,13	-1,46	3,73	4,50
4	Sandang	5,11	3,17	9,03	5,84	12,76
5	Kesehatan	40,83	7,45	1,77	6,78	5,68
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	5,40	2,12	6,50	4,50	2,46
7	Transportasi dan komunikasi	0,91	3,02	-2,33	12,78	13,30
	Umum	8,44	10,90	6,49	9,97	4,32

*Sumber : BPS Kota Kupang*

#### 2.2.1.4. Distribusi Pendapatan

Dilihat dari distribusi pendapatan penduduk antar golongan pendapatan, maka pada tahun 2007 dengan jumlah penduduk sebanyak 282.035 jiwa, ternyata sebagian besar penduduk Kota Kupang berada pada golongan pengeluaran per kapita Rp. 200.000,- sampai Rp. 299.999,- yaitu sebanyak 23,46%, pada tahun 2008 dan 2009 sebagian besar penduduk Kota Kupang berada pada golongan pengeluaran perkapita Rp 300.000,- sampai Rp 499.999,- sebesar 38,99% dan 30,61%; Sedangkan tahun 2010 dan tahun 2011 golongan pengeluaran terbesar yakni Rp. 500.000,- ke atas sebesar 69,43% dan 66,54%.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang sebagian besar berada pada kelompok pengeluaran Rp. 500.000,- keatas, artinya ada peningkatan pengeluaran penduduk yang signifikan dalam kurun waktu 2007-2011

Untuk lebih jelas mengenai distribusi pendapatan dilihat dari golongan pengeluaran perkapita sebulan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk**  
**Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan**  
**Tahun 2007-2011**

<b>Golongan Pengeluaran Sebulan (Rp)</b>	<b>2007 (%)</b>	<b>2008 (%)</b>	<b>2009 (%)</b>	<b>2010 (%)</b>	<b>2011 (%)</b>
Penduduk (jiwa) □	282.035	286.306	291.794	336.239	349.344
< 100.000	2,53	0,66	0	0,00	0,00
100.000 – 149.999	15,56	3,80	2,00	0,48	0,00
150.000 – 199.999	13,79	9,15	5,27	0,25	1,90
200.000 – 299.999	23,46	20,06	15,65	8,46	5,46
300.000 – 499.999	22,77	38,99	30,61	21,38	27,10
500.000 – 749.999	21,89	21,84	21,82	69,43	26,82
750.000 – 999.999	0,00	4,87	11,72	0,00	14,18
≥ 1.000.000	0,00	1,14	12,93	0,00	25,54
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : BPS Kota Kupang

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran dalam peningkatan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya di bidang Pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pendidikan di Kota Kupang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2011**

No	Indikator Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1.1	Angka Melek huruf	93,19%	93,35%	93,65%	98,70%	98,80%
	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 yang bisa baca/tulis	177.981	178.517	179.928	235.399	236.495
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	190.974	191.214	192.123	238.535	239.399
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD/MI/Paket A	92,58	92,7	102,27	103,25	103,25
	SMP/MTS/Paket B	82,22	82,22	79,48	80,70	80,70
	SMA/SMK/MA/Paket C	68,88	83,33	57,87	60,72	60,72
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD/MI/Paket A	125,19	128,79	126,17	126,18	126,18
	SMP/MTS/Paket B	114,62	119,26	116,46	116,99	116,99
	SMA/SMK/MA/Paket C	83,02	95,08	91,38	94,54	94,54
1.4	Ratio Guru/Murid					
	SD/MI	1:14,50	1:23,65	1:18,26	1:18,38	1:16,87
	SMP/MTS	1:16,99	1:16,89	1:12,94	1:12,63	1:11,84
	SMA/SMK/MA	1:11,83	1:15,03	1:11,31	1:10,74	1:11,41
1.5	Ratio Sekolah/Murid					
	SD/MI	1:214,93	1:306,52	1:305,14	1:340,89	1:348,46
	SMP/MTS	1:461,41	1:430,37	1:422,07	1:429,56	1:396,91
	SMA/SMK/MA	1:441,36	1:445,80	1:452,57	1:450,15	1:423,65

Sumber: BPS Kota Kupang



## 2.2.2.2 Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan. Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

**Tabel 2.10**  
**Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk**  
**Tahun 2007 – 2011**

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi	Gizi Buruk
2007	71,48	2,1/1000	4,12
2008	71,93	7,68 /1000	4,02
2009	72,34	24,94/1000	1,59
2010	72,63	22,35 / 1000	1,01
2011	73,04	5,40 / 1000	1,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang

Dari tabel 2.10 menunjukkan bahwa rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kupang 73,04 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata AHH Nasional yakni 65 tahun. Sehingga dengan semakin meningkatnya AHH, berfluktuasinya angka kematian bayi dan makin menurunnya presentase gizi buruk menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bidang kesehatan semakin membaik.

Sedangkan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Para Medis serta Rasio di Kota Kupang Tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini :

**Tabel 2.11**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan, Para Medis serta Rasio**  
**Tahun 2007 - 2011**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Posyandu	249	255	262	265	278
2	Jumlah Balita	27.352	49.514	21.695	21.695	43.963
	Ratio Posyandu per satuan balita	1:110	1:194	1:83	1:82	1:158
3	Jumlah Puskesmas	7	10	10	10	10
4	Jumlah Pustu	30	21	32	33	33
5	Jumlah Klinik/Balai Pengobatan	17	43	19	17	19
	Ratio Puskesmas	1:40.291	1:28.631	1:29.179	1:33.624	1:34.934
	Ratio Pustu	1:9.401	1:13.634	1:9.119	1:10.189	1:10.586

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
	Ratio Poliklinik/Balai Pengobatan	1:16.590	1:6.658	1:15.358	1:19.779	1:18.387
6	Jumlah Rumah Sakit	3	3	4	7	7
	Ratio Rumah Sakit per satuan Penduduk	1:94.012	1:95.435	1:72.949	1:48.034	1:49.906
7	Jumlah Dokter	21	20	22	30	23
	Ratio Dokter per satuan penduduk	1:13.430	1:14.315	1:13.895	1:11.208	1:15.189
8	Apotik/Toko Obat	-	-	83	87	79
	Ratio Apotik/Toko Obat			1:316	1:3.865	1:4.422

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang

### 2.2.2.3 Kemiskinan

Data statistik Kota Kupang menunjukkan bahwa pada tahun 2007 teridentifikasi 22.285 Rumah Tangga yang di kategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tahun 2008 bertambah menjadi 23.444 RTM atau mengalami peningkatan sebesar 4,94 persen sementara pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 15.076 RTM atau mengalami penurunan 35,69 persen, pada akhir tahun 2011 tercatat sebesar 14.242 RTM atau mengalami penurunan 14,24 persen.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah Rumah Tangga Miskin serta Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin dan**  
**Garis Kemiskinan Kota Kupang**  
**Tahun 2007 - 2011**

Tahun	Rumah Tangga Miskin ( RTM )	Garis kemiskinan ( Rp ) per kapita/bulan
2007	22.285	169.511
2008	23.444	252.195
2009	15.076	255.060
2010	14.242	309.281
2011	14.242	-

Sumber data : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

### 2.2.2.4. Kesempatan Kerja

Sejalan dengan meningkatnya jumlah Penduduk, meningkat pula jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2007-2011, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuatif dengan serapan terhadap tenaga kerja mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini :

**Tabel 2.13**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2011**

Uraian	Jumlah (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Angkatan kerja(15-64 thn)	187.158	194.115	175.076	201.205	216.209
Bukan Angkatan Kerja(0-14 thn, ≥ 65 thn keatas)	94.877	92.191	116.718	135.034	133.135
TPAK	66,36	67,80	60,00	59,84	61,89
Tingkat Pengangguran	2,75	1,44	8,57	7,53	4,29

*Sumber: BPS Kota Kupang*

Selama lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 sebanyak 187.158 orang, tahun 2008 sebanyak 194.115 orang tahun 2009 sebanyak 175.076 orang tahun 2010 sebanyak 201.205 orang dan tahun 2011 sebanyak 216.209 orang, atau sekitar 63,18% penduduk Kota Kupang adalah penduduk usia produktif (15-64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 36,82 persen.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Kupang selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,57 persen, pada tahun 2010 mengalami penurunan sampai pada kisaran angka 7,53 persen. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 4,29 persen. dengan melihat tren pertumbuhan Angkatan kerja yang meningkat selama lima tahun terakhir, maka pemerintah dan swasta perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung penduduk usia kerja/produktif yang semakin meningkat tiap tahun.

Selanjutnya mengenai jumlah penduduk Kota Kupang berdasarkan usia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini :

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penduduk Kota Kupang Berdasarkan Usia**

Tahun	Usia			Jumlah
	0 – 14	15 -64	65 +	
2007	88.418	187.158	6.459	282.035
2008	85.566	194.569	6.171	286.306
2009	85.257	200.317	6.220	291.794
2010	97.693	230.251	8.295	336.239
2011	116.751	218.724	13.869	349.344

*Sumber : BPS Kota Kupang*

### 2.2.2.5. Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan agenda pembangunan demi terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk lebih jelas tentang kondisi keamanan, ketertiban dan kriminalitas di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini :

**Tabel 2.15**  
**Kondisi Keamanan, Ketertiban dan Kriminalitas di Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2011**

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	KDRT	231	222	220	315	435
2	Kriminal	17	13	11	19	14
3	Unjuk Rasa					
	Politik	31	11	27	13	14
	Ekonomi	7	3	9	3	5
	Mogok Kerja	-	-	1	-	-
4	Jumlah satuan Pol PP	139	139	139	168	171
	Rasio	1:2.029,03	1:2.059,76	1:2.099,24	1:2.001,42	1:2.042,95

*Sumber : Kesbangpolinmas Kota Kupang*

### 2.2.2.6 . Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata

#### 2.2.2.6.1. Seni Budaya

Kota Kupang sebagai Kota yang berbudaya, Pemerintah memberikan ruang yang cukup terhadap perkembangan seni budaya baik yang bersifat tradisional maupun modern. Menyadari Kota Kupang sebagai miniatur NTT yang heterogen dengan keanekaragaman etnis dan budaya, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah untuk melakukan pembinaan secara terus menerus demi kelestarian budaya dari masing-masing etnis yang ada di Kota Kupang.

#### 2.2.2.6.2. Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang, pemuda memberikan andil terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Kupang yang aman dan

nyaman. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Kupang berupaya mendukung berkembangnya Organisasi Pemuda dan Olahraga dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Kupang.

### 2.2.2.6.3 Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Kupang meliputi beberapa aspek yakni objek wisata yang meliputi objek wisata alam dan objek wisata buatan, sedangkan sarana dan prasarana pendukung meliputi hotel/penginapan, rumah makan/restaurant, dan transportasi. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan pariwisata di Kota Kupang, berikut ini disajikan data-data objek, sarana dan prasarana kepariwisataan dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini :

**Tabel 2.16**  
**Data-Data Objek, Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2011**

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Objek Wisata					
	-Alam	24	24	24	24	24
2	Hotel/Penginapan					
	-Melati/penginapan lainnya				50	50
	-Bintang 1			3	3	3
	-Bintang 2			3	3	3
	-Bintang 3	1	1	1	1	3
3	Restoran/Rumah Makan				300	350
4	Jumlah Kunjungan					
	-Wisman				17.462	
	-Domestik				261.379	

*Sumber data: BPS Kota Kupang dan Dinas Pariwisata*

### 2.2.3 Pendapatan Daerah

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Perkembangan Penerimaan daerah Kota Kupang Tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :

**Tabel 2.17**  
**Penerimaan Keuangan Daerah Kota Kupang**  
**Tahun 2007 – 2011**

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.659.877.526	32.036.713.530,94	36.204.733.167,02	36.828.891.454,35	47.702.927.427,60
	a. Pos Pajak Daerah	8.198.294.642	9.946.115.049	11.977.785.476	13.247.651.835	22.200.583.682
	b. Pos Retribusi Daerah	7.593.047.533	8.898.181.422	9.323.675.310	10.237.262.522	11.267.458.193
	c. Pos Bagian Laba BUMD	2.809.443.014	3.284.624.905	4.516.252.840	5.940.394.702	8.015.299.050,51
	d. Lain-lain PAD yang Sah	12.059.092.337	9.907.792.154,94	10.387.019.541,02	7.403.582.395,35	6.219.586.502,09
B	DANA PERIMBANGAN	330.731.788.453	374.684.671.969	404.166.660.024	401.826.042.065	450.311.609.119
	e. Pos Bagi Hasil Pajak	17.316.711.848	21.992.216.386	26.391.433.024	29.752.426.464	31.654.498.584
	f. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	3.411.076.605	146.580.583	329.002.227.000	196.819.601	354.403.535
	g. Pos Dana Alokasi Umum	277.705.000.000	313.887.875.000	48.773.000.000	340.862.396.000	377.570.807.000
	h. Pos Dana Alokasi Khusus	32.299.000.000	38.658.000.000	26.391.433.024	31.014.400.000	40.731.900.000
C	LAIN - LAIN PEND. DAERAH YANG SAH	29.654.864.493	11.166.765.342	38.055.736.529,00	104.197.659.425	110.802.058.288
	i. Pos Lain – lain Pendapatan	29.654.864.493	11.166.765.342	38.055.736.529,00	104.197.659.425	110.802.058.288
	J U M L A H	391.046.530.472,00	417.888.150.841,94	478.427.129.720,02	542.852.592.944,35	608.816.594.834,60

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang

Dari tabel 2.17 diatas dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (pusat), pada tahun 2007 sebesar 9,27% : 90,73% dan pada tahun 2011 menjadi 10,59% : 89,41%, dengan rata-rata perbandingan PAD : Dana Perimbangan per tahun sebesar 9,93% : 90,07%. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2007 sebesar 13,46% : 86,54% dan pada tahun 2011 menjadi 12,63% : 87,37%, dengan rata-rata perbandingan PAD : DAU per tahun 13,05% : 86,95%. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan pusat masih sangat tinggi yaitu  $\geq 90\%$ .

Adapun rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30,03%. Adapun penerimaan pajak daerah yang menonjol antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Rumah Makan, Pajak Reklame, Panti Pijat / Refleksi.

Selengkapnya penerimaan dari sektor pajak daerah sebagaimana tabel 2.18 berikut ini:

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah**

JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Hotel Bintang Tiga	301.334.000	433.251.000	844.145.123	784.243.289	814.684.164
Hotel Bintang Dua	333.985.084	409.016.314	722.992.291	886.689.938	1.178.505.914
Hotel Bintang Satu	29.190.000	64.305.000	122.298.830	136.806.828	231.664.715
Hotel Melati Tiga	146.854.391	209.370.450	231.970.935	290.029.863	394.707.644
Restoran	373.508.300	1.096.818.674	1.689.243.905	1.836.077.860	2.224.066.956
Rumah Makan	143.147.594	147.467.645	-	298.948.349	445.711.932
Karaoke	17.751.200	44.210.750	197.320.189	284.288.580	400.912.520
Permainan Bilyar	3.030.000	5.750.000	5.919.750	3.852.000	26.001.000
Panti Pijat / Refleksi	8.920.000	10.314.000	45.982.423	66.929.711	176.909.128
Permainan Anak-Anak	22.100.000	20.758.000	37.320.000	39.600.000	84.720.000
Pajak Hiburan Insidentil	9.420.000	8.327.500	17.275.993	13.715.894	71.883.293
Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron	313.786.735	537.236.020	582.575.852	819.134.369	940.458.832
Reklame Berjalan	23.046.675	7.850.765	-	-	-
Pajak Reklame Insidentil	37.032.750	29.718.063	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan PLN	5.896.824.613	6.407.897.575	7.007.421.685	7.126.376.254	9.619.193.820
Batu Kapur	-	-	-	660.958.900	-
Batu Karang	485.547.100	453.823.293	411.818.500	-	9.630.455
Batu Kali	-	-	-	-	86.037.407
Pasir	-	-	-	-	39.274.063
Tanah Putih	-	-	-	-	11.755.008
Tanah Liat	-	-	-	-	66.000
Sirtu	-	-	-	-	38.244.830
Batu Pecah	-	-	-	-	70.384.237
Pajak Parkir	52.816.200	60.000.000	61.500.000	-	164.120.000
Pajak BPHTB	-	-	-	-	5.171.651.764
<b>JUMLAH</b>	<b>8.198.294.642</b>	<b>9.946.115.049</b>	<b>11.977.785.476</b>	<b>13.247.651.835</b>	<b>22.200.583.682</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang

Penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,10%. Adapun penerimaan retribusi daerah yang menonjol antara lain adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi PHB Askes, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Selengkapnya penerimaan dari sektor pajak daerah sebagaimana tabel 2.19 berikut ini :

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah**

RETRIBUSI DAERAH	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Jumlah</b>	<b>6.536.502.045</b>	<b>8.898.181.422</b>	<b>9.323.675.310</b>	<b>10.237.262.522</b>	<b>11.267.458.193</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	650.025.000	619.047.000	628.842.000	677.625.600	1.098.046.085
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	219.157.900	501.190.000	511.350.000	480.950.000	365.825.000
Retribusi Pengganti Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	922.718.500	1.116.392.000	1.165.458.000	1.376.544.000	781.050.000
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.880.000	8.400.000	6.270.000	4.910.000	4.792.500
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	191.839.500	178.379.000	223.129.000	259.849.900	299.800.500
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.651.600	524.584.300	556.452.800	580.651.500	684.497.500
Retribusi PHB / Askes	473.065.000	608.645.000	480.227.000	634.690.000	904.281.524
Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan (Izin Praktek Dokter)	8.050.000	9.075.000	2.350.000	37.550.000	36.350.000
Retribusi Alat Mesin Pertanian	3.935.000	6.500.000	8.050.000	7.000.000	2.250.000
Retribusi Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas	31.820.000	-	133.000.000	-	-
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	42.750.000	181.500.000	1.860.000	151.300.000	189.800.000
Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	1.100.000	4.290.000	-	3.040.000	900.000
Retribusi Terminal	450.650.000	428.144.000	420.518.000	427.219.000	406.280.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	57.434.200	92.669.660	78.592.680	85.702.280	74.098.840
Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	41.700.000	57.875.000	54.475.000	49.400.000	62.200.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	275.559.500	250.820.500	188.849.500	208.671.500	223.320.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.667.500	85.309.000	111.750.000	110.250.000	73.050.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	934.905.362	689.162.830	5.834.000	-
Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan (dari Distanhut)	-	4.274.000	5.257.500	-	7.005.000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	994.428.145	1.164.666.750	1.209.535.050	2.643.257.342	3.469.959.884
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	681.255.500	851.439.500	1.429.692.000	972.282.500	855.561.500
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	919.953.500	1.027.901.250	1.165.638.500	1.114.336.500	1.363.705.750
Retribusi Izin Trayek	82.471.200	69.734.400	59.560.200	39.608.200	44.771.000
Retribusi Izin Usaha Perikanan	27.390.000	28.420.000	33.125.000	25.135.000	10.660.000
Retribusi Izin Usaha Kesehatan Hewan	-	8.100.000	2.800.000	8.216.500	1.750.000
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan	-	135.919.700	121.330.250	288.188.700	270.502.610
Retribusi Izin Usaha Pariwisata	-	-	36.400.000	45.050.000	37.000.000

*Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang*

## 2.2.4 Belanja Daerah

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, maka selama lima tahun terakhir kebijakan belanja daerah selalu mengalami pertumbuhan positif per tahun. Pada tahun anggaran 2007 tercatat jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 176.838.850.139, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 224.392.659.424,-.



Dengan demikian selama periode waktu 2007-2011, rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 6,50 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini:

**Tabel 2.20**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2007 – 2011**

Jenis Belanja	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>216.012.430.656</b>	<b>295.634.160.364</b>	<b>332.273.055.229</b>	<b>368.854.272.746</b>	<b>421.224.021.047</b>
1. Belanja Pegawai	178.174.428.068	261.077.134.864	297.900.749.002	342.761.592.746	386.748.187.645
2. Belanja Hibah	-	1.878.590.500	3.745.000.000	6.420.000.000	12.094.375.000
3. Belanja Bantuan Sosial	18.862.195.000	21.580.065.000	16.498.999.500	11.067.500.000	12.344.400.000
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	73.500.000	73.500.000	113.500.000	95.930.000	114.240.000
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	16.102.307.588	8.524.870.000	12.109.250.000	8.009.250.000	7.251.400.000
6. Belanja Tak Teduga	2.800.000.000	2.500.000.000	1.905.556.727	500.000.000	2.671.418.402
<b>Belanja Langsung</b>	<b>176.938.850.139</b>	<b>180.432.877.935</b>	<b>214.810.307.620</b>	<b>235.285.337.373</b>	<b>224.392.659.424</b>
1. Belanja Pegawai	26.219.292.720	28.847.612.585	19.413.640.650	20.992.407.630	27.564.956.848
2. Belanja Barang dan Jasa	59.608.304.643	77.666.724.650	98.350.043.890	83.391.166.278	91.465.530.639
3. Belanja Modal	91.111.252.776	73.918.540.700	97.046.623.080	130.901.763.465	105.362.171.937
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>392.951.280.795</b>	<b>476.067.038.299</b>	<b>547.083.362.849</b>	<b>604.139.610.119</b>	<b>645.616.680.471</b>

*Sumber Data : Bagian Keuangan Setda Kota Kupang*

### 2.2.5 Investasi

Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2008 dibandingkan Tahun 2011 mengalami kenaikan dari Rp. 853.312,- menjadi Rp. 16.761.108.680,-. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami penurunan dari Rp. 509.431.580.621,40,- pada Tahun 2008 menjadi Rp 186.283.828.213,- pada Tahun 2011. Sedangkan dari daya serap tenaga kerja untuk PMA naik dari 5 orang pada tahun 2008 menjadi 9 orang pada tahun 2011. Sedangkan daya serap tenaga untuk PMDN meningkat dari 782 orang tahun 2008 menjadi 871 orang pada tahun 2011. Kenaikan investasi PMA ini tidak lepas dari kondusifnya iklim investasi, sebagai ibu kota Provinsi NTT. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.21 berikut ini:

**Tabel 2.21**  
**Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi**

Tahun	Jumlah		Nilai Investasi		Tenaga Kerja	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2007	-	-	-	-	-	-
2008	9	9	853.312	509.431.580.621,40	5	782
2009	10	11	1.603.312	501.659.117.621,40	8	871
2010	10	11	2.353.312.000	519.909.117.621,40	8	871
2011	16	19	16.761.108.680	186.283.828.213,00	9	871

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Kota Kupang

## 2.3 Sosial Budaya Daerah

### 2.3.1. Jumlah, Perkembangan dan Kepadatan Penduduk

Memperhatikan luas wilayah Kota Kupang yang tercatat 165,34 Km<sup>2</sup>, serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun sebesar 3,89%, maka pada tahun 2012 diperkirakan penduduk Kota Kupang akan mencapai 362.933 jiwa. Kepadatan penduduk saat ini rata-rata sebesar 2.112 Jiwa per km<sup>2</sup>. Tahun 2012 kepadatan penduduk akan menjadi 2.195 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa masalah kependudukan di masa yang akan datang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, oleh karena itu upaya pengendalian penduduk secara sistematis harus dilaksanakan secara efektif melalui program Keluarga Berencana.

Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2011, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang Tahun 2007 adalah 74,70 tahun 2008 tercatat 76,58, tahun 2009 tercatat 76,94 tahun 2010 tercatat 77,31 sedangkan tahun 2011 tercatat 77,73. Dengan demikian selama lima tahun terakhir Kota Kupang menduduki urutan pertamadari seluruh kabupaten Kota se Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Kupang.

### 2.3.2. Kesejahteraan Sosial

Sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Walaupun ditengarai mereka berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah Kota Kupang dan menjadi pemandangan yang berkesan kurang baik.

Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kota Kupang dapat dilihat dari semakin beragamnya fasilitas sosial yang tersedia serta semakin meningkatnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial.

Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Kupang meliputi Panti Jompo sebanyak 2 (dua) buah panti asuhan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan rumah singgah sebanyak 1 (satu) buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini :

**Tabel 2.22**  
**Perkembangan Jumlah Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah di Kota Kupang**

Tahun	Jumlah panti jompo	Jumlah panti asuhan	Jumlah rumah singgah
2007	2	17	
2008	2	17	1
2009	2	17	1
2010	2	17	1
2011	2	17	1

*Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang*

Khusus rumah singgah dimaksudkan untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma untuk memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.

## **2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH**

### **2.4.1. Perumahan**

Kondisi rumah penduduk di Kota Kupang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang dindingnya belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

### **2.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan**

Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Kupang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 124 buah,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 46 buah, Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 47 buah dan Perguruan Tinggi 20 buah. Untuk lebih jelasnya mengenai Jumlah sekolah dan siswa berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat padat tabel 2.23 berikut ini :

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Sekolah dan Siswa berdasarkan jenjang pendidikan**  
**Tahun 2011**

Jenjang Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah		Ratio
	Sekolah	Siswa/Mhs	Sekolah	Siswa/Mhs	Sekolah	Siswa/Mhs	
PAUD	-	-	221	-	221	-	
TK	1	174	95	4.333	96	4.507	1 : 47
SD/ MI	78	30.443	46	11.667	124	43.049	1 : 347
SMP/ MTs	20	14.492	26	3.403	46	19.047	1 : 414
SMU	11	7.822	17	4.143	28	11.965	1 : 427
SMK	6	5.253	13	3.498	19	8.751	1 : 461
PT	4	8.420	16	27.010	20	35.430	1 : 1772
<b>Jumlah</b>	120	66.604	434	50.154	554	116.758	

*Sumber : BPS Kota Kupang*

Dari Tabel tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi. Untuk pendidikan SLP dan SLA, jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri.

Untuk daya tampung SD, sekolah swasta mampu menampung 11.667 murid, sedangkan SD negeri mampu menampung 30.443 murid atau sekitar tiga kali SD swasta. Untuk SMP jumlah murid yang ditampung swasta 3.403 murid, SMP negeri 14.492 murid sehingga yang ada di sekolah negeri lebih banyak daripada swasta. Fenomena ini lebih jelas di SMU/SMK dimana untuk swasta mampu menampung 7.641 murid sedangkan negeri 13.075 murid. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, peran serta atau partisipasi swasta semakin tinggi dalam pemenuhan pendidikan.

### 2.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kupang. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 8 unit, Rumah Sakit Bersalin 3 unit, Puskesmas 10 unit dan Puskesmas Pembantu 33 unit.

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 43 unit sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 7 unit (Puskesmas dan Pustu), serta didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya memberikan gambaran bahwa pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat cukup memadai. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini :

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Kupang**

No	Jenis Fasilitas	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Puskesmas	7	7	10	10	10
2.	Puskesmas Pembantu	31	32	32	33	33
3.	RS Negeri	3	4	5	6	6
4.	RS Swasta	1	1	1	1	2
5.	Klinik 24 Jam	3	3	3	3	3
6.	Rumah Bersalin	3	3	3	3	3
7.	Laboratorium Kesehatan	3	3	3	3	3
8.	Balai Pengobatan Negeri	0	0	0	0	0
9.	Balai Pengobatan Swasta	9	9	23	11	19
10.	Apotik/Toko Obat	72	76	83	87	79

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang*

#### 2.4.4 Jaringan Transportasi

Panjang jaringan jalan di Kota Kupang adalah 1.647,06 Km. Dari panjang jaringan jalan tersebut, 26,20 km merupakan jalan Negara; 46,08 Km merupakan jalan provinsi; dan 1.574,78 km merupakan jalan kota/lokal. Bila dilihat dari kondisinya, 769,97 Km berada dalam kondisi baik; 270,10 Km berada dalam kondisi sedang; dan 606,99 km berada dalam kondisi rusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini :

**Tabel 2.25**  
**Panjang Jalan menurut Status dan Kondisi Jalan Tahun 2007-2011**

Tahun	Negara (km)				Propinsi (km)				Kota / Lokal (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	805,98	31,71	-	806,01
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	285,99	185,05	1131,83	1.602,87
2009	32,22	5,13	-	37,35	10,40	-	-	10,40	345,45	165,82	1063,09	1.574,36
2010	32,09	-	-	32,09	69,01	-	-	69,01	347,04	166,58	1058,30	1.571,90
2011	26,20	-	-	26,20	46,08	-	-	46,08	697,69	270,10	606,99	1.574,78

*Sumber: BPS Kota Kupang*

**Tabel 2.26**  
**Panjang Jalan Kota di Kota Kupang menurut Jenis Permukaan**  
**Tahun 2007-2011**

Tahun	Kota / Lokal (km)			
	Aspal	Kerikil	Tanah	Jumlah
2007	628,98	31,71	-	806,01
2008	672,92	287,26	642,70	1.602,87
2009	690,90	272,90	610,56	1.574,36
2010	694,08	270,45	607,39	1.571,90
2011	697,69	270,10	606,99	1.574,78

Sumber: BPS Kota Kupang

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota.

Selain jalan dan jembatan, terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada di Kota Kupang juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yang termasuk lengkap yaitu pelabuhan Tenau Kupang dan Bandara Udara El Tari. Pelabuhan Tenau Kupang dipersiapkan sebagai pelabuhan Internasional dan satu-satunya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Tenau melayani arus naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Untuk transportasi udara dilayani oleh Pelabuhan Udara El Tari, sedangkan untuk pelayanan transportasi darat telah disediakan 5 (lima) sarana terminal angkutan umum yaitu Terminal Oebobo, Terminal Kota Lama, Terminal Belo, Terminal Manulai II dan Terminal Alak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut ini :

**Tabel 2.27**  
**Volume Bongkar Muat, Arus Penumpang Transportasi Laut dan Udara di Kota Kupang**  
**Tahun 2007-2011**

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Transportasi Laut ( arus bongkar muat barang dalam ton)</b>						
1	Bongkar	9.392	373.392	480.415	327.314	506.769
2	Muat	7.037	95.774	210.503	32.284	69.417
<b>Transportasi Laut ( arus penumpang)</b>						
3	Naik	89.234	95.139	99.167	158.329	100.327
4	Turun	86.074	95.172	69.360	96.190	137.558
<b>Transportasi Udara ( arus penumpang)</b>						
5	Datang	264.143		404.501	421.332	554.980
6	Berangkat	281.967		425.616	489.246	587.556

Sumber: : BPS Kota Kupang

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas transportasi darat (terminal), pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang efektif.

**Tabel 2.28**  
**Banyaknya Kendaraan Bermotor, dan Trayek Angkutan dan Terminal**  
**di Kota Kupang Tahun 2007 – 2011**

Uraian	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Angkutan Orang					
▪ Angkutan Kota	4.493	5.486	5.873	667	711
▪ Bus	17	1.842	4.883	616	674
2. Angkutan Barang					
▪ Pick Up	1.021	799	659	1.227	1.427
▪ Mobil Box	596	325	912	-	79
▪ Truck	3.323	4.114	689	614	1.262
▪ Tronton/Gandengan	63	51	18	16	17
▪ Tangki	-	-	-	114	197
3. Taxi	95	15	15	50	50
4. Angkutan Sewa	45	45	49	54	54
5. Halte	15	15	15	28	28
6. Terminal	5	5	5	5	5
7. Pos Pemantau	5	5	5	5	5
8. Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	1	1	1
9. Pelabuhan Laut	4	4	4	4	4
10. Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1

Sumber: : *Buku Informasi Umum Perhubungan, Dinas Perhubungan NTT*

#### 2.4.5. Jaringan Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih (PDAM) di Kota Kupang tahun 2009 sebanyak 2.031 dengan pemakaian sebanyak 35.044 m<sup>3</sup>, pada tahun 2010 sebanyak 2.572 pelanggan dengan pemakaian air sebanyak 221.238 m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 3.062 pelanggan dengan pemakaian air sebanyak 412.576 m<sup>3</sup>. Data selengkapnya mengenai jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini :

**Tabel 2.29**  
**Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM di Kota Kupang**  
**Tahun 2009 – 2011**

Jenis Pelanggan	Tahun 2009		Tahun 2010		2011	
	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m <sup>3</sup> )	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m <sup>3</sup> )	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m <sup>3</sup> )
Sosial umum	-	-	-	-	-	-
Sosial Khusus	22	7.296	50	6.022	59	28.434
Rumah Tangga	1.940	11.344	2.454	208.850	2.929	367.661
Instansi Pemerintah	39	13.152	36	4.308	40	12.128
Niaga	30	3.252	32	2.058	34	4.353
<b>Jumlah</b>	<b>2.031</b>	<b>35.044</b>	<b>2.572</b>	<b>221.238</b>	<b>3.062</b>	<b>412.576</b>

*Sumber: BPS Kota Kupang*

#### 2.4.6. Jaringan Drainase

Pengembangan sistem drainase di Kota Kupang meliputi :

- (1) Saluran drainase daerah menampung limpasan air hujan dan air limbah rumah tangga setelah melalui proses pengolahan awal.
- (2) Sistem pembuangan drainase Kota Kupang meliputi:
  - a. Sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi wilayah;
  - b. Sistem pembuangan air hujan meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; dan
  - c. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer.
- (3) Pengembangan jaringan drainase kota, terdiri atas :
  - a. Drainase primer yaitu Sungai Liliba yang bermuara di Pantai Oesapa, Sungai Dendeng yang bermuara di Pantai Lai Lai Besi Kopan dan Sungai Merdeka yang bermuara di Pantai Fatubesi;
  - b. Drainase sekunder meliputi saluran parit yang tersebar di seluruh wilayah yang mengarah pada saluran drainase primer; dan
  - c. Drainase tersier meliputi saluran drainase yang berasal dari ruas jalan lokal maupun lingkungan di seluruh daerah.
- (4) Pengembangan sistem drainase diutamakan pada kawasan pusat kota, kawasan pengembangan perumahan, kawasan pengembangan pariwisata, kawasan



pengembangan pusat pelayanan, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang terdapat pada pusat-pusat kegiatan;

- (5) Kawasan rawan banjir berada pada ruas-ruas jalan di Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Naikoten II, Kelurahan Oetete, Kelurahan Kuanino, Kelurahan Oepura, Kelurahan Oebobo, Kelurahan Air Mata, Kelurahan Oeba, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Fatufeto, Kelurahan Naikolan, Kelurahan Penfui, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Oesapa Selatan dan Kelurahan Oesapa Barat;
- (6) Pembangunan daerah resapan di jalur-jalur jalan kolektor dan lokal di seluruh wilayah Kota Kupang untuk mengatasi permasalahan genangan air; dan
- (7) Normalisasi secara berkala pada saluran drainase primer, sekunder dan tersier yang tersebar di seluruh wilayah daerah.

#### **2.4.7. Jaringan Sampah**

Pengelolaan sampah di kota besar seperti Kupang semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas atau Kelurahan/ Kecamatan.

Pengelolaan sampah Kota Kupang saat ini menjangkau semua kelurahan sebanyak 51 Kelurahan yang ada di Kota Kupang dan sampah yang terangkut 623,625 m<sup>3</sup> atau 94, 74 % dari seluruh produksi sampah total Kota Kupang sebesar ± 658,23 m<sup>3</sup>/ hari.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada pada saat kondisinya rata-rata umur teknisnya diatas lima tahun, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.30 sebagai berikut :

**Tabel 2.30**  
**Jumlah sarana dan prasarana Persampahan**

<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
• Mobil Pengangkut sampah	18 unit
- Truck Hidrolik/Arm Roll	3 unit
- Dump Truck Sampah	15 unit
• Mobil Pengangkut Tinja	
- Truck Tinja	2 unit
• Alat Berat	4 unit
- Buldozer	1unit
- Loader	1unit
- Exavator	2unit
- Motor Sampah (tiga roda)	51 unit
- TPA (Tempat Proses Akhir)	1 unit (7,5 Ha)
- TPS (Tempat Proses Sementara)	71 unit
- Gerobak Sampah	58 unit

*Sumber : Dinas Kebersihan Kota Kupang*

#### **2.4.8. Jaringan Listrik**

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2011 tercatat sebanyak 69.631 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebanyak 63.644 pelanggan dengan jumlah pemakaian sebanyak 91.032.754 Kwh, diikuti oleh Toko dengan jumlah pelanggan sebanyak 4.234 dengan banyaknya pemakaian 55.477.349 Kwh Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini :

**Tabel 2.31**  
**Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Kupang**  
**Tahun 2007 – 2011**

Jenis Pelanggan	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	Jml Plgn	Byknya Pmkaian	Jml Plgn	Byknya Pmkaian	Jml lgggn	Bnyknya Pmkaian	Jml Plgggn	Bnyknya Pmkaian	Jml Plgggn	Bnyknya Pmkaian
Rumah Tangga	46.772	61.491.236	107.103	110.803.189	49.995	78.641.957	53.668	89.983.285	63.644	91.032.754
Toko	3.523	24.992.145	8.688	45.009.927	3.878	30.673.608	4.024	39.125.584	4.234	55.477.349
Industri	29	6.520.303	47	4.583.670	28	2.166.270	26	1.832.608	28	2.166.054
Kantor	558	8.876.251	1.585	12.631.135	898	5.740.670	604	10.578.722	630	9.965.081
Sosial	848	4.905.813	2.998	9.585.979	609	9.555.150	934	6.899.873	995	6.990.327
Jalan Umum	71	7.829.350	174	11.104.978	72	7.816.070	55	7.676.967	58	7.403.131
Dipakai sendiri	-	-	-	-	-	2.550.000	-	2.888.959	42	119.376
Susut	-	-	-	-	-	12.627.674	-	13.843.075	-	14.648.348
<b>Jumlah</b>	51.891	114.615.098	120.595	193.718.878	55.480	149.771.399	59.311	172.829.037	69.631	187.802.420

*Sumber : BPS Kota Kupang*

Jangkauan pelayanan listrik secara umum sudah menjangkau seluruh wilayah Kota Kupang namun belum semua bangunan rumah tangga menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan rumah tangga sebanyak 84.060 buah, sedangkan yang menjadi pelanggan rumah tangga sejumlah 63.644 pelanggan.

## 2.5. PEMERINTAHAN UMUM

### 2.5.1. Organisasi dan Aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kota Kupang terbagi atas 6 wilayah Kecamatan dan 51 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kota Kupang didukung oleh Jumlah Pegawai sebanyak 8.265 orang yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.115 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1.150 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pegawai menurut Golongan dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut ini :

**Tabel 2.32**  
**Data Pegawai PTT dan PNS**

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH / TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Data PTT	508	509	680	1.042	1.150
2. Data Jumlah Pegawai :	5.848	6.094	6.526	7.015	7.115
- Golongan IV/a – IV/d	1.586	1.615	1.614	1.861	1.999
- Golongan III/a – III/d	2.499	2.505	2.730	3.003	3.010
- Golongan II/a – II/d	1.396	1.404	1.539	1.857	1.939
- Golongan I/a – I/d	121	138	154	194	167
- CPNS	246	432	489	100	-
Total Jumlah Pegawai	6.356	6.603	7.206	8.057	8.265

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kota Kupang didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai.

**Tabel 2.33**  
**Jumlah pegawai menurut pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI
		2011
1	SD	77
2	SLTP	130
3	SLTA	2.067
4	Diploma (D1,D2 danD3)	1.924
5	S1	2.802
6	S2	115
	<b>Jumlah</b>	<b>7.115</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang

Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.34 berikut.

**Tabel 2.34**  
**Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Struktural**

DIKLAT	TAHUN			
	2007	2008	2009	2010
1. Diklat Pim II	12	17	3	8
2. Diklat Pim III	71	25	11	16
3. Diklat Pim IV	280	200	80	-

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang*

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan- jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapnnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut :

**Tabel 2.35**  
**Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional**

DIKLAT	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Diklat Teknis Fungsional	101	218	160	204	-
2. Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penyusunan Karya Ilmiah	-	-	125	80	-
3. Diklat Pra Jabatan Gol. II	23		200	103	-
4. Diklat Pra Jabatan Gol. III	37	36	181	24	-

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang*

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Kupang no.1, 2, 3 dan 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) Pemerintah Kota Kupang yang terdiri dari :

- ✿ Walikota dan Wakil Walikota.
- ✿ Sekretaris Daerah dengan 3 Asisten dan 10 Bagian yang terdiri dari
  - Asisten Pemerintahan, meliputi :
    - Bagian Pemerintahan;
    - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
    - Bagian Sosial.
  - Asisten Per-Ekonomian dan Pembangunan
    - Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
    - Bagian Pemberdayaan Perempuan.
  - Asisten Administrasi Umum
    - Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
    - Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - Bagian Hukum;
    - Bagian Pengelolaan Data Elektronik;
    - Bagian Keuangan.
- ✿ Sekretaris DPRD dengan 4 Bagian yang meliputi :
  - Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - Bagian Persidangan dan Risalah;
  - Bagian Keuangan;
  - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- ✿ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebanyak 16 buah yang terdiri :
  - Badan Penanaman Modal Daerah;
  - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
  - Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - Badan Perpustakaan Daerah;
  - Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - Badan Kepegawaian Daerah;

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - Badan Ketahanan Pangan;
  - Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Kantor Pemadam Kebakaran;
  - Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah;
  - Rumah Sakit Umum Daerah.
- ✚ Dinas Daerah sebanyak 17 buah terdiri dari :
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
  - Dinas Kesehatan;
  - Dinas Sosial;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - Dinas Perhubungan;
  - Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - Dinas Pekerjaan Umum;
  - Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang;
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
  - Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - Dinas Pertambangan dan Energi;
  - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
  - Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- ✚ Kecamatan dan Kelurahan terdiri :
- 6 (enam) Kecamatan;
  - 51 (lima puluh satu) Kelurahan.

### 2.5.2. Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “*entry point*” yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kota. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan menjadi sangat penting.

Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain.

Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, HO, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTPCR), Akte Kelahiran/Kematian), pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan.



Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, beberapa langkah telah dilakukan. Pertama, mengimplementasikan Bulan Layanan Publik (BLP) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2004. Kedua, dilanjutkan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik (TP3) hingga akhir tahun 2004. Ketiga, menindak lanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kota Kupang telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya cukup baik. Keempat, pada bulan Agustus 2005 dibuat Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah / saluran bagi masyarakat untuk mengadu / komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.



### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan.

Pemerintah Kota Kupang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Kupang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Selama lima tahun terakhir 2007-2011 kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan penerimaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pengelolaan Keuangan Kota Kupang Tahun 2007 – 2011**

Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan	391.046.530.472	417.888.150.842	478.427.129.720	542.852.592.944	608.816.594.835
Belanja Daerah	349.406.831.814	419.333.438.912	483.344.658.651	557.284.994.993	592.686.661.422
Penerimaan Pembiayaan	61.897.837.815	98.401.690.879	76.550.480.776	68.614.458.309	49.237.841.461
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	21.000.000.000	5.200.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000

*Sumber data : Buku APBD Kota Kupang, Tahun 2007 – 2011*

Realisasi rata – rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun (2007 - 2012) sebesar 11,74 persen per tahun dan realisasi proporsi rata – rata Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 7,52 persen. Sementara pertumbuhan rata-rata per obyek pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah didominasi oleh Dana Perimbangan dengan persentase sebesar 80,43 persen, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 12,05 persen.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,52 persen per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang tahun 2007 – 2012 yang ditargetkan sebesar 14 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2011 dapat dilihat tabel 3.2. berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2011**

Uraian	Realisasi					Pertumbuhan Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>391.046.530.472,00</b>	<b>417.888.150.842,00</b>	<b>478.427.129.720,00</b>	<b>542.852.592.944,00</b>	<b>608.816.594.835,00</b>	<b>11,74%</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>30.659.877.526,00</b>	<b>32.036.713.530,94</b>	<b>36.204.733.167,02</b>	<b>36.828.891.454,35</b>	<b>47.702.927.427,60</b>	<b>12,19%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	8.198.294.642,00	9.946.115.049,00	11.977.785.476,00	13.247.651.835,00	22.200.583.682,00	29,98%
Pendapatan Retribusi Daerah	7.593.047.533,00	8.898.181.422,00	9.323.675.310,00	10.237.262.522,00	11.267.458.193,00	10,46%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.809.443.014,00	3.284.624.905,00	4.516.252.840,00	5.940.394.702,00	8.015.299.050.51	30,22%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.059.092.337,00	9.907.792.154,94	10.387.019.541,02	7.403.582.395,35	6,219,586,502.09	-14,43%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>330.731.788.453,00</b>	<b>374.684.671.969,00</b>	<b>404.166.660.024,00</b>	<b>401.826.042.065,00</b>	<b>450.311.609.119,00</b>	<b>8,16%</b>
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	20.727.788.453,00	22.138.796.969,00	26.391.433.024,00	29.949.246.065,00	32.008.902.119,00	11,59%
Dana Alokasi Umum	277.705.000.000,00	313.887.875.000,00	329.002.227.000,00	340.862.396.000,00	377.570.807.000,00	8,05%
Dana Alokasi Khusus	32.299.000.000,00	38.658.000.000,00	48.773.000.000,00	31.014.400.000,00	40.731.900.000,00	10,19%
<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>29.654.864.493,00</b>	<b>11.166.765.342,00</b>	<b>38.055.736.529,00</b>	<b>104.197.659.425,00</b>	<b>110.802.058.288,00</b>	<b>89,65%</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kota Kupang

Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli daerah (PAD).**

Proyeksi rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 sebesar 12,19 persen, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,19 persen;
- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan ke Pemerintah Daerah;
- c. Upaya serius dari pemerintah Kota Kupang dalam menggali potensi sumber- sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

### **2. Dana Perimbangan**

Proyeksi rata – rata pertumbuhan penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 sebesar 8,16 persen dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,16 persen.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesar dalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 80,43 persen. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS. Kebutuhan fiskal Kota Kupang ditahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan

seiring dengan penambahan jumlah Penduduk Kota Kupang yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,43% per tahun.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.**

Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 89,65 persen per tahun. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Kupang harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,74 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Kupang pada Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2012	Proyeksi					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PENDAPATAN</b>	<b>689.756.760.216</b>	<b>808.403.373.874</b>	<b>856.619.389.975</b>	<b>959.548.168.020</b>	<b>1.072.370.071.161</b>	<b>1.198.486.726.440</b>	<b>11,74</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>62.104.555.364</b>	<b>71.636.739.364</b>	<b>80.369.257.892</b>	<b>90.166.270.430</b>	<b>101.157.538.795</b>	<b>113.488.642.774</b>	
Pendapatan Pajak Daerah	27.931.487.000	32.909.329.485	38.164.120.003	44.091.579.860	50.775.724.150	58.311.019.174	
Pendapatan Retribusi Daerah	16.005.575.228	17.884.629.759	19.984.285.294	22.330.440.387	24.952.034.088	27.881.402.890	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.274.801.636	10.363.663.348	11.580.357.425	12.939.891.387	14.459.034.636	16.156.525.302	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.892.691.500	10.479.116.772	10.640.495.170	10.804.358.796	10.970.745.921	11.139.695.408	
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>525.570.823.222</b>	<b>629.346.316.765</b>	<b>656.218.669.034</b>	<b>733.258.740.779</b>	<b>819.343.316.946</b>	<b>915.534.222.355</b>	
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	40.326.478.222	45.060.806.765	50.350.945.479	56.262.146.479	62.867.322.475	70.247.946.134	
Dana Alokasi Umum	453.986.555.000	527.785.630.000	541.966.359.275	604.724.151.300	674.735.861.438	752.838.185.761	
Dana Alokasi Khusus	31.257.790.000	56.499.880.000	63.901.364.280	72.272.443.000	81.740.133.033	92.448.090.460	
<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>102.081.381.630</b>	<b>107.420.317.745</b>	<b>120.031.463.049</b>	<b>136.123.156.811</b>	<b>151.869.215.420</b>	<b>169.463.861.311</b>	

Sumber: Olahan Bappeda Kota Kupang



### 3.1. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan yang kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Kupang selama 5 Tahun terakhir (2007 - 2011) dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2007 - 2011**

Jenis Belanja	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>216.012.430.656</b>	<b>295.634.160.364</b>	<b>332.273.055.229</b>	<b>368.854.272.746</b>	<b>421.224.021.047.</b>
1. Belanja Pegawai	178.174.428.068	261.077.134.864	297.900.749.002	342.761.592.746	386.748.187.645
2. Belanja Hibah	-	1.878.590.500	3.745.000.000	6.420.000.000	12.094.375.000
3. Belanja Bantuan Sosial	18.862.195.000	21.580.065.000	16.498.999.500	11.067.500.000	12.344.400.000
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab/Kota dan Pemerintah Desa	73.500.000	73.500.000	113.500.000	95.930.000	114.240.000
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provisasi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	16.102.307.588	8.524.870.000	12.109.250.000	8.009.250.000	7.251.400.000
6. Balanja Tak Terduga	2.800.000.000	2.500.000.000	1.905.556.727	500.000.000	2.671.418.402
<b>Belanja Langsung</b>	<b>176.938.850.139</b>	<b>180.432.877.935</b>	<b>214.810.307.620</b>	<b>235.285.337.373</b>	<b>224.392.659.424</b>
1. Belanja Pegawai	26.219.292.720	28.847.612.585	19.413.640.650	20.992.407.630	27.564.956.848
2. Belanja Barang dan Jasa	59.608.304.643	77.666.724.650	98.350.043.890	83.391.166.278	91.465.530.639
3. Belanja Modal	91.111.252.776	73.918.540.700	97.046.623.080	130.901.763.465	105.362.171.937
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>392.951.280.795</b>	<b>476.067.038.299</b>	<b>547.083.362.849</b>	<b>604.139.610.119</b>	<b>645.616.680.471</b>

*Sumber Data : Bag. Keuangan Seida Kota Kupang*

Dari tabel 3.4, menunjukkan bahwa selama 5 Tahun terakhir (tahun 2007 - 2011) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah

Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 46,04%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,94% dan Belanja Modal sebesar 13,41%, sedangkan Belanja Pegawai hanya 5,68%.

Dari gambaran tersebut di atas dengan trend pertumbuhan 10,69% per tahun maka untuk kebijakan anggaran belanja pada tahun 2013 – 2017 dapat diestimasi sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2012	Proyeksi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>736.059.076.804</b>	<b>817.069.164.516</b>	<b>933.695.671.971</b>	<b>1.033.922.672.764</b>	<b>1.144.912.653.132</b>	<b>1.267.821.894.517</b>
<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>514.595.038.647</b>	<b>569.605.248.279</b>	<b>630.496.049.319</b>	<b>697.896.076.991</b>	<b>772.501.167.622</b>	<b>855.081.542.441</b>
1 Belanja Pegawai	468.177.350.258	518.225.509.001	573.623.815.913	634.944.201.834	702.819.737.010	777.951.166.896
2 Belanja Hibah	31.197.348.389	34.532.344.932	38.223.852.605	42.309.982.448	46.832.919.572	51.839.358.674
3 Belanja Bantuan Sosial	6.232.100.000	6.898.311.490	7.635.740.988	8.452.001.700	9.355.520.682	10.355.625.843
4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	190.740.000	211.130.106	233.699.914	258.682.435	286.335.587	316.944.862
5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	7.447.500.000	8.243.637.750	9.124.882.625	10.100.332.578	11.180.058.131	12.375.206.345
6 Belanja Tak Teduga	1.350.000.000	1.494.315.000	1.654.057.274	1.830.875.996	2.026.596.640	2.243.239.821
<b>Belanja Langsung</b>	<b>221.464.038.157</b>	<b>247.463.916.237</b>	<b>303.199.622.652</b>	<b>336.026.595.773</b>	<b>372.411.485.510</b>	<b>412.740.352.076</b>
1 Belanja Pegawai	31.649.862.280	35.365.556.112	39.517.472.400	44.156.823.660	49.340.834.757	55.133.448.758
2 Belanja Barang dan Jasa	106.066.271.794	118.518.452.103	145.212.079.811	160.735.251.142	177.917.849.490	196.937.267.600
3 Belanja Modal	83.747.904.083	93.579.908.022	118.470.070.441	131.134.520.971	145.152.801.263	160.669.635.718

Sumber Data : Olahan Bappeda Kota Kupang

### **3.2. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan.

### **3.3. Neraca Daerah**

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

### **3.4. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.



## BAB IV

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

#### 4.1. Tinjauan Kebijakan

Rujukan kebijakan yang relevan dalam rangka analisis isu-isu strategis Kota Kupang 2013-2017 tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kota Kupang 2007-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang 2011-2031.

##### 4.1.1. Tinjauan RPJP Kota Kupang

Visi Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam RPJP Kota Kupang 2007-2025 adalah **“Kota Kupang Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing** yang diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi, peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, rasionalisasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pemukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan sarana telekomunikasi.
2. **Mewujudkan masyarakat hukum yang demokratis** yang diupayakan melalui peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam bidang eksekutif dan legislatif, penegakan supremasi hukum dan kode etik profesi fungsionaris hukum, penegakan HAM, terutama perempuan, anak dan orang tua, dan pelaksanaan secara konsisten dan konsekuen semua peraturan perundangan yang berlaku.
3. **Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang berdayaguna** melalui upaya penerapan prinsip *good governance* yang konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan penegakan kode etik profesi.
4. **Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah berketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan** melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dari kerjasama, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, toleransi dan solidaritas

dalam masyarakat majemuk, peningkatan nasionalisme, kesadaran politik, ketahanan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta peningkatan kewaspadaan, ketertiban, keamanan dan pertahanan.

5. **Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah berkeseimbangan lingkungan** melalui upaya perlindungan dan penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan dari kerusakan alamiah dan artifisial, desiminasi dan sosialisasi regulasi tentang lingkungan hidup, pengembangan dan perbaikan kawasan konservasi, dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.
6. **Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah yang aman, tertib dan berbudaya** melalui program pengelolaan ketertiban dan keamanan, dan vitalisasi penghayatan ideologi Pancasila.
7. **Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan dan pergaulan antar masyarakat** melalui peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kerjasama antar daerah.

#### **4.1.2. Tinjauan RTRW Kota Kupang**

Dalam RTRW Kota Kupang, pengembangan tata ruang Kota Kupang bertujuan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam pengelolaan pengembangan kota;
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang kota;
- c. Terwujudnya konsistensi pembangunan dengan mengacu pada kemampuan dan peruntukkan ruang;
- d. Terwujudnya fungsi dan peranan Wilayah daerah sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis kota tepi Pantai atau *Waterfront City* yang berkelanjutan;
- e. Terciptanya pola tata ruang dan pemanfaatan ruang yang serasi dan optimal di BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, BWK V, BWK VI dan BWK VII tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan;
- f. Terumuskannya strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK); dan

- g. Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Terkait dengan pengembangan tata ruang Kota Kupang, dalam RTRW Kota Kupang dipetakan isu-isu penting sebagai berikut :

- a) Pengembangan potensi pesisir dan laut belum optimal dilakukan;
- b) Orientasi pembangunan masih memperlakukan kawasan pesisir Kota Kupang sebagai bagian belakang kota, belum diperlakukan sebagai bagian depan kota;
- c) Ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau panjang, selalu menjadi masalah bagi masyarakat;
- d) Perkembangan pembangunan kawasan industri Tenau belum optimal ;
- e) Perkembangan sarana dan prasarana transportasi belum optimal;
- f) Pembangunan drainase dan sistem pembuangan air limbah kota belum optimal;
- g) Sebaran pemukiman cenderung tidak mengikuti perencanaan tata ruang kota; sehingga
- h) Sebaran penduduk tidak merata;
- i) Pembangunan ruang terbuka hijau belum optimal;
- j) Okupasi terhadap kawasan sempadan sungai dan pantai oleh kegiatan permukiman;
- k) Terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi.

Atas dasar isu-isu pengembangan tata ruang tersebut di atas, maka ditetapkan kebijakan pengembangan tata ruang Kota Kupang meliputi :

1. Kebijakan rencana struktur ruang wilayah Kota Kupang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
  - a. Peningkatan sistem pelayanan kegiatan kota yang merata dan berhierarki yang membentuk Kota Tepi Pantai atau *Waterfront City*; dan
  - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi jalan pesisir dan lainnya, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta infrastruktur perkotaan secara terpadu dan merata serta mendukung kota.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :
  - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung;
  - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan;
  - c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis.

## **4.2. Analisis Isu-Isu Strategis**

Identifikasi dan inventarisasi isu-isu strategis pembangunan Kota Kupang merujuk pada arahan-arahan kebijakan yang tertuang dalam dokumen-dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kota Kupang tahun 2007-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang tahun 2011-2031 sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Sedangkan analisis mengenai isu-isu strategis dimaksud berdasarkan pada kondisi umum Kota Kupang yang dideskripsikan pada Bab II dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal terkini dan relevan yang dipetakan melalui analisis SWOT. Sehubungan dengan itu maka isu strategis Kota Kupang 2013-2017 dijabarkan berdasarkan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut :

### **1. Ekonomi**

#### **a. Perhubungan**

Simpul-simpul yang membentuk moda transportasi Kota Kupang sudah tersedia relatif lengkap. Persoalan yang masih mengemuka di bidang ini adalah masih terjadinya tumpang tindih pelayanan transportasi kota dengan pelayanan transportasi regional serta jaringan pelayanan transportasi kota yang belum menjangkau keseluruhan wilayah kelurahan. Oleh karenanya, yang menjadi isu strategis Kota Kupang pada fungsi perhubungan adalah efisiensi sistem jaringan transportasi, ketersediaan dan pemerataan penyebaran prasarana dan fasilitas perhubungan, intensitas dan kualitas layanan angkutan serta tertib dan keamanan lalu lintas. khusus pada sub bidang perhubungan laut mengemuka isu strategis berupa kapasitas dan kualitas pelabuhan.

#### **b. Ketenagakerjaan**

Sebagai kota pusat aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan, Kota Kupang memiliki posisi terbuka terhadap arus urbanisasi dan migrasi penduduk sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan angkatan kerja dari tahun ke tahun. Kondisi ketenagakerjaan Kota Kupang dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan pola fluktuatif dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran. Hal ini mencerminkan belum stabilnya iklim kesempatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, isu strategis Kota Kupang di bidang



ketenagakerjaan adalah penciptaan lapangan kerja khususnya bagi angkatan kerja berusia muda dan produktif serta penertiban dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ketenagakerjaan demi perlindungan terhadap hak-hak dan keselamatan pencari kerja.

**c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Jumlah koperasi dan UKM di Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terbukti handal berperan sebagai penopang kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, namun belum cukup signifikan kontribusinya terhadap kinerja ekonomi makro daerah. Permasalahan utamanya adalah masih lemahnya daya saing koperasi dan UKM. Terkait dengan itu, isu-isu strategis pada entitas koperasi dan UKM mencakup profesionalisme sumber daya manusia pengelola dan kualitas manajemen koperasi serta permodalan, akses pasar, kualitas dan standarisasi produk hasil produksi UKM serta kondusifitas iklim usaha dan sistem pendukung bagi usaha menengah, kecil dan mikro.

**d. Penanaman Modal**

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Kupang meningkat tajam pada tahun 2010 dan 2011 dibanding tahun 2008 dan 2009, tetapi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) relatif fluktuatif dengan variasi kecil pada tahun 2008-2010 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2011. Penurunan cukup signifikan nilai PMDN pada tahun 2011 mengindikasikan bahwa investor dalam negeri (khususnya dari Pulau Jawa) cenderung hanya berminat menanamkan modalnya di Kota Kupang dalam durasi jangka pendek. Isu strategis yang menonjol adalah masih rendahnya daya tarik Kota Kupang bagi investor strategis dan berskala besar. Isu lain adalah intensitas dan kualitas promosi investasi.

**e. Ketahanan Pangan**

Sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan dan jasa, ketahanan pangan mayoritas masyarakat Kota Kupang relatif terjamin karena didukung oleh daya beli yang memadai. Isu penting dan strategis pada fungsi ini adalah ketahanan dan keamanan pangan keluarga-keluarga miskin.

#### **f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Relevansi fungsi pemberdayaan masyarakat desa di Kota Kupang terkait dengan keberadaan kelurahan sebagai unit basis dalam hirarki pemerintahan. Penanganan fungsi pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Kupang selama ini sudah berjalan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Isu-isu strategis yang menonjol adalah intensitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan dan penataan kelurahan.

#### **g. Pertanian**

Pangsa sektor pertanian dalam struktur perekonomian Kota Kupang relatif sangat kecil akan tetapi pada sektor ini terdapat sejumlah warga Kota Kupang yang ikut memasok bahan-bahan pokok pangan, hortikultura dan ternak yang dibutuhkan warga Kota Kupang. Oleh karenanya, warga petani dan peternak Kota Kupang memiliki hak yang sama dengan warga yang lain untuk berpartisipasi dan diberdayakan dalam pembangunan Kota Kupang. Isu strategis yang menonjol adalah stabilitas ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan serta kondisi kesejahteraan petani dan peternak.

#### **h. Kehutanan**

Pembangunan Sektor Kehutanan di Kota Kupang meliputi hutan produksi, hutan kota dan hutan pendidikan/penelitian. Upaya pemerintah dalam melestarikan hutan melalui rehabilitasi hutan rakyat dan reboisasi kawasan hutan pada lahan kritis untuk mempertahankan fungsi ekologi. Isu strategis yang menonjol adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan pemetaan kawasan hutan dengan sistem teknologi informasi.

#### **i. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Jaringan pelayanan energi listrik sudah menjangkau hampir seluruh kelurahan di Kota Kupang. Akan tetapi daftar tunggu sambungan baru yang masih saja panjang setiap tahun menegaskan bahwa ketidak-seimbangan permintaan dan pasokan energi listrik masih menjadi isu strategis Kota Kupang di bidang energi. Selain itu, meskipun

aktivitas pertambangan bahan galian C secara nyata memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun menimbulkan ancaman terhadap konservasi lingkungan alam sehingga memunculkan isu konservasi lingkungan alam. Pada level kebijakan, fungsi ini memerlukan piranti strategi bidang pertambangan dan ketenagalistrikan untuk menjadi payung jangka panjang bagi program-program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan ketenagalistrikan.

#### **j. Kelautan dan Perikanan**

Implementasi program Gemala dan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sedikit-banyak telah ikut mengembangkan bidang perikanan dan kelautan di Kota Kupang. Namun beberapa masalah berdampak strategis masih mengemuka, antara lain : kemiskinan dan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat nelayan, kerawanan kondisi ekosistem laut dan pesisir pantai, masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang budidaya perikanan dan perikanan tangkap, dukungan permodalan bagi nelayan tradisional-lokal serta rendahnya budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat. Wawasan dan kesadaran hukum pendayaguna sumber daya laut juga perlu diperlakukan sebagai isu penting di sektor ini.

#### **k. Perdagangan**

Kinerja sektor perdagangan terus meningkatkan dari tahun ke tahun dan bersama sektor jasa mengambil pangsa dominan dalam struktur perekonomian Kota Kupang. Isu strategis pada sektor ini adalah keterbatasan daya saing pelaku usaha perdagangan level menengah, kecil dan mikro tradisional lokal dalam menghadapi perkembangan usaha perdagangan berskala besar dan modern khususnya perdagangan ritail yang merambah hingga ke wilayah kecamatan dan potensial hingga ke wilayah kelurahan. Isu-isu lain mencakup perlindungan konsumen, efisiensi tata niaga/perdagangan dan keamanan perdagangan.

#### **l. Industri**

Sektor industri berkembang lambat dan kecil perannya dalam perekonomian Kota Kupang. Padahal kinerja sektor ini sangat menentukan kualitas dan kesehatan struktur perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, isu strategis terkait dengan hal ini ialah

pengembangan industri kecil, menengah dan mikro serta ketersediaan regulasi, infrastruktur dan iklim usaha bagi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

## **2. Pendidikan**

### **a. Pendidikan**

Dalam banyak indikator, Kota Kupang telah memperlihatkan keberhasilan pada aspek pengelolaan pendidikan, kecuali untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) level SMA/SMK/MA/Paket C yang masih perlu ditingkatkan capaiannya di masa mendatang. Kenyataan masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah level SMA/SMK/MA/Paket C mengindikasikan adanya sejumlah tamatan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Fakta ini sepatutnya menjadi salah satu isu strategis Kota Kupang di bidang pendidikan. Isu strategis lain di bidang ini ialah mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik serta pemerataan yang rasional dalam hal penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas kurikulum dan relevansi muatan kurikulum lokal, pemenuhan standar nasional kelulusan peserta didik pada semua tingkatan pendidikan formal, manajemen pendidikan serta vitalisasi dan relevansi unsur *life skill* dalam kurikulum pendidikan non formal.

### **b. Pemuda dan Olah Raga**

Perhatian terhadap fungsi kepemudaan dan olah raga relatif masih terbatas. Sejumlah kecil prasarana olah raga masih rendah kualitasnya dan belum terpelihara dengan baik. Jumlah organisasi olah raga cukup banyak, tetapi event-event olah raga belum banyak diselenggarakan. Dari fakta-fakta ini dapat dicatat isu-isu penting pada fungsi kepemudaan dan olah raga yaitu pembinaan kepemudaan, wawasan kebangsaan pemuda, infrastruktur olah raga, wawasan dan budaya olah raga masyarakat.

### **c. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Isu yang menonjol adalah minat baca masyarakat yang masih relatif rendah, sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai.

### **3. Kesehatan**

#### **a. Kesehatan**

Kinerja pengelolaan kesehatan Kota Kupang terus mengalami perubahan positif dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup terus meningkat, angka kematian bayi dan gizi buruk terus menurun. Hanya saja, rasio infrastruktur kesehatan dan para medis masih cukup timpang. Inilah isu strategis utama di bidang kesehatan. Jumlah para medis serta kuantitas dan kualitas Puskesmas/Posyandu dan Rumah sakit perlu ditingkatkan. Demikian pula pemerataan penyebarannya, harus menjadi bagian dari peta detail pada isu strategis di bidang kesehatan guna memperkecil rasio-rasionya di level pedesaan/kelurahan. Isu-isu lain meliputi kualitas gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, standar pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya kesehatan.

#### **b. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Mengikuti isu pada tingkat nasional, isu strategis di Kota Kupang pada sub fungsi keluarga berencana adalah revitalisasi program keluarga berencana yang di masa lalu sukses dengan paradigma “Dua Anak Lebih Baik”. Upaya revitalisasi ini penting guna meningkatkan energi internal Kota Kupang dalam hal pengendalian penduduk. Pada sub fungsi keluarga sejahtera kiranya perlu penguatan peran organisasi PKK secara lebih fungsional ketimbang formal, khususnya dalam hal penguatan ekonomi riil rumah tangga miskin.

### **4. Pelayanan Umum**

Selain sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, aparaturnya pemerintah mengemban tugas pokok pelayanan publik. Pada Bab II yang memuat gambaran umum Kota Kupang tercatat data yang memperlihatkan kinerja pelayanan publik yang meliputi pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, HO, akte kelahiran/perkawinan/perceraian/kematian, pengakuan dan pengesahan anak, kartu penduduk dan ijin usaha. Untuk masa mendatang dinamika kependudukan, sosial-budaya dan ekonomi Kota Kupang menuntut aparaturnya pemerintah terus meningkatkan kinerja pelayanan publik. Isu yang terkait dengan tuntutan tersebut tersimpul pada persoalan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dari implementasi keseluruhan program pelayanan publik. Isu-isu turunannya meliputi ketersediaan infrastruktur pendukung pelayanan publik, kualitas dan

produktivitas sumber daya aparatur pelayanan publik serta ketersediaan sumber daya keuangan.

#### **a. Perencanaan Pembangunan**

Fungsi perencanaan pembangunan selama ini dikelola oleh aparatur yang memiliki kurva belajar dan pengalaman yang teruji. Metodologi baku yang berlaku secara nasional dan sumber daya manusia yang memiliki basis pengetahuan dan pengalaman memadai telah menjamin terciptanya produk perencanaan pembangunan yang baik. Namun kualitas perencanaan pembangunan ikut ditentukan pula oleh ketersediaan basis data yang lengkap, akurat dan termutakhirkan secara berkala. Selain itu, sistem informasi perencanaan pembangunan dan aksesibilitas segenap pemangku kepentingan terhadapnya diperlukan juga sebagai sarana umpan-balik dalam rangka evaluasi berkala terhadap perencanaan pembangunan. Perpanjangan waktu pada fungsi ini ialah pentingnya *benchmarking* dan kerjasama dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

#### **b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

##### **• Otonomi Daerah**

Isu-isu yang mengemuka adalah peluang dan fisibilitas pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan. Dalam perspektif lebih luas, mengemuka isu yang terkait dengan persoalan penerahan energi potensial dan kapasitas daerah dalam rangka memperbesar pangsa kemampuan internal daerah dalam struktur pendapatan daerah. Isu-isu lain yang juga strategis ialah kebutuhan akan kerangka terpadu bagi penjaminan akuntabilitas portofolio dari implementasi desentralisasi fiskal serta kebutuhan strategi induk dalam rangka penguatan daya saing daerah dan pelayanan publik.

##### **• Pemerintahan Umum**

Isu-isu yang mengemuka adalah disiplin aparatur, kualitas pengawasan internal, ketersediaan sistem informasi pemerintahan umum dan aksesibilitas publik

terhadapnya, baku sistem administrasi, kearsipan dan pelaporan sebagai penopang manajemen pemerintahan umum serta standar pelayanan minimum dan standar prosedur operasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

- **Administrasi Keuangan Daerah**

Isu yang menonjol adalah sistem administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi, kearsipan, aksesibilitas publik terhadap pelaporan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penjaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan basis data.

- **Perangkat Daerah**

Isu yang menonjol adalah rasionalisasi dan konsolidasi perangkat daerah dan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka efektifitas rentang kendali, koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal.

- **Kepegawaian dan Persandian**

Isu yang menonjol adalah kualitas dan kemutakhiran sistem administrasi kepegawaian, basis data kepegawaian, kualitas dan kemutakhiran sistem persandian, aksesibilitas publik terhadap basis data kepegawaian, sarana dan prasarana aparatur serta pendidikan kedinasan.

**c. Statistik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Isu yang menonjol adalah belum optimalnya sumberdaya manusia dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.

**d. Kearsipan**

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi yang strategis bagi perkembangan daerah dalam rangka menangani arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Isu yang menonjol adalah belum memadainya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kearsipan.

#### **e. Komunikasi dan Informasi**

Pada sub fungsi informasi dan komunikasi mengemuka isu penataan dan pemerataan penyebaran sarana dan prasarana komunikasi, sistem informasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta aksesibilitas masyarakat.

### **5. Perumahan dan Fasilitas Umum**

Pekerjaan umum sudah berjalan dengan kecenderungan yang meningkat, akan tetapi dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Kupang mengharuskan untuk terus berkinerja optimal. Sejalan dinamika dimaksud, isu-isu yang menonjol adalah pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan saluran drainase, fisibilitas dan ketersediaan infrastruktur sumber air baku, infrastruktur irigasi, infrastruktur penunjang pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta sarana jaringan distribusi sambungan induk dan sambungan rumah tangga.

Isu-isu strategis yang menonjol adalah kualitas kesehatan perumahan, penyediaan perumahan dan prasarana umum perumahan bagi anggota masyarakat dan kualitas keberdayaan komunitas perumahan.

### **6. Lingkungan Hidup**

#### **a. Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang sebagai matra dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang guna menjamin konsistensi pemanfaatan ruang dengan cetak biru penataan ruang pada RTRW Kota Kupang 2011-2031. Hal ini terkait dengan kebutuhan riil akan pengembangan ruang publik dan ruang terbuka hijau sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat serta kebutuhan review tata ruang permukiman demi modernisasi tampilan fisik Kota Kupang.

#### **b. Lingkungan Hidup**

Perkembangan pemukiman sebagai dampak dari penambahan penduduk dan dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan gangguan pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup Kota Kupang. Isu strategis yang menonjol adalah persoalan persampahan dan limbah,



pencemaran dan perusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, kualitas sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kemudahan bagi publik untuk mengaksesnya, kebakaran hutan/padang, penataan ruang publik, penatan ruang terbuka hijau, dan hutan kota serta mitigasi dan penanggulangan bencana.

### **c. Pertanahan**

Akselerasi pembangunan di Kota Kupang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Fakta ini memunculkan isu yang menonjol adalah sertifikasi tanah rakyat untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan, penyediaan sistem informasi pertanahan yang mudah diakses oleh publik, kejelasan perlakuan terhadap tanah ulayat/suku, percepatan penyelesaian tuntas konflik-konflik agraria dan pemutakhiran berkala peta penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sosialisasi undang-undang pertanahan. Untuk menjamin kinerja penanganan isu-isu tersebut, bidang pertanahan membutuhkan piranti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) guna mengoptimalkan kinerja pelayanan pertanahan.

## **7. Ketertiban dan Ketentraman**

### **• Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Penanganan keamanan dan ketertiban cukup mendapat perhatian pemerintah Kota Kupang sebagaimana ditunjukkan oleh data unjuk rasa yang relatif rendah, keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta toleransi inter dan antar umat beragama yang semakin kondusif, dan penegakan supremasi Hukum yang semakin baik. Isu strategis yang menonjol adalah wawasan dan kesadaran sosial masyarakat, revitalisasi institusi keamanan swakarsa masyarakat, profesionalisme kelembagaan dan personil polisi pamong praja, partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pemberantasan penyakit masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, penataan sistem hukum dan peraturan perundangan daerah, sosialisasi peraturan perundangan daerah, konsisten dalam implementasi peraturan perundangan daerah dan kerjasama dalam rangka penataan sistem hukum dan peraturan perundangan daerah.

## **8. Pariwisata dan Budaya**

### **a. Pariwisata**

Pembangunan sektor pariwisata Kota Kupang meliputi aspek-aspek obyek wisata serta sarana dan prasarana pendukung. Data menunjukkan jumlah obyek wisata baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya yang tersebar diberbagai sudut kota membutuhkan perhatian pemerintah dalam rangka pelestarian objek wisata tersebut. Khusus mengenai perhotelan di Kota Kupang baik hotel melati dan hotel berbintang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk wisatawan baik manca negara dan domestik menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun. Isu yang menonjol adalah kualitas dan intensitas promosi pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan kemitraan pariwisata serta sistem informasi kepariwisataan.

### **b. Kebudayaan**

Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya di Kota Kupang menunjukan perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya organisasi/sanggar kesenian dari berbagai etnis yang ada. Isu strategis yang menonjol adalah : penyelenggaraan event-event seni budaya masih relatif terbatas, ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan event-event seni budaya, serta promosi budaya.

## **9. Perlindungan Sosial**

### **a. Sosial**

Salah satu tujuan pembangunan dibidang sosial adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu mendapat pelayanan yang optimal. Isu yang menonjol adalah jumlah rumah tangga miskin menurun dan garis kemiskinan meningkat, jumlah fasilitas sosial terus meningkat, belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti gelandangan, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar, fakir miskin, lansia, penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS serta korban bencana.

### **b. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Kupang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat Kota Kupang sebagai pusat

kegiatan pemerintah, pendidikan dan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini didukung dengan trend pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun, namun pada sisi yang lain luas wilayah Kota Kupang tidak mengalami penambahan. Isu strategisnya yang menonjol adalah laju pertumbuhan penduduk melalui mortalitas, fertilitas dan migrasi. Sistem informasi kependudukan (SIK) yang mudah diakses oleh publik, pencatatan sipil yang dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat yang efisien dan efektif, serta sistem kearsipan data pencatatan sipil.

**c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Kupang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan dan anak. Isu strategis yang menonjol adalah kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelembagaan pengarus-utamaan gender dan anak, kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, bahaya narkoba, PMS dan HIV/AIDS.



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Disadari sepenuhnya walaupun pembangunan di Kota Kupang sudah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, namun dalam menghadapi perubahan dinamika pembangunan global yang begitu cepat, sehingga diperlukan antisipasi agar Kota Kupang mampu tumbuh dan berkembang menjadi kota modern. Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJPD Kota Kupang untuk periode pembangunan 2007-2025, telah dipilih pendekatan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan komitmen bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Kupang

Langkah konkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “*Panca Program*” berikut : Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Peningkatan Pelayanan Publik dan Supremasi Hukum, Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota, Peningkatan kesejahteraan sosial serta kesetaraan dan keadilan gender. Melalui Panca Program tersebut, merupakan langkah konkrit untuk menjadikan **Kupang Kota KASIH** (Karya, Aman, Sehat, Indah dan Harmonis)

Rumusan motto tersebut kemudian dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut :

#### **5.1. VISI**

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN,  
PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Berbudaya, Kota Modern, Kota Produktif, dan Kota Nyaman yang Berkelanjutan.

**Kota Berbudaya**, mengandung arti Kota yang bersih dengan didukung oleh warga yang memiliki pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan karya termasuk segala instrumen, sistem kerja, dan bahasa yang digunakan serta menampilkan citra sebagai rumah hunian bagi semua orang dari berbagai etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

**Kota Modern**, mengandung arti sebagai Kota yang berada pada gerbang selatan dan berhadapan dengan wilayah Asia Pasifik, haruslah menampilkan diri sebagai kota yang tertata dan memiliki infrastruktur dengan standar internasional.

**Kota Produktif**, mengandung arti sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki produktivitas tinggi dalam segala aspek kehidupannya.

**Kota Nyaman**, mengandung arti sebagai kota yang tertata dan terkendali, sehingga kondusif bagi terciptanya suatu kondisi tata ruang yang mampu mengakomodir aktivitas dan interaksi antar warga kota.

## 5.2. MISI ;

### 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Perekonomian Daerah yang didukung dengan Penguatan Modal Usaha bagi pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat berbasis pada Potensi unggulan daerah.

### 2. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas

Pembangunan diarahkan pada peningkatan Kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta berbudaya.

### 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum,

Pembangunan diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

#### **4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan**

Pembangunan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### **5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender, perlindungan anak serta mitigasi bencana.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **5.3.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya persentase koperasi aktif 90 %
  - b. Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55 %
  - c. Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10 % per tahun
  - d. Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 20 %
  
2. Mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi unggulan daerah, mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang
  - b. Meningkatnya kerjasama pengelolaan aset dengan investor

3. Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran difokuskan pada meningkatnya ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha tani, peningkatan kapasitas usaha dan penguatan kelembagaan kelompok.
  - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi peternakan.
  - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan.
  - d. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 250 Ha
5. Meningkatkan SDM penyuluh, Pelaku Usaha ketahanan pangan dan penyuluhan yang Produktif dan Berkelanjutan dengan sasaran yang difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten moderen, produktif dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
6. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang produktif ,modern melalui penciptaan iklim usaha yang nyaman yang berkelanjutan dengan sasaran difokuskan pada fasilitasi pendanaan yang berpihak pada agribisnis untuk peningkatan hasil produksi dibidang Ketahanan Pangan.
7. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi dan merata dengan sasaran difokuskan pada terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam diversifikasi Pangan dan teknologi pendukung agribisnis.
8. Meningkatkan ketahanan pangan, kewaspadaan pangan dan panganekaragaman pangan secara produktif dan berkelanjutan dengan sasaran difokuskan pada meningkatnya ketersediaan pangan dan pola panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
9. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Kupang rata-rata sebesar 5 % per tahun



- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya
10. Mengembangkan produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada system agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
    - a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan Petani perikanan.
    - b. Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan.
    - c. Meningkatnya persentase produksi budidaya perikanan rata-rata 15 % per tahun
    - d. Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap rata-rata 5 % per tahun
    - e. Meningkatnya persentase produksi perikanan olahan sebesar 3% per tahun
    - f. Meningkatnya Konsumsi makanan dari ikan
  11. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
    - a. Meningkatnya pasar tradisional yang bersih dan nyaman.
    - b. Meningkatnya persentase struktur industri berbasis pada pendekatan kluster.
    - c. Meningkatnya kualitas kemasan produk sektor perindustrian.

### **5.3.2. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas**

1. Pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang professional serta peningkatan tata kelola yang baik dengan sasaran pembangunan difokuskan pada:
  - a. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan;
  - b. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;
  - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
2. Pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung sarana prasarana serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi 0 kasus
  - b. Persentase Angka Balita Gizi Buruk  $\leq 1$  %
  - c. Usia Harapan Hidup mencapai 73,06 tahun;

3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi serta penanggulangan HIV/AIDS dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan *Total Fertility Rate* dibawah 3 %;
  - b. Peningkatan jumlah akseptor KB
  - c. Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS.
4. Fasilitas pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Menekan angka pengangguran
  - b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
  - c. Meningkatnya perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
5. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat dengan sasaran difokuskan pada:
  - a. Meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah dan benda cagar budaya;
  - b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal;
6. Pembinaan dan Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya peran serta aktif generasi muda dalam pembangunan
  - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
  - c. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat
  - d. Meningkatnya prestasi olahraga

7. Pengembangan pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan perpustakaan berbasis IT dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Meningkatkan minat baca masyarakat
  - b. Meningkatnya pelestarian dan koleksi bahan pustaka
  - c. Tersedianya perpustakaan Kota Kupang berbasis IT

### **5.3.3. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum**

1. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat
  - b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada
  - c. Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - d. Meningkatnya toleransi kerukunan hidup beragama
2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang didukung penerapan *e-government* menuju *e-city*, dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya kualitas informasi pemerintahan melalui *electronic government* di lingkungan Pemerintahan Kota Kupang
  - b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana
  - c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat, dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Optimalisasi pengelolaan asset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data asset yang akurat
  - c. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang professional, bersih, beretika dan berwibawa serta anti KKN dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang

didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta sistem informasi manajemen yang transparan, dengan sasaran difokuskan pada :

- a. Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, berwibawa serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel
  - b. Meningkatnya sistem pengawasan internal, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
  - c. Peningkatan hubungan kerjasama antara swasta, pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
  - d. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - e. Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan pemerintah
  - f. Meningkatnya kinerja lembaga/aparatur
  - g. Meningkatnya kualitas pembangunan
5. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran difokuskan pada :
- a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
  - b. Meningkatnya standar mutu pelayanan
  - c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  - d. Terwujudnya pengelolaan tertib administrasi kependudukan
6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai, dengan sasaran difokuskan pada :
- a. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - b. Meningkatnya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya
  - c. Meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas)

7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif, dengan sasaran yang difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
  - b. Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan media massa
  - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

#### **5.3.4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan**

1. Peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang konsisten sesuai rencana tata ruang wilayah, dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW/RDTR
  - b. Meningkatnya penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya
2. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Pengembangan kelengkapan jalan (*street furniture*) dengan sasaran yang difokuskan pada :
  - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana estetika kota
  - c. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase, dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Menurunnya luasan genangan air dijalan umum
  - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase
4. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, dan Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada:
  - a. Terpenuhinya sarana dan prasarana air baku

- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana air irigasi
  - c. Meningkatnya Debit Air Permukaan dan Meninggikan Muka Air Tanah
  - d. Terpenuhinya Sarana & Prasarana Pengendalian Daya Rusak air
5. Meningkatkan pengendalian, pengawasan usaha pertambangan dan energi, LPJU, energi non migas baru dan terbarukan, penertiban dan pengelolaan air bawah tanah, dengan sasaran difokuskan pada:
    - a. Meningkatnya fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan
    - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya terhadap pengelolaan LPJU
    - c. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bahan bakar minyak dan gas
    - d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral
  6. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
    - a. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR
    - b. Meningkatnya pemerataan perumahan di kawasan kumuh
    - c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
  7. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi, dengan sasaran difokuskan pada :
    - a. Meningkatnya prasarana dan fasilitas di sektor perhubungan
    - b. Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
    - c. Meningkatnya pelayanan angkutan di sektor darat, laut dan udara
    - d. Meningkatnya keselamatan dalam berlalu lintas
    - e. Meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan
  8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
    - a. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
    - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair
  9. Meningkatkan penataan lahan kritis lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan

pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :

- a. Meningkatnya pengelolaan dan penataan lahan kritis
- b. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan
- c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL
- d. Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau dan perkantoran

### **5.3.5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

1. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif dan sinergis, guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin, dan Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, penyandang HIV-AIDS. dengan sasaran difokuskan pada:
  - a. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
  - b. Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS
  - c. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS
2. Pembangunan dan pengembangan perumahan bagi masyarakat miskin dengan sasaran difokuskan pada meningkatnya kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat miskin.
3. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi peningkatan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja, dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, dengan sasaran difokuskan pada :
  - a. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - b. Peningkatan Gender Development Indeks (GDI)
  - c. Mewujudkan Kota Layak Anak

4. Peningkatan dan pengembangan manajemen mitigasi bencana difokuskan pada:
  - a. Meningkatnya penanganan korban bencana alam,
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
5. Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran difokuskan pada:
  - a. Menurunnya penduduk miskin
  - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat
  - c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi pembangunan daerah Kota Kupang merupakan instrumen kebijakan yang diperlukan sebagai rujukan dalam perumusan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bagi terwujudnya visi dan misi Kota Kupang.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal Kota Kupang yang relevan, relatif dominan dan strategis agar program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai kondisi obyektif.

#### **Faktor-faktor lingkungan internal Kota Kupang yang dominan sebagai berikut :**

1. Heterogenitas etnik.
2. Dominasi sektor jasa dalam perekonomian.
3. Ketersediaan infrastruktur fisik
4. Ketersediaan infrastruktur sosial-ekonomi
5. Ketersediaan infrastruktur pelayanan publik
6. Ketersediaan infrastruktur pemerintahan
7. Kualitas sumber daya manusia.
8. Mobilitas ekonomi dan sosial-budaya masyarakat
9. Aksesibilitas masyarakat ke berbagai sumber informasi sosial-ekonomi
10. Perkembangan lembaga-lembaga sosial-ekonomi swasta
11. Kondusivitas ketertiban dan keamanan
12. Ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
13. Daya tarik sebagai ibukota provinsi
14. Keberagaman institusi dan jenis pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan
15. Kesadaran hukum dan politik masyarakat

#### **Faktor-faktor eksternal Kota Kupang yang dominan sebagai berikut :**

1. Globalisasi ragam-dimensi
2. Prospek ekonomi kawasan Asia-Pasifik
3. Pasar bebas

4. Regulasi pemerintah pusat
5. Desentralisasi fiskal
6. Internasionalisasi isu lingkungan dan gender
7. Perhatian khusus pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tertinggal
8. Dinamika minat wisata masyarakat Indonesia dan manca negara
9. Dinamika prilaku dan tata nilai masyarakat Indonesia dan manca negara
10. Kerjasama antar daerah
11. Kemajuan transportasi lintas daerah
12. Perkembangan mobilitas masyarakat Indonesia dan manca negara

Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal tersebut di atas, strategi pembangunan sebagai salah satu bagian penting dan strategis dari keseluruhan upaya mewujudkan visi dan misi Kota Kupang dipetakan sebagai berikut :

## **6.1. Strategi Dan Arah Kebijakan**

### **6.1.1.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Pengembangan kelembagaan koperasi, dengan arah kebijakan melalui penerapan manajemen modern pada koperasi dan penyehatan koperasi;
2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan meliputi:
  - Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM;
  - Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin;
  - Pendampingan usaha produktif koperasi.
3. Peningkatan perekonomian daerah dengan arah kebijakan meliputi :
  - Penciptaan iklim investasi;
  - Pengembangan Potensi unggulan daerah;
  - Pengembangan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
  - Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya saing;
  - Fasilitasi kerjasama dan promosi antar pelaku usaha;
  - Pengembangan sistem informasi penanaman modal.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan sistem agribisnis. Arah kebijakan meliputi:
  - Pengembangan dan penerapan teknologi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
  - Pengembangan sarana prasarana produksi produk pertanian, peternakan; perkebunan dan kehutanan;
  - Fasilitasi bantuan dan akses kredit permodalan bagi petani dan peternak;
  - Pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan dan konservasi lingkungan;
  - Pengembangan hasil hutan tanaman dan non kayu.
5. Pengembangan ketahanan, kemandirian, mutu dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan meliputi:
  - Penguatan SDM dan manajemen kelompok tani agribisnis;
  - Pengembangan sistem pertanian agropolitan;
  - Pengembangan kelurahan mandiri pangan;
  - Fasilitasi dan proteksi kepada masyarakat miskin;
  - Peningkatan akses pangan masyarakat miskin.
6. Pengembangan penganekaragaman pangan dengan arah kebijakan meliputi:
  - Peningkatan konsumsi bahan pangan yang seimbang;
  - Pengembangan makanan non beras.
7. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pelaku usaha industri pariwisata;
  - Pengembangan sarana prasarana, obyek dan event-event pariwisata;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok;
  - Peningkatan akses permodalan bagi nelayan.
9. Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan Produksi Perikanan Hasil Tangkap;
  - Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar;
  - Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

10. Pengembangan pasar tradisional dan modern, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada :
  - Revitalisasi pasar-pasar tradisional dan modern;
  - Penataan PKL secara humanis dan beradab.
11. Pengembangan produk industri unggulan, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kluster;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi.

#### **6.1.2. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Kupang.**

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang berkualitas meliputi :

1. Peningkatan kualitas layanan dan akses pendidikan, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS);
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
  - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
  - Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar);
2. Peningkatan jangkauan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya termasuk obat dan perbekalan untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan;
  - Pengembangan sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan;
  - Peningkatan Jaminan Kesehatan seluruh masyarakat;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
3. Pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya penyakit dan kejadian luar biasa, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan paradigma hidup sehat;
  - Pengembangan sistem surveillance;
  - Fasilitasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  - Pengembangan posyandu anak dan lansia.
4. Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana (KB), dengan arah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan KB .

5. Peningkatan cakupan pelayanan KB yang berkualitas, dengan arah kebijakan fasilitasi kegiatan promotif dan kaderisasi KB.
6. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan;
  - Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh.
7. Peningkatan penempatan tenaga kerja, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.
8. Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
  - Fasilitasi pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  - Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda.
9. Pemasyarakatan olahraga, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat;
  - Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga.
10. Pembinaan atlet dan pelaku olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada:
  - Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga;
  - Fasilitasi pengkaderan atlet;
  - Fasilitasi kelompok dan atlet berprestasi.
11. Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal;
  - Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan;
12. Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya dengan arah kebijakan meliputi :
  - Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.
13. Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan sikap toleransi inter dan antar pemeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan.

14. Pengembangan budaya baca masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan sarana prasarana serta manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

### **6.1.3. Peningkatan pelayanan publik dan supremasi hukum**

Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum meliputi :

1. Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
  - Fasilitasi penguatan kelembagaan demokrasi.
2. Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman, dengan arah kebijakan meliputi Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta fasilitasi keamanan dan ketertiban.
3. Pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif;
  - Penguatan komunikasi politik.
4. Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen teknologi informatika, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
  - Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi.
5. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Peningkatan kualitas perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, *top down – bottom up*.
  - Fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur.
  - Pengembangan keterbukaan informasi perencanaan;
  - Pengembangan data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi;
  - Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk perencanaan.

7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan yang sah, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - Fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - Peningkatan pengelolaan manajemen keuangan dan aset daerah
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan *e-government* menuju *e-city*, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan
  - Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Peningkatan pelayanan publik;
  - Pembentukan unit layanan pengadaan barang dan jasa
  - Pengembangan *e-procurement*.
9. Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan sistem informasi kepegawaian terpadu;
  - Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - Penerapan prinsip *reward and punishment*;
  - Pengembangan Jabatan Fungsional.
10. Peningkatan kemampuan dan kapasitas Aparatur, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
  - Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan.
11. Peningkatan dan Penguatan otonomi daerah, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi kebijakan penguatan otonomi daerah;
  - Peningkatan kerjasama daerah, nasional dan internasional,
  - Fasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak ke III.
  - Fasilitasi pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)*
  - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan,
12. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan prima, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengembangan SOP dan SPM;

- Pengembangan standar pelayanan ISO;
  - Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik;
  - Pengembangan SIM pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
13. Pengembangan data dan informasi, dengan arah kebijakan meliputi :
- Pengembangan data dan informasi terintegrasi.
  - Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
  - Fasilitasi manajemen pengelolaan arsip menuju pengelolaan berbasis teknologi informasi.
14. Pengembangan pengamanan swakarsa, dengan arah kebijakan meliputi :
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset negara/daerah;
  - Pengembangan partisipasi perlindungan masyarakat;
  - Penguatan kelembagaan dan SDM Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
15. Peningkatan budaya disiplin, tertib dan aman, dengan arah kebijakan meliputi :
- Operasi penegakan hukum dan peraturan
  - Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban;
16. Peningkatan pranata kebijakan keterbukaan informasi publik, dengan arah kebijakan pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi publik;
17. Peningkatan kemitraan dengan media massa maupun elektronik, dengan arah kebijakan pengembangan pola hubungan kemitraan konstruktif antara pemerintah, masyarakat dan pers.

#### **6.1.4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan perkotaan**

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, meliputi :

1. Peningkatan aksesibilitas dan pengurangan kemacetan lalu lintas, dengan arah kebijakan, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan jalan dan jembatan;
2. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase , pengendalian banjir, sistem air baku dengan arah kebijakan meliputi :
  - Normalisasi saluran drainase perkotaan;



- Pengembangan sistem polder dan embung;
  - Fasilitasi dan pengembangan tanggul;
3. Optimalisasi sumber-sumber air baku, dengan arah kebijakan meliputi :
- Pengembangan sumber-sumber air baku yang baru;
  - Fasilitasi dan bantuan pemeliharaan sumber air milik masyarakat;
  - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan air antar wilayah;
  - Penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air.
4. Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan rancang kota, dengan arah kebijakan meliputi :
- Penyusunan dan sinkronisasi peraturan zonasi
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan;
5. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area, dengan arah kebijakan meliputi :
- Penyusunan pranata kebijakan Ruang Tata Hijau (RTH) secara konsisten;
  - Perwujudan gerakan “Kupang Green and Clean” dan “one man one tree”;
  - Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas Ruang Tata Hijau (RTH);
  - Pengembangan hutan dan taman kota.
6. Pencegahan dan pengendalian dampak kerusakakan lingkungan, dengan arah kebijakan meliputi :
- Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan;
  - Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis;
  - Penyusunan pranata pengendalian dampak kerusakan lingkungan;
  - Pengendalian eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang;
  - Penataan dan konservasi kawasan pantai.
  - Pengendalian reklamasi pantai
7. Pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dengan arah kebijakan meliputi :
- Pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim;
  - Fasilitasi dan penguatan jejaring dan kelembagaan untuk antisipasi perubahan iklim;

8. Pengembangan dan peningkatan manajemen pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
  - Pemenuhan sarana prasarana persampahan;
  - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan TPA bersama antara daerah dan pihak ke 3 (tiga)
  - Pengurangan volume sampah yang masuk TPA Alak.
  - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
9. Peningkatan sarana prasarana pada lokasi strategis dan cepat tumbuh, dengan arah kebijakan meliputi penyusunan rencana pengembangan dan pengendalian wilayah strategis dan cepat tumbuh.
10. Revitalisasi bangunan cagar budaya, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Perencanaan kawasan bangunan bernilai budaya;
  - Perlindungan kawasan dan bangunan cagar budaya.
11. Peningkatan, pengembangan dan pengelolaan manajemen transportasi, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamanan angkutan masal;
  - Penyempurnaan trayek angkutan masal;
  - Pengembangan dan optimalisasi terminal;
  - Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang;
  - Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi.
  - Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi.
12. Pengembangan manajemen pola perpajakan, dengan arah kebijakan meliputi:
  - Peningkatan tertib perpajakan;
  - Pengembangan pranata kebijakan perpajakan.
13. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;

- Pengendalian kelayakan angkutan;
  - Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung.
14. Pembangunan “Wajah Kota”, dengan arah kebijakan meliputi :
- Peningkatan estetika kota kawasan pesisir pantai (*waterfront city*);
  - Penandaan batas kota;
  - Peremajaan kawasan;
  - Pembangunan dan revitalisasi taman kota.
15. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, dengan arah kebijakan meliputi :
- Fasilitasi dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin;
  - Perbaikan lingkungan dan permukiman kumuh;
  - Pemberdayaan kelembagaan komunitas perumahan;
  - Fasilitasi rumah murah.
16. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dengan arah kebijakan meliputi :
- Pengembangan manajemen pengelola TPU milik pemerintah kota;
  - Fasilitasi TPU masyarakat;
  - Fasilitasi dan pembangunan TPU baru;

#### **6.1.5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera meliputi :

1. Pengarustamaan gender dan perlindungan anak, dengan arah kebijakan meliputi :
  - Penguatan kelembagaan pengarutamaan gender dan anak;
  - Advokasi dan fasilitasi Pengarustamaan Gender bagi perempuan;
  - Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan;
  - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - Fasilitasi dan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan, dengan arah kebijakan meliputi :

- Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak;
  - Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak;
  - Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan.
3. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus, dengan arah kebijakan meliputi :
- Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - Fasilitasi anak terlantar, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus;
  - Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan panti dan non panti;
  - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV Aids;
  - Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga peduli permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya.
  - Pengembangan rasa kesetiakawanan sosial.
4. Peningkatan manajemen mitigasi bencana, dengan arah kebijakan meliputi :
- Pencegahan dini bencana;
  - Penanganan korban bencana;
  - Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
  - Pengembangan manajemen bencana berbasis masyarakat

## **6.2 Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Kupang 2013-2017 sebagai berikut:

### **6.2.1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran**

Adapun sasaran pembangunan tahun 2013-2017 diletakkan pada :

- a. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)
- b. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- c. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri

- d. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berusaha secara baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai
- e. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota Kupang.
- f. Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional.

#### **6.2.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan para medis;
- d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan;

#### **6.2.3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supermasi Hukum**

- a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab;
- d. Terbukanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota;
- e. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standard pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital.
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis;
- g. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas.
- h. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia;

- i. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat.

#### **6.2.4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota**

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan;
- c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi manajemen pengelolaan air bersih dan drainase, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan pengelolaan persampahan;
- d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

#### **6.2.5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Serta Kesetaraan Dan Keadilan Gender**

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga.
- b. Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin (RTM).
- c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- d. Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung secara langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

#### **7.1 . Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**

##### **7.1.1. Urusan Koperasi dan UKM**

Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui 1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), 2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan 3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM.

Program-program pembangunan pada Urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

##### **7.1.2. Urusan Penanaman Modal**

Kebijakan pada urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

Program-program pembangunan pada Urusan penanaman modal yang dilaksanakan

adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah

### **7.1.3. Urusan Ketahanan Pangan**

Kebijakan pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui 1) penganeekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan.

Program-program pembangunan pada urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

### **7.1.4. Urusan Pertanian**

Kebijakan pada urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui 1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; 2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; 3) pengembangan sumber daya pertanian

Program-program pembangunan pada urusan pertanian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan)
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



### **7.1.5. Urusan Kehutanan**

Kebijakan pada urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui 1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumber daya alam/hutan; 2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan. Program pembangunan pada urusan kehutanan yang dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

### **7.1.6. Urusan Kepariwisata**

Kebijakan pada urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Kupang sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

Program-program pembangunan pada urusan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata

### **7.1.7. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui 1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; 2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

Program-program pembangunan pada Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

#### **7.1.8. Urusan Perdagangan**

Kebijakan pada urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui 1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; 2) pengembangan potensi produk unggulan daerah; 3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.

Program-program pembangunan pada Urusan perdagangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

#### **7.1.9. Urusan Perindustrian**

Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnya industri kecil / home industri yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui 1) inovasi city branding 2) pembinaan industri kecil /home industri, 3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industri; 4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri; 5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industri.

Program-program pembangunan pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Penataan Struktur Industri
4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

## **7.2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas.**

### **7.2.1. Urusan Pendidikan**

Kebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pendidikan baik formal maupun non formal, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Program-program pembangunan pada urusan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

### **7.2.2. Urusan Kesehatan**

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan; yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (*total/universal coverage*). Program-program pembangunan pada urusan kesehatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
14. Program informasi kesehatan;
15. Peningkatan pelayanan rumah sakit BLU.

### **7.2.3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Program-program pembangunan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

### **7.2.4 Urusan Ketenagakerjaan**

Kebijakan pada urusan ketenagakerjaan diarahkan pada fasilitasi tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Program-program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

### **7.2.5. Urusan Pemuda dan Olahraga**

Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan pemuda sehat jasmani dan rohani, serta berprestasi baik skala nasional maupun internasional. Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

### **7.2.6 Urusan Kebudayaan**

Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya. Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

### **7.2.7. Urusan Perpustakaan**

Kebijakan pada urusan perpustakaan diarahkan pada terciptanya masyarakat gemar membaca dan peningkatan manajemen perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. Program-program pembangunan pada urusan perpustakaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budaya Baca
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

### **7.3 Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum.**

#### **7.3.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/ Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Sosial Budaya
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

#### **7.3.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Kebijakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan wawasan kebangsaan. Program-program pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Program Hari Anti Narkoba Internasional.

### **7.3.3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Program-program pembangunan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
10. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12. Program Pengelolaan Aset Daerah
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

### **7.3.4. Urusan Statistik**

Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah yang akurat, akuntabel dan *up to date* melalui 1) pengembangan dan unifikasi data/informasi statistik daerah; 2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan 3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.

Program-program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

#### **7.3.5. Urusan Pertanahan**

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah- masalah atau konflik pertanahan. Program-program pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan adalah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

#### **7.3.6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kebijakan pada urusan Kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan. Program-program pembangunan pada urusan Kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis SIAK.

#### **7.3.7. Urusan Kearsipan**

Kebijakan pada Urusan kearsipan diarahkan pada terwujudnya keamanan, ketertiban dan pelestarian serta penyediaan arsiparis yang handal. Program-program pembangunan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana kearsipan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

#### **7.3.8. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya keterbukaan informasi publik. Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.



## **7.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan;**

### **7.4.1. Urusan Pekerjaan Umum**

Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan. Program-program pembangunan pada Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Penerangan Jalan Umum
12. Program Pengelolaan Reklame
13. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

### **7.4.2. Urusan Perumahan**

Kebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya penataan dan penyediaan kawasan permukiman dan TPU. Program-program pembangunan pada Urusan perumahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
3. Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

#### **7.4.3. Urusan Penataan Ruang**

Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan. Program-program pembangunan pada Urusan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **7.4.4. Urusan Perhubungan**

Kebijakan pada Urusan perhubungan diarahkan pada upaya peningkatan dan pengembangan sistem manajemen transportasi. Program-program pembangunan pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

#### **7.4.5. Urusan Lingkungan Hidup**

Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan pada mewujudkan peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Program-program pembangunan pada Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### **7.4.6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Program-program pembangunan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

### **7.5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.**

#### **7.5.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak. Program-program pembangunan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

#### **7.5.2. Urusan Sosial**

Kebijakan pada Urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program-program pembangunan pada Urusan sosial yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

#### Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana

#### **7.5.3. Urusan Perumahan**

Kebijakan pada urusan Perumahan diarahkan pada upaya-upaya pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin. Program pembangunan pada Urusan perumahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

#### **7.5.4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/kelurahan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/kelurahan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan
5. Program Peningkatan Perempuan dalam membangun Pedesaan/kelurahan

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN**

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017**

**VISI :** "MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN"

**MISI :** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Penanggungjawab
						2013		2014		2015		2016		2017		SKPD		Rp. (Ribu)		
						Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1.	Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan	a. Meningkatkan persentase koperasi aktif 90% b. Meningkatkan persentase koperasi sehat mencapai 55% c. Meningkatkan persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10% per tahun	4	1.15.11.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  1.15.01.15 Program Pencapaian Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Meningkatkan jumlah koperasi aktif 90% 2. Meningkatkan peringkat kesehatan koperasi 55% dari koperasi aktif 148	82% 39% 164	75.000 25.000 15.000	82.500 27.000 17.000	84% 43% 181	90.750 29.000 19.000	88% 51% 215	99.825 31.000 21.000	90% 55% 232	109.808 33.000 23.000	10% 55% 232	457.883 145.000 95.000	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM			
2.	Mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi unggulan daerah, mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memertah kesempatan kerja.	a. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang b. Mengembangkan kerjasama pengelolaan aset dengan investor	4	1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Jumlah Penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM meningkat 10% per tahun 1. Meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM 20% penguatan kelembagaan KSP/USP dan UMKM	43,826 125.000 44.686	125.000 15.180 45.546	135.000 145.000 165.000	44.686 45.546	145.000 170.000 190.000	46,046 3.114 M	155.000 180.000 190.000	47,266 3.460 M	165.000 190.000 3.460 M	47,266 3.460 M	725.000 850.000	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM			
<b>Unsur Penanaman Modal</b>																				
2.	Mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi unggulan daerah, mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memertah kesempatan kerja.	a. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang b. Mengembangkan kerjasama pengelolaan aset dengan investor	4	1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (Rp) PMDN, (US\$) PMA dan (Rp) Non Fis 2. Ketersediaan Prana Penyertaan Modal PDAM Kota Kupang, PT Sasando, Bank NTTI, dll	59.000 144.828.232.75 Rp. US\$. 21.818.312.000 839.688.494.442	24.000,158 932.087,438	26.400,158 1.026.286,182	29.040,173 1.241.806,280	211.910,303 31.944,191 1.365.986,908	211.910,303 31.944,191 1.365.986,908	211.910,303 31.944,191 1.365.986,908	211.910,303 31.944,191 1.365.986,908	233.101,333 35.138,609 1.502.585,599	233.101,333 35.138,609 1.502.585,599	1.116.920,336 168.341,586 6.099.340.902	Badan Penanaman Modal Daerah Badan Penanaman Modal Daerah dan Sekretariat Daerah			

No.	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penanggungjawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Rp. SKPD (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target					Rp. (Ribu)
3	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya ekonomi masyarakat		1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	1. Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pejalan investasi pembangunan daerah 2. Jumlah Tenaga kerja yang terserap	PMDN : 11 PMA : 10  PMDN : 857 PMA : 7 Non Fas : 6606	1	3.200.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	PMDN : 16 PMA : 15	Badan Penanaman Modal Daerah		
							1	1.530.000	1	1.840.000	1	2.200.000	1	2.700.000	1	3.200.000	5 pkt		11.470.000	BPMK
4	Meningkatkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis.	Meningkatnya sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha tani, peningkatan kapasitas usaha dan penguatan kelembagaan kelompok		2.01.01.15 Program Kesijahteraan Petani	1. Tingkat pendapatan petani 2. Tingkat kemampuan dan kapasitas kelembagaan petani	14 Gapoktan, 123 Klp, 116 Ha Sawah, 195 Lahan Kering Tani 12  14 Gapoktan, 123 Klp, 3,5 ton GKP dan 3,4 ton Palawija	1	25.500.000	-	-	-	-	-	-	51 kel	25.500.000	BPMK			
							1	50.000	4	75.000	4	100.000	4	125.000	4	150.000	20	500.000	Dinas Peranian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan	

No.	TUTUAN	SASARAN	PRLO RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD	Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
		b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi peternakan.		2.01.01.16 Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebun	1. Tingkat pengestuhan dan ketramplan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian perkebunan	14 Gapoktan, 123 Klp, 116 Ha Sawah, 195 Lahan Kering	7 Gapoktan, 21 Klp.	500.000	7 Gapoktan, 21 Klp.	650.000	7 Gapoktan, 21 Klp.	750.000	850.000	6 Gapoktan, 18 Klp.	1.000.000	34 Gapoktan, 102 Klp	3.750.000	Dinas Peranian Peternakan Perkebunan dan Kesehatan		
					2. Tingkat produksi dan ketersediaan pangan	Sawah 116 Ha, Lahan Kering 195 Ha	Sawah 50 Ha, Lahan Kering 80 Ha	150.000	Sawah 50 Ha, Lahan Kering 80 Ha	150.000	Sawah 116 Ha, Lahan Kering 195 Ha	150.000	150.000	Sawah 116 Ha, Lahan Kering 195 Ha	150.000	Sawah 250 Ha, Lahan Kering 400 Ha	750.000	Dinas Peranian Peternakan Perkebunan dan Kesehatan		
					Meningkatnya Pengalihan Cipla menu serba ikan	51 Kelurahan	51 Kelurahan	15.750	51 Kelurahan	16.000	51 Kelurahan	16.500	17.000	51 Kelurahan	17.500	51 Kelurahan	82.750	BPMK		
					Meningkatnya ketramplan pembuatan Makanan BSA	51 kali, 51 kelurahan	51 kali, 51 kelurahan	210.500	51 kali, 51 kelurahan	211.000	51 kali, 51 kelurahan	212.000	213.000	51 kali, 51 kelurahan	214.000	285 kali, 51 kelurahan	1.040.500	BPMK		
					Meningkatnya Pengalihan makanan BSA	51 Kelurahan	51 Kelurahan	26.200	51 Kelurahan	26.250	51 Kelurahan	26.300	26.350	51 Kelurahan	26.400	51 Kelurahan	131.500	BPMK		
					Meningkatnya Pengalihan barang pangan lokal dan BSA	2 kali	2 kali	21.000	2 kali	22.000	2 kali	23.000	24.000	2 kali	25.000	10 kali	115.000	BPMK		
		c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan		2.01.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peranian/ Perkebunan	1. Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian 2. Tingkat pengalihan, ketramplan dan kemampuan kelengkapan petani dim penurusan hasil produksi perkebunan	Diklat SL 14 kali	Diklat SL 14 kali	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1 Kali	150.000	5 kali	750.000	Dinas Peranian Peternakan Perkebunan dan Kesehatan		



No.	TUTUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja SKPD Penang ggi/jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)					
					3. Tingkat promosi produksi pertanian perkebunan	10 Kali	1 Kali	150,000	1 Kali	150,000	1 Kali	150,000	1 Kali	150,000	1 Kali	150,000	5 kali	750,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan		
					4. Tingkat ketersediaan sarana/prasarana pemasaran hasil produksi	1 Paket	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	5 Paket	750,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan		
	d. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 250 ha			2.01.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peranian Perkebunan	1. Tingkat pemahaman pemfaatan teknologi tepat guna dalam memajang penanaman hasil produk komoditas pertanian perkebunan	15 Paket	1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,250,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,750,000	1 Paket	2,000,000	5 Paket	7,500,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan		
					2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatir petani	Diklat Aparatir 10 paket	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	3 Paket	450,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan		
					1. Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian perkebunan	3 komoditi utama/ 3 paket (Padi, Pelawija, Hortikultura )	3 Paket	3 Paket	500,000	3 Paket	750,000	3 Paket	1,000,000	3 Paket	1,250,000	3 Paket	1,500,000	15 Paket	5,000,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan	
					2. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kelembagaan	Sosialisasi, Penyuluhan 3 komoditi utama/45 kl/15 Paket	1 Paket	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	150,000	1 Paket	15,000	5 Paket	615,000	Dinas Peranian Perkebunan dan Kesehatan	

No.	TUTUAN	SASARAN	PRLO RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja SKPD Penang ggiawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		Target	Rp. (Ribu)
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)					
				2.01 01.21 Program penegehahan dan penanggulangan penyakit ternak	1. Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 2%, Hec Colera = 5%, ND = 45%, Cacing = 5%, Kematian Ternak = 5% ), sarana mobilitas = 0	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 2%, Hec Colera = 5%, ND = 45%, Cacing = 5%, Kematian Ternak = 5% ), sarana mobilitas = 4,2% ) Kematian Ternak = 4% ), sarana mobilitas KIE = 1 unit	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 2%, Hec Colera = 5%, ND = 40%, Cacing = 3,4% ) Kematian Ternak = 3% )	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 2,6% ) Kematian Ternak = 2% )	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 0,8%, Hec Colera = 1%, ND = 30%, Cacing = 1,6% ) Kematian Ternak = 1% )	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 0,4%, Hec Colera = 1%, ND = 25%, Cacing = 1% ) Kematian Ternak = 0% )	Penurunan Tkt kematian ternak dan kasus penyakit hewan = 0%, Hec Colera = 0%, ND = 25%, Cacing = 1% ) Kematian Ternak = 0% )	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,100,000	Dinas Peranian Peternakan Perkebunan dan Kesehatan		
				2.01 01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan	2. Peyulahan Kie 3 SARANA mobilitas KIE	Induk babi = 11 ekor, bibit bakalan = 140 ekor rahan, 1 unit pembibitan	125,000	Bibit bakalan Tahap Dua = 140 kor tahun, kor tahun,	Bibit bakalan Tahap Tiga = 140 kor tahun, kor tahun,	Bibit bakalan Tahap Empat = 140 kor tahun, kor tahun,	Bibit bakalan Tahap Lima = 140 kor tahun, kor tahun,	Bibit bakalan Tahap Lima = 140 kor tahun, kor tahun,	125,000	125,000	125,000	125,000	625,000	Dinas Peranian			
					2. Unit Pembibitan Rakyat ( UPR )	10 Kelompok UPR	250,000	5 Kelompok UPR ( 50 ekor )	5 Kelompok UPR ( 50 ekor )	5 Kelompok UPR ( 50 ekor )	5 Kelompok UPR ( 50 ekor )	5 Kelompok UPR ( 50 ekor )	250,000	250,000	250,000	275,000	1,275,000	Dinas Peranian			
					3. Tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak dalam meningkatkan produksi hasil peternakan	Perumahan, Paket, 15 Paket	150,000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150,000	150,000	150,000	750,000	Dinas Peranian				

No.	TUTUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
				2.01.01.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1. Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi peternakan 2. Tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan kemampuan kelembagaan peternak dalam pemasaran hasil produksi peternakan 3. Optimalisasi sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan dan bibit ternak 4. Peningkatan sarana prasarana pasar ternak	Unit Pembibitan boboi (1 Sirkus/1 Paket) 10 Klp Peternak	1 Paket 500,000	1 Paket 750,000	1 Paket 1,000,000	1 Paket 60,000	1 Paket 1,250,000	1 Paket 1,300,000	5 Paket 5,000,000	5 Paket 390,000	Dinas Perikanan					
				2.01.01.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Tingkat penyediaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 2. Tingkat keterampilan, pengetahuan dan kelengkapan kelompok peternak	Sumber bahan baku Biogas 1 unit	1 Paket 125,000	1 Paket 125,000	5 klp pengguna biogas	5 klp pengguna biogas	5 klp pengguna biogas	5 klp pengguna biogas	25 Klp pengguna biogas	625,000	Dinas Perikanan					
				2.01.02.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1. Tingkat pemanfaatan dan pengelolaan hutan 2. Tingkat penyelesaian review tata batas kawasan hutan dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan kali kupang RTK. 174	1 lokasi 50% hasil Revit	1 Lokasi 250,000	1 Lokasi 300,000	1 Lokasi 350,000	1 Lokasi 400,000	1 Lokasi 450,000	1 Lokasi 1,750,000	5 Lokasi 1,200,000	5 Lokasi 1,200,000	Dinas Perikanan					

No.	TUTUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD	Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
					3. Tingkat pengawasan dan perencanaan HHK dan HHBK	12 kali/tahun	100,000	12 kali	100,000	12 kali	100,000	12 kali	100,000	60 kali	500,000	Dinas Perikanan				
				2.01.2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan	1. Pembutan Bibi/Benih Tanaman Kebunau 2. Tingkat pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan RHL	300 anakan cerdana	20,000	10,000 anakan	20,000	10,000 anakan	20,000	10,000 anakan	20,000	50,000 tunaman cerdana	100,000	Dinas Perikanan				
				2.01.2.17 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Penghijauan Lahan	1 Klpk Kegiatan	750,000	1 Klpk Kegiatan	1,000,000	1 Klpk Kegiatan	850,000	1 Klpk Kegiatan	800,000	5 Klpk Kegiatan	4,150,000	Dinas Perikanan				
				2.01.2.19 Program Pembinaan dan Penceritaan Industri Hasil Hutan	1. Tingkat perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 2. Tingkat pembinaan, pengembangan dan penguatulan kebakaran hutan dan lahan 3. Tingkat pengawasan dan pencerbiban industri hasil hutan	30 Ha 1 Paket kegiatan 12 kali/tahun	1,000,000	100 Ha	1,500,000	150 Ha	2,000,000	200 Ha	2,500,000	750 Ha	10,000,000	Dinas Perikanan				
							50,000	1 Paket kegiatan	100,000	1 Paket kegiatan	50,000	1 Paket kegiatan	75,000	50,000	325,000	Dinas Perikanan				
							100,000	20 kelompok	100,000	12 kali	100,000	12 kali	100,000	60 kali	500,000	Dinas Perikanan				
Umsan Ketahanan Pangan																				
5	Meningkatkan SDM penyuluh Peleaku Usala ketahanan pangan dan penyuluhan yang Produktif dan Berkelanjutan	Meningkatkan SDM yang berkompeten moderen, produktif dhibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.		Program Peningkatan Kesjahteraan Petani	1 Tingkat Produktifitas usaha 2 Jumlah Pemasuk Ketesediaan Pangan 3 Jumlah Kelp/Gabungan Kelp 4 Insentif dan Disentif	-	185,000	40%	218,500	60%	223,550	80%	246,305	270,936	1,144,291	Badan Ketenahan Pangan dan Penyuluhan				

No.	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target		Rp. (Ribu)
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)							
6	Mengembangkan sistem keamanan pangan yang produktif/moderen melalui jeroan Rilm tsata yang Nyaman Yang Berkelanjutan.	Memfasilitasi pendanaan yang berpihak pada agribisnis untuk peningkatan hasil produksi di bidang Ketahanan Pangan.		2.01.04.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Perikanan/Perkebunan Lapangan	1. Jumlah Diklat Petani dan Penyuluh 2. Prestasi, Kompetensi Penyuluh dan Sertifikasi Penyuluh 3. Dokumen Program, RKT Penyuluh dan BPP	-	13% (23 ppl.kt/189 ppl.kt)	83,229	16%	106,552	21%	118,557	26%	1,308,128	32%	143,894	75%	583,045	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan				
							0%	-	50%	50,000	70%	55,000	85%	60,500	100%	66,550	100%	226,000					
7	Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi dan merata.	Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam diversifikasi Pangan dan teknologi pendukung agribisnis.		2.01.04.17 Program Peningkatan Promosi Perikanan/Perkebunan	1. Jumlah Fasilitas Kemiripan 2. Jaringan Usaha Kelp 3. Data Pelaporan	-	40%	15,000	50%	46,500	70%	51,000	85%	56,300	100%	61,930	100%	230,730	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan				
							2 dari 9 gapoktan, 22 %	20,000	44%	37,000	67%	42,200	89%	46,620	100%	51,282	100%	197,102					

No.	TUJUAN	SASARAN	PRLO RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penang gungjawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target					Rp. (Ribu)
8	Meningkatkan ketahanan pangan, kevaspediaan pangan dan pengaksesan pangan Pengaksesan pangan secara produktif dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan pangan dan pola pengaksesan pangan berbasis sumberdaya lokal.		1.01.04.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1. Jumlah produk Ketersediaan pangan MAPAN 2. Ketahanan Pangan 3. Lumbung pangan 4. Penyediaan sumber pangan alternatif 5. Pola konsumsi pangan masyarakat 6. Tingkat keragaman pangan dan deteksi dini 7. Jumlah pengkajian, kebijakan, pengembangan, penentuan ketersediaan pangan. Peningkatan Rawan pangan 8. Tingkat Diversifikasi dan keamanan konsumsi pangan;	-	100%	266,250	100%	292,873	100%	322,163	100%	354,379	100%	389,817	100%	1,625,483	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	
Unsur Pariwisata																				
9	Meingkatkan kualitas pariwisata melalui pemudatan, teknologi, kelembagaan, sarana prasarana pendukung	a. Meningkatkan persentase komunitas kunjungan wisata ke Kota Kupang rata-rata sebesar 5 % per tahun b. Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya		2.04.1.15 Program Pengembangan Pariwisata  2.04.1.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisata  1. Meningkatnya lama tinggal wisatawan asing 2. Tersedianya Sarana pusat informasi pariwisata di NTT 3. Tersedianya sarana rekreasi dan taman kota Kupang 50 %	278.841	10 %	150,000	5 %	310,626	100%	167,000	5 %	338,426	5 %	352,326	25%	831,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
								90,000	2 hari	90,000	2 hari	90,000	2 hari	90,000	2 hari	90,000	2 hari	250,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
																		400,000	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat	

No.	TUJUAN	SASARAN	PRIO- RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD	Unit Kerja SKPD Penang- gungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
				2.04.1.17 Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	1. Tingkat okupansi hotel (... Hotel) 2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata 3. Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kavasa kuliner 4. Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata	60.115 Wisatawan 3 obyek wisata 6 jenis 550 buah 12 jenis 685 buah	2% 1 obyek wisata 555 buah 710 buah	19.000 85.000 15.000 24.000	20.000 85.000 17.500 27.000	2% 1 obyek wisata 545 buah 760 buah	21.000 85.000 20.000 30.000	2% 1 obyek wisata 550 buah 785 buah	22.000 85.000 22.500 33.000	2% 1 obyek wisata 555 buah 810 buah	23.000 85.000 25.000 37.000	105.000 425.000 100.000 151.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
Unsur Kelatan dan Perikanan																				
10	Mengembangkan Produktivitas Kelatan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis	a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani perikanan		2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1. Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelatan 30% per tahun 2. Meningkatnya perekonomian dan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya 3. Meningkatnya kesempatan kerja dan kemampuan berusaha dibidang perikanan	30 kelompok usaha perikanan 17 kel perikanan tangkap, 6 kel ikan tangkap dan 6 kel P2HP	23 kel, 2 kegg, 102 org	210.000 527.500 527.500 2.000.000	23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 35 kelompok usaha perikanan	210.000 527.500 527.500 2.000.000	23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 23 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 35 kelompok usaha perikanan	210.000 527.500 527.500 2.000.000	24 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 24 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 24 kelompok kegiatan pembinaan (102 org) 35 kelompok usaha perikanan	210.000 527.500 527.500 2.000.000	145 kelompok (perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan) 145 kelompok kegiatan pembinaan 145 kelompok kegiatan pembinaan 175 kelompok usaha perikanan	1.050.000 2.637.500,00 2.637.500 10.000.000	Dinas Kelatan dan Perikanan			

No.	TUTUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penang ggiawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target					Rp. (Ribu)
	b.	Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penguasaan dan Penguadalan Sumber Daya Kelautan	1. Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 2. Terselenggaranya pertemuan izin usaha dan pengawasan lingkungan sumber daya kelautan 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 15% per tahun 2. Mengurangi kegiatan destruktif terhadap sumber daya KP	6 Pokmaswas 12 kali opwaspadu	3 pembt pokmaswas, 4 pembinaan dan 30 paket perengkapaan	3 pembt pokmaswas, 3 pembinaan dan 30 paket perengkapaan	2 pembt pokmaswas, 2 pembinaan	2 kali opwaspadu dan 2 kali wasmatu	2 kali opwaspadu dan 2 kali wasmatu	2 kali opwaspadu dan 10 kali wasmatu	10 pembt pokmaswas, 16 pembinaan dan 90 paket perengkapaan	20,000	385,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	c.	Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun;		Program Peningkatan Kesadaran dan Penguasaan Hukim dalam Penguadalan Sumber Daya Laut.	-	-	2 org PPNS	2 org pelatihan crash prog PPNS	2 org pelatihan crash prog PPNS	2 org pelatihan crash prog PPNS	2 org pelatihan crash prog PPNS	2 org pelatihan crash prog PPNS	2, PPNS dan 10 org pelatihan crash prog PPNS	25,000	160,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	d.	Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun		Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.	1. Meningkatkan kesadaran akan budaya dan wawasan Kelautan dan perikanan 2. Terselenggaranya laporan ril dan secara berkala, di bidang kelautan dan perikanan	7 orang (seriap tahun)	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	10 orang kegiatan Gemala dan 2 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	50 orang kegiatan Gemala dan 10 SD/kecamatan untuk kegiatan Gemarikan	184,000	660,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	e.	Meningkatnya persentase produksi perikanan olahan sebesar 3% per tahun;		Program pengembangan budidaya perikanan	1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan	calon induk 300 ekor dan benih ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya KJA, 1 unit UPR	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	benih ikan 1500 ekor, 300 ctn induk ikan, sarana budidaya KJA dan UPR	100,000	500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
				Program pengembangan budidaya perikanan	1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan	calon induk 300 ekor dan benih ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya KJA, 1 unit UPR	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	3 pembt ikan 1500 ekor, penyuluhan dan sarana budidaya kolam ikan	benih ikan 1500 ekor, 300 ctn induk ikan, sarana budidaya KJA dan UPR	80,000	1,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				



No.	TUJUAN	SASARAN	PRIO- RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD	Unit Kerja SKPD Penang- gungjawab				
							2013		2014		2015				2016		2017	
							Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target			Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target
		f. Meningkatkan konsumsi makanan dari ikan		2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap	1. Meningkatkan produktivitas dan produkti perikanan tangkap 1,5% per tahun 2. Peningkatan kualitas produk perikanan tangkap	kapal 27 unit, body 17 unit, mesin 30 unit, paket 152 piece	2.030,000	penyulhan money serta sarana perikanan tangkap mesin 7 unit, paket 150 piece	2.000,000	2.030,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	10,060,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				2.05.01.22 Program pengembangan sistem perikanan	1. Meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluh	Kendaraan roda dua 1 unit,	-	1 paket pemeliharaan rutin TPI	80,000	80,000	1 paket pemeliharaan rutin TPI	1 paket pemeliharaan rutin TPI	1 paket pemeliharaan rutin TPI	840,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				2.05.01.23 Program optimalisasi pengeolaan dan pemasaran produksi perikanan	1. Meningkatkan produkti perikanan olahan sebesar 3% per tahun	coolbox 170 unit, marine cooler 50 unit, tenda 10 unit, pemasaran 4 unit, motor insulate 4 unit	500,000	coolbox 20 unit, tenda 4 unit, meja jualan 10 unit, motor insulate, 2 unit	500,000	500,000	coolbox 20 unit, tenda 4 unit, meja jualan 10 unit, motor insulate, 2 unit	coolbox 20 unit, tenda 4 unit, meja jualan 10 unit, motor insulate, 2 unit	coolbox 100 unit, tenda 20 unit, meja jualan 10 unit, motor insulate, 2 unit	2.500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				2.05.01.26 Program Sumber Daya Perikanan	1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan aparaturn dan Masyarakat Pesisir 2. Mengkannya promosi produk hasil perikanan	-	350,000	5 produk TTG, magang, bimtek dan SKK atkapin, 2 orang cek fisik kapal	365,000	425,000	365,000	290,000	1,795,000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
Umsan Perdagangan																		
11	Mengembangkan kualitas produk sektor perikanan dan perdagangan perikanan ketangkasan dalam pemasaran dan sarana prasarana perdagangan	a. Meningkatkan pasar tradisional yang bersih dan nyaman.		2.06.02.15 Program Perlibingan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 Jumlah permasalahan permasalahan-pemmasalahan-pemmasalahan konsumen yang telah terfasilitasi penyelesaiannya oleh BPSK.	12 kasus	250 juta	25 kasus	250 juta	25 kasus	250 juta	25 kasus	250 juta	1,25 miliar	Dinas Perindag			

No.	TUTUAN	SASARAN	PRLO RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penang gungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target		Rp. (Ribu)
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)							
					2 Jumlah tempat-tempat usaha yang diawasi peredaran barang dan jasanya	630 unit usaha	600 tempat usaha	600 tempat usaha	600 tempat usaha	600 tempat usaha	600 tempat usaha	600 tempat usaha	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	3000 tempat usaha	500 jt	Dinas Perindag			
					3 Turbangunnya 5 pos ukur ulang di 5 pasar tradisional	-	1 pos ukur ulang	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 jt	50 jt	50 jt	50 jt	50 juta	5 pos ukur ulang	250 jt	Dinas Perindag			
					4 Jumlah UTPP dan BDKT yang berada didalam pengawasan.	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	50 jt	50 jt	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	50 jt	50 jt	50 jt	50 jt	50 juta	1000 utp dan 100 merk/ jenis BDKT dalam pengawasan	250 jt	Dinas Perindag			
				2.06.2.17 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	1 Penyusunan dan pencerbian dokumen transaksi dan distribusi ekspor non migas	1 Dokumen Transaksi terdokumentasi 10.638,316,82 US\$	1 dokumen total transaksi US\$	50,000	50,000	1 dokumen total transaksi 14.000,000 US\$	1 dokumen total transaksi 12.750,000 US\$	1 dokumen total transaksi 14.000,000 US\$	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1 dokumentasi total transaksi 16.500,000 US\$	250,000	Dinas Perindag			
				2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tersedianya informasi harga bahan pokok dan informasi harga barang strategis	-	1 dok (100%)	40,000	40,000	1 dok (100%)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1 dok (100%)	200,000	Dinas Perindag			
				2.06.02.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya data stock barang kebutuhan pokok dan Perdagangan Antar Pulau (PAP)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	10,000	10,000	1 dok (100%)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1 dok (100%)	125,000	Dinas Perindag			
				2.06.02.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya informasi harga bahan pokok dan informasi harga barang strategis	1 dok (100%)	1 dok (100%)	40,000	40,000	1 dok (100%)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1 dok (100%)	200,000	Dinas Perindag			
				2.06.02.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya data stock barang kebutuhan pokok dan Perdagangan Antar Pulau (PAP)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	10,000	10,000	1 dok (100%)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1 dok (100%)	125,000	Dinas Perindag			

No.	TUTUAN	SASARAN	PRLO RITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD			Unit Kerja SKPD Penanganggungjawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target					Rp. (Ribu)
					Jumlah kegiatan dalam rangka penumbuhan kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah (bazar, pasar murah, dll)	3 kali (HUT Kota, Natal dan Lebaran) 100 %	50,000	3 kali (HUT Kota, Natal dan Lebaran) 100 %	50,000	3 kali (HUT Kota, Natal dan Lebaran) 100 %	50,000	3 kali (HUT Kota, Natal dan Lebaran) 100 %	50,000	3 kali (HUT Kota, Natal dan Lebaran) 100 %	50,000	250,000	Dinas Perindag			
				2.06.02.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Terbangunnya pasar penyanga 2 unit dan pasar percontohan 2 unit.	-	15,000,000	1 unit pasar penyanga dan 1 unit pasar percontohan	35,000,000	1 unit pasar penyanga dan 1 unit pasar percontohan	20,000,000	1 unit pasar percontohan	20,000,000	10 unit pasar penyanga dan 3 unit pasar percontohan	70,000,000	Dinas Perindag				
				2.06.02.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki komandirhan dalam usaha 681 PKL	91 PKL	50,000	91 PKL	50,000	91 PKL	50,000	91 PKL	92 PKL	681 PKL	250,000	Dinas Perindag				
					Fasilitas pengembangan dan peningkatan usaha PKL (ternda, kursi, meja, dll)	150 PKL	250,000	130 PKL	175,000	120 PKL	145,000	100 PKL	125 PKL	850 PKL	1,025,000	Dinas Perindag				
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>																				
	b	Meningkatnya struktur industri berbasis pada pendekatan kluster		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Prosentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri	35	35,000	15	35,000	15	35,000	15	35,000	110	175,000	Dinas Perindag				
	c	Meningkatnya kualitas kemasan produk sektor perindustrian		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Jumlah cluster baru Industri Kecil & Menengah 2. Jumlah IKM Jaringan Cluster yang mendapat pembinaan dan pendampingan	-	25,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4	225,000	Dinas Perindag				
					Jumlah IKM Jaringan Cluster yang mendapat pembinaan dan pendampingan	35 IKM	50,000	10 IKM	50,000	10 IKM	50,000	10 IKM	10 IKM	85 IKM	250,000	Dinas Perindag				

No.	TUTUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)					
				2.07.02.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1. Produktif dan transaksi penjualan IKM 2. Penyusunan Database Sektor Industri	5 IKM 5 Dokumen Database	5 IKM 1	80.000 30.000	5 IKM 1	80.000 30.000	5 IKM 1	80.000 30.000	5 IKM 1	80.000 30.000	25 IKM 6	400.000 150.000	Dinas Perindag				
				2.07.02.18 Program Penataan Struktur Industri	Peningkatan penataan struktur IKM	1 Paket (35 IKM)	1 Paket (35 IKM)	75.000	1 Paket (35 IKM)	75.000	1 Paket (35 IKM)	75.000	1 Paket (35 IKM)	75.000	5 paket	375.000	Dinas Perindag				
				2.07.02.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1. Penataan kawasan sentra-sentra industri potensial 2. Peningkatan kualitas informasi Web Inlag terintegrasi	1	1	100.000	1	100.000	2	200.000	1	100.000	6	700.000	Dinas Perindag				
						1 paket	1 paket	75.000	1 paket	80.000	1 paket	80.000	1 paket	80.000	5 paket	395.000	Dinas Perindag				

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017**

**VISI** : " MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN"  
**MISI II** : Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang Yang Berkualitas  
(dalam Ribu)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)			
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>Urusan Pendidikan</b>																					
1	<b>Pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 12 tahun didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola yang baik</b>	a. Meningkatkan pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan;	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>	1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Meningkatkan APK PAUD sebesar 85 %	30,39%	41,31%	4,934,000	52,23%	5,674,100	63,15%	5,674,100	74,07%	5,674,100	85%	5,674,100	85%	5,674,100	Dinas PPO		
2. Penerapan sistem Pembelajaran berkarakter 100%					50%	60%	75,000	70%	75,000	80%	75,000	90%	75,000	100%	75,000	100%	75,000	100%	75,000	100%	75,000
b. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA.		1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI	APK 126,18 APM 103,25	126,18% 104,23%	10,170,000	126,28% 105,21%	10,195,500	126,38% 106,19%	10,221,000	126,48% 107,17%	10,246,500	126,58% 108,15%	10,272,000	126,58% 108,15%	10,272,000	126,58% 108,15%	10,272,000	-	Dinas PPO	
			2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP	APK 117,50 APM 81,75	118% 82,95%	10,130,000	118,50% 84,15%	11,649,500	119% 85,35%	13,169,000	119,50% 86,55%	14,688,500	120% 87,75%	16,208,000	120% 87,75%	16,208,000	120% 87,75%	16,208,000	-	Dinas PPO	
		3. Meningkatkan kualitas peserta didik dalam kelulusan SD 100 %, SMP 100 %	SD 100%	100%	1,150,000	100%	1,322,500	100%	1,495,000	100%	1,667,500	100%	1,840,000	100%	1,840,000	100%	1,840,000	100%	1,840,000	-	Dinas PPO
		c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan;	1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Meningkatkan kualitas ruang kelas dan ruang belajar lainnya di SD 80%	SMP 97,79%	22,4%	1,701,000	98,50% 75%	1,956,150	99% 76%	2,211,300	99,50% 77,5%	2,466,450	100% 80%	2,721,600	100% 80%	2,721,600	100% 80%	2,721,600	-	Dinas PPO
				2. Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 97%	34,04%	60%	1,937,000	75%	2,227,550	85%	2,518,100	90%	2,808,650	97%	3,099,200	97%	3,099,200	97%	3,099,200	-	Dinas PPO
				3. Melaksanakan e-pembelajaran di SD 25 %	5%	7,5%	250,000	10%	275,000	15%	316,250	20%	379,500	25%	474,375	25%	474,375	25%	474,375	-	Dinas PPO
				4. Melaksanakan e-pembelajaran di SMP 75 %	50%	55%	750,000	60%	862,500	62%	975,000	65%	1,087,500	70%	1,200,000	75%	1,200,000	75%	1,200,000	-	Dinas PPO
				5. Meningkatkan jumlah SD dan SMP terakreditasi 100 %	SD 85% SD 85% SMP 85 %	87% 87% 87%	97,000 97,000 97,000	89% 89% 89%	111,550 111,550 111,550	93% 93% 93%	126,100 126,100 126,100	95% 95% 95%	140,650 140,650 140,650	100% 100% 100%	155,200 155,200 155,200	100% 100% 100%	155,200 155,200 155,200	100% 100% 100%	155,200 155,200 155,200	-	Dinas PPO

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah	1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 98%	APK=94,54 %  APM=60,72%	94.54%  60.72%	1,550,000  1,550,000	94.68%  65.68%	1,782,500  1,782,500	94.75%  79.75%	2,015,000  2,015,000	94.88%  88.88%	22,475,000  22,475,000	98.00%  98.00%	2,480,000  2,480,000	98.00%  98.00%	2,480,000  2,480,000	Dinas PPO  Dinas PPO
					2. Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMA/SMK 99 %	SMA=97,50%  SMK=98,40 %	97.50%  98.40%	4,150,000  4,150,000	98.46%  98.50%	4,772,500  4,772,500	98.50%  98.60%	5,395,000  5,395,000	98.89%  98.70%	6,017,500  6,017,500	99.00%  99.00%	6,640,000  6,640,000	99.00%  99.00%	6,640,000  6,640,000	Dinas PPO  Dinas PPO
					3. Meningkatkan jumlah SMA terakreditasi minimal B sebesar 90 %	SMA=87%	87%	100,000	88%	115,000	89%	132,250	89.50%	152,088	90%	174,901	90%	174,901	Dinas PPO
					4. Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi minimal B sebesar 90 %	SMK=87%	87%	100,000	88%	111,550	89%	132,250	89.50%	152,088	90%	174,901	90%	174,901	Dinas PPO
					5. Meningkatkan jumlah SMK bersertifikat ISO 9001-2008	2 Unit	1 Unit	100,000	1 Unit	115,000	1 Unit	132,250	2 Unit	152,088	7 Unit	174,901	7 unit	174,901	Dinas PPO
				1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal	1. Mempertahankan Capaian APK Rata-rata 50%	25%	30%	150,000	35%	172,500	40%	198,375	45%	228,131	50%	262,351	50%	262,351	Dinas PPO
					2. Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat sebesar 50 %	25%	30%	515,000	35.0%	592,250	40%	681,088	45%	783,251	50%	900,738	50%	900,738	Dinas PPO
					3. Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 %	2.5%	3%	90,000	5%	103,500	10%	119,025	15%	136,879	20%	157,411	20%	157,411	Dinas PPO
				1.01 1.19 Program Pendidikan luar Biasa	1. Meningkatnya Persentase guru SD/SLB berkualifikasi S-1/D-4; 30%	15%	15.50%	100,000	20%	115,000	22.50%	132,250	25%	152,088	30%	174,801	30%	174,801	Dinas PPO
					2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah SD/SLB 25%	15%	15.50%	150,000	20%	172,500	22.50%	198,375	25%	228,131	30%	262,351	30%	262,351	Dinas PPO

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.01 1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Presentase guru berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 100%	TK = 25% SD = 25% SMP = 75% SMA = 90% SMK = 90%	50% 50% 80% 93% 93%	125.000 150.000 200.000 250.000 300.000	70% 70% 85% 95% 95%	143,750 172,500 230,000 287,500 345,000	90% 90% 90% 97% 97%	165,313 198,375 264,500 330,625 396,750	98% 98% 95% 98% 98%	190,109 228,131 304,175 380,219 456,263	100% 100% 100% 100% 100%	218,626 262,351 349,801 437,252 524,702	100% 100% 100% 100% 100%	218,626 262,351 349,801 437,252 524,702	Dinas PPO
					2. Persentase guru berkualifikasi S-2 sebanyak 100 org	-	50 Orang	250.000	60 orang	287,500	80 orang	330,625	90 orang	380,219	100 orang	437,252	100 orang	437,252	Dinas PPO
					3. Kualifikasi pendidik PAUD Non Formal 70% terlatih	25%	30%	75.000	40%	86,250	50%	99,188	60%	114,066	70%	131,175	70%	131,175	Dinas PPO
					4. Peningkatan kompetensi guru sebanyak 2500 orang	1000 orang	1250 orang	150.000	1500 orang	172,500	2000 orang	198,375	2250 orang	228,131	2500 orang	262,351	2500 orang	262,351	Dinas PPO
					5. Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK sebanyak 150 orang	10 orang	30 orang	50.000	50 orang	57,500	100 orang	66,125	125 orang	76,044	150 orang	87,450	150 orang	87,450	Dinas PPO
					6. Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat profesi 90 %	65%	70%	100.000	75%	115.000	80%	132,250	85%	152,088	90%	174,901	90%	174,901	Dinas PPO
					7. Meningkatkan jumlah SMA melaksanakan e-pembelajaran sebesar 60 %	25%	30%	250.000	40%	275.000	50%	316,250	55%	379,500	60%	474,375	60%	474,375	Dinas PPO
					8. Meningkatkan jumlah SMK melaksanakan e-pembelajaran sebesar 60 %	25%	30%	250.000	40%	275.000	50%	316,250	55%	379,500	60%	474,375	60%	474,375	Dinas PPO
					9. Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik 1 : 36	1:48	1:45	50.000	1:42	57,500	1:40	66,125	1:38	76,044	1:36	87,450	1:36	87,450	Dinas PPO

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.01 1.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10. Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik 1. Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan														Dinas PPO
<b>Urusan Kesehatan</b>																			
2	Pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung sarana prasarana serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	a. Angka Kematian ibu dan bayi 0 Kasus		1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya	100%	100%	374,171	100%	411,588	100%	452,746	1	498,021	1	547,823	100%	547,823	Dinkes
		b. Angka Balita Gizi Buruk $\geq 1$ %		1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Kupang	2	2	3,376,368	100%	3,714,005	100%	4,083,406	2	4,493,946	2	4,943,341	100%	4,943,341	Dinkes
		c. Umur Harapan Hidup 73,06 tahun			2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kondisi awal kita BOR : 30 %, ALOS : 2 Hari, TOI : 1 hari, BTO : 107, IMR, 0 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0, NDR $\geq$ 0/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 0/1000	(80%) BOR : 30 %, ALOS : 2 Hari, TOI : 1 hari, BTO : 107, IMR, 0 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0, NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	2,000,000	(90%) BOR : 40 %, ALOS : 3 Hari, TOI : 2 hari, BTO : 50, IMR, 0,1 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0,1 NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	-	(100%) BOR : 50 %, ALOS : 3 Hari, TOI : 2 hari, BTO : 50, IMR, 0,1 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0,1 NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	2,750,000	(100%) BOR : 55 %, ALOS : 3 Hari, TOI : 2 hari, BTO : 50, IMR, 0,1 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0,1 NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	3,000,000	(100%) BOR : 60 %, ALOS : 4 Hari, TOI : 2 hari, BTO : 50, IMR, 0,1 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0,1 NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	3,500,000	(100%) BOR : 60 %, ALOS : 4 Hari, TOI : 2 hari, BTO : 50, IMR, 0,2 %, MMR : 0, FODR : 0, Angka Kematian SC : 0,1 NDR $\geq$ 25/1000 Penderita Keluar, GDR $\geq$ 45/1000	11,250,000	RSUD
					3. Rakor Pemda tentang UKS	3. Rakor Pemda tentang UKS	20 orang	50 orang	49,000	50 orang	-	50 orang	60,000	50 orang	65,000	50 orang	70,000	50 orang	244,000
				4. Senam Kesegaran Jasmani	4. Senam Kesegaran Jasmani	2000 orang	3000 orang	225,000	3100 orang	11,649,500	3200 orang	245,000	3300 orang	255,000	3400 orang	265,000	16,000 orang	12,639,500	Setda (Bag. Sos)



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)		
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)				
				1.02 1.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Terpantaunya Peredaran Obat dan Makanan di sarana Pengelolaan Obat dan Makanan	100%	100%	67,950	100%	74,745	100%	82,219	100%	90,442	100%	99,486	100%	99,486	Dinkes
				1.02 1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1 Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	0.1	0.05	75,200	0.05	275,000	0.05	90,992	0.05	100,091	0.05	110,100	0.05	110,100	Dinkes
						Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS (0,1)		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.35		
						Cakupan Penyuluhan Kesehatan oleh Petugas (2097 x)		2234x		2356x		2467x		2531x		2645x		2645x		
						2 Terlaksananya Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat bagi siswa SD	10 SD	10 SD	4,500	10 SD	5,500	10 SD	6,500	10 SD	7,500	10 SD	8,500	50 SD	32,500	BPMK
				1.02 1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			965,160		1,061,676		1,167,434		1,284,628		1,413,091	0%	1,413,091	Dinkes
						Angka Gizi Buruk Balita (1,65%)		1.5%		1.3%		1.2%		1.1%	1%		1%			Dinkes
						Angka Balita Bawah Garis Merah (0,0586)		5.8%		5.6%		5.3%		5.1%	5%		5%			Dinkes
						Angka Gizi Kurang Balita (2,3%)		2.2%		2.1%		2.0%		2.0%	2.0%		2.0%			Dinkes
						Angka Berat Badan Lahir Rendah (3%)		2.8%		2.4%		2.0%		1.7%	1.5%		1.5%			Dinkes
						2. Lomba bayi balita sehat	114 bayi dan balita	9 bayi, balita sehat	18,100	9 bayi, balita sehat	19,100	9 bayi, balita sehat	20,100	9 bayi, balita sehat	21,100	9 bayi, balita sehat	22,100	45 bayi, balita sehat	100,500	BPMK

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Pola Hidup Sehat		80%	130,261	85%	143,287	90%	157,615	95%	173,377	100%	190,715	100%	190,715	DinKes
					Cakupan keluarga yang menggunakan jamban keluarga sehat (75,26%)		73%	-	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	-
					Cakupan keluarga yang menempati rumah sehat (71,52%)		60%	-	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	80%	-	-
					Cakupan keluarga yang mempunyai SPAL sehat (59,38%)		68%	-	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%	-	-
					Cakupan keluarga yang mempunyai TSK sehat (66,63%)														
				1.02 1.22 Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular	1. Menurunnya Angka kesakitan, kematian dan cacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular		<1/1000 KH	778,536	<1/1000 KH	1,782,500	<1/1000 KH	942,029	<1/1000 KH	1,036,232	<1/1000 KH	1,139,855	<1/1000 KH	1,139,855	Dinkes
					Angka Kesakitan Tetanus Neonatorum (0/1000 KH)		0%	-	0.00%	4,772,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-
					Angka Kesakitan Difteri (0%)		0%	-	0.00%	4,772,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-
					Angka Kesakitan Pertusis (0%)		185	-	166	115,000	148	-	130	-	110	-	110	-	-
					Angka Kesakitan TB Paru (204/100.000 Pend)		237	0.205	173	111,550	111	-	99	-	110	-	110	-	-
					Angka Kesakitan DBD (248 Kss Per 100.000 Pend)														

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)			
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)					
						Angka Kesakitan Diare (25)	24	-	23	400,000	22	-	21	-	20	-	20	-			
						Angka Kesakitan Kusta (1.9 per 10000 penduduk)	1.8	-	1.5	115,000	1.2	-	1	-	1	-	1	-			
						Angka Kesakitan Malaria (1.8 per 1000 penduduk)	1.7	-	1.6	172,500	1.4	-	1.3	-	1.2	-	1.2	-			
						Prevalensi HIV Positif (370 Kss)	436	-	496	592,250	556	-	616	-	676	-	676	-			
				1.02.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan	(30%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan	(50%) SOP Keperawatan, Penunjang dan Pelayanan dan formularium	100,000	(60%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan dan formularium	115,000	(75%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan dan formularium	150,000	(80%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan dan formularium	200,000	(100%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan dan formularium	75,000	(100%) SOP Keperawatan, Penunjang, Pelayanan dan formularium	640,000	RSUD	
				1.02.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin		-		172,500		-		-		-		-	Dinkes dan RSUD		
				1.02.1.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas	Rasio Puskesmas rawat Inap (4 dari 6 Kec)		4	3,905,000	4	4,725,050	5	4,725,050	5	5,197,555	6	5,717,311	0% 6	5,717,311	Dinkes
						Rasio Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap per penduduk (0,57 per 20000 Penduduk)	0.60		0.65		0.70		0.75		0.80		0.80				
						Rasio Pustu per penduduk atau rasio Pustu per Kelurahan (0,94 per 10000 Penduduk)	0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00				

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)		
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)				
						Rasio Posyandu per balita (0,32 per 50 balita)														
						Rasio Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap (100%)	1000.00%		1100.00%		1200.00%	-	1200.00%		1200.00%		1200%			
				1.02 1.26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan rumah sakit	10%), sarana dan prasarana	65,000,000	10%), sarana dan prasarana	172,500	10%), sarana dan prasarana	75,000,000	10%), sarana dan prasarana	80,000,000	20%), sarana dan prasarana	80,000,000	80%), sarana dan prasarana	300,172,500	RSUD	
				1.02 1.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaana pelayanan rumah sakit	-	100%	600,000	100%	115,000	100%	300,000	100%	375,000	100%	400,000	100%	1,790,000	RSUD
				1.02 1.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan	25%	10%	150,000	10%	275,000	10%	300,000	10%	350,000	10%	375,000	75%	1,450,000	RSUD
						Cakupan JPKM KK Miskin (100%)	100%	7,154,350	100%	-	100%	8,656,764	100%	9,522,440	100%	10,474,684	100%	10,474,684	Setda (Bag. Sos)	
						Angka Gizi Buruk Balita (1,65%)	0.015	-	0.013	-	0.012	-	0.011	-	1%	-	1%	-	Dinkes	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Balita	Angka Balita Bawah Garis Merah (BGM) (0,0586)	0.058	-	0.056	-	0.053	-	0.051	-	5%	-	5%	-	Dinkes
				1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Balita	Angka Gizi Kurang Balita (2,3%)	0.022	-	2.1%	-	2.0%	-	2.0%	-	2.0%	-	2.0%	-	Dinkes
				1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Balita	Angka Gizi Buruk Balita (1,65%)	1.50%	359,860	1.30%	359,846	1.20%	435,431	1.10%	478,974	1%	526,871	1%	526,870	Dinkes
				1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Balita	Angka Balita Bawah Garis Merah (0,0586)	5.80%	-	5.60%	-	5.30%	-	5.10%	-	5%	-	5%	-	Dinkes dan RSUD
				1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Balita	Angka Gizi Kurang Balita (2,3%)	2.20%	-	2.10%	-	2.00%	-	2.00%	-	2.0%	-	2.0%	-	Dinkes dan RSUD
				1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan lansia	2. Pelayanan kesehatan balita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes dan RSUD
				1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia (7%)	40%	-	60%	-	80%	-	90%	-	100%	-	-	-	Dinkes
				1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Posyandu Santun Usia (10%)	40%	-	60%	-	80%	-	90%	-	100%	-	-	-	Dinkes

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
				1.02 1.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1. Meningkatnya Jaminan keamanan peredaran makanan	Cakupan TPM (62%) dan TTU (84%) yang memenuhi syarat kesehatan	TPM (65%) TTU (85%)	71,500	TPM (70%) TTU (87%)	78,650	TPM (75%) TTU (90%)	86,515	TPM (80%) TTU (95%)	95,167	TPM (85%) TTU (100%)	104,683	TPM (85%) TTU (100%)	104,683	Dinkes
				1.02 1.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil Persalinan oleh tenaga kesehatan	AKI (7) AKB (31) BBLR (3%)	AKI (5) AKB (25) BBLR (2,8%)	546,017	AKI (4) AKB (18) BBLR (2,4%)	546,017	AKI (3) AKB (13) BBLR (2,0%)	546,017	AKI (2) AKB (7) BBLR (1,7%)	546,017	AKI (0) AKB (0) BBLR (1,5%)	546,017	AKI (0) AKB (0) BBLR (1,5%)	2,730,086	Dinkes dan RSUD
				1.02 1.33 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1. Ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan	100%	138,107	151,918	167,110	183,821	202,203	0%	202,203	0%	202,203	0%	202,203	Dinkes	
<b>Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																			
3	<b>Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi serta penanggulangan HIV/AIDS</b>	a. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 3 %  b. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-laki /perempuan		1.12 1.15 Program Keluarga Berencana	1. Pengendalian angka kelahiran (TFR)	3.60%	3.50%	347,160	3.35%	381,876	3.20%	420,063	3.10%	492,069	3%	508,276	3%	2,149,444	Badan KB/KS
				1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Jumlah PUS dibawah 20 th.  2. Penyuluhan HIV Aids	3.50%	3.30%	110,000	3.00%	121,000	2.80%	133,110	2.60%	146,000	2.30%	130,000	2.30%	640,110	Badan KB/KS
				1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi	1. Peserta KB dari PUS unmet need/menurunnya PUS Unmet need	21%	20.38%	75,000	19.63%	82,500	18.87%	90,750	18.11%	94,825	17.35%	109,807	17.35%	452,882	Badan KB/KS
				1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD Mandiri)	35.23%	46.61%	59,800	59.94%	76,900	73.27%	94,000	85.81%	101,000	100%	128,300	100%	460,000	Badan KB/KS

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)		
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)				
				1.12 1.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	1. Frekuensi Promosi kesehatan Ibu Bayi dan Anak	1 Kali Sosialisasi ke 33 Kelompok BKB	1 Kali	8,094	1 Kali	8,094	1 Kali	8,094	1 Kali	8,094	1 Kali	8,094	5 Kali	40,469	Badan KB/KS
				1.12 1.20	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1. Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan	34 Kel.	11	15,000	10	15,000	10	15,000	10	15,000	10	15,000	51	75,000	Badan KB/KS
		c. Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS		1.12 1.21	Program Peningkatan pengurangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	15,000	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	15,000	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	15,000	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	15,000	1 Kali Sosialisasi dan Advokasi	5 Kali Sosialisasi dan Advokasi	75,000	Badan KB/KS	
						2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan pemerintah tentang bahaya HIV/AIDS	365 kasus ( HIV 273 kasus dan AIDS 92 kasus)		718,500		764,000		803,400		856,700		915,000		4,057,600	KPAD Kota Kupang
				1.12 1.22	Program Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1. Meningkatnya Kualitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		cetak 500 lmr liflet/brosur	15,000	cetak 1000 lmr liflet/brosur	30,000	cetak 1500 lmr liflet/brosur	45,000	cetak 2000 lmr liflet/brosur	60,000	cetak 2500 lmr liflet/brosur	75,000	cetak 7500 lmr liflet/brosur	225,000	Badan KB/KS, Setda
				1.12 1.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Kelompok aktif BK	37.70%	50%	75,000	62.29%	75,000	74.59%	75,000	87.70%	75,000	1	75,000	1	375,000	Badan KB/KS
				1.12 1.24	Program penyempurnaan model operasional BKB-Posyandu - PADU	1. Meningkatnya pelayanan BKB-Posyandu-PADU	43.20%	54.32%	3,500	65.43%	4,000	76.54%	4,500	87.65%	5,000	100%	5,300	100%	22,300	Badan KB/KS, BP MK

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)			
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)					
				1.12 1.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KIE/Advokasi KB	1. Meningkatnya pelayanan KIE/Advokasi KB	39,22%	49,02%	25.000	62,75%	28,160	76,47%	37,752	88,24%	47,916	100%	52,708	100%	191,536	Badan KB/KS	
<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>																					
4	Fasilitas pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	a. Menekan angka pengangguran		1.14 1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 2.310 orang	32 orang	104	332,748	1040	450000	120	450,000	120	450000	120	450,000	584	2175000	Dinas Nakertrans	
							7 orang	7	70.000	9	90,000	11	110,000	13	130,000	15	150,000	55	550,000	Dinas Nakertrans	
		b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		1.14 1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Menurunnya jumlah pengangguran sebesar 2,5%	32	104	156,000	104	156,000	120	180,000	120	180,000	120	180,000	568	852,000	Dinas Nakertrans	
							4.402 Org	5.780 org	-	6.500 org	-	7.012 org	6.200 Org	-	8.200 Orang	-	33.612 org	-	Dinas Nakertrans		
		c. Meningkatnya perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja		1.14 1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan (45,8 %)	100 Pershn	200	160.700	250	175000	300	300000	350	350000	400	400000	100%	1385000	Dinas Nakertrans	
							120 org	100 org	24.000	100 org	24,000	100 org	24,000	100 org	24,000	100 org	24,000	500 org	120,000	Dinas Nakertrans,	
							2. Menurunnya angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % per tahun	300 Pershn	250 perushn	50.000	250 perushn	50,000	250 perushn	50,000	250 perushn	50,000	250 perushn	50,000	1.250 perushn	250,000	Dinas Nakertrans,
							3. Meningkatnya kerjasama perlindungan tenaga kerja (PPPKB, LKS, Bipartit, Tripartit dan Jamsostek)														



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)		
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)				
<b>Urusan Kebudayaan</b>																				
5.	Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat	a. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah dan benda cagar budaya;  b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal;		1.17 1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 20 % per tahun	10 sanggar	12 sanggar	23.000	14 sanggar	26.000	16 sanggar	31.000	18 sanggar	36.000	20 sanggar	46.000	20 sanggar	162.000	Disbudpar
				1.17 1.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 20 % per tahun	1 Situs	1 Situs	72.000	1 Situs	72.000	1 Situs	72.000	1 Situs	72.000	1 Situs	72.000	6 Situs	360.000	Disbudpar
				1.17 1.17	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	- Meningkatkan kegiatan Pengelolaan Keneragaman Budaya.	1 paket Festival Budaya	1 paket Festival Budaya	7.500	1 paket Festival Budaya	7.500	1 paket Festival Budaya	7.500	1 paket Festival Budaya	7.500	1 paket Festival Budaya	7.500	1 paket Festival Budaya	37.500	Disbudpar
				1.17 1.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Terwujudnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya koordinasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1 kali koordinasi	1 kali pelatihan	25.000	1 kali koordinasi	27.000	1 kali koordinasi	27.000	1 kali koordinasi	27.000	1 kalipelatihan	30.000	3 kali koordinasi dan 2 kali pelatihan	136.000
<b>Urusan Pemuda dan Olahraga</b>																				
6	Pembinaan dan Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai	a. Meningkatkan peran serta aktif generasi muda dalam pembangunan  b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga  c. Meningkatkan budaya olahraga masyarakat		1.18 1.15	Program Pengembangan dan Kekerjasama Kebijakan Pemuda	- Terwujudnya Pengembangan dan Kekerjasama Kebijakan Pemuda	-	15 Org	20.000	20 Org	23.000	30 Org	26.450	40 Org	30.418	50 Org	34.980	50 Org	134.848	Dinas PPO
				1.18 1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	- Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	-	10 Org	50.000	60 Org	57.500	70 Org	66.125	90 Org	76.044	100 Org	87.450	100 Org	337.119	Dinas PPO
				1.18 1.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	- Meningkatnya SDM Kepemudaan	-	20 Org	75.000	35 org	86.250	40 Org	99.188	45 org	114.066	50 Org	131.175	50 Org	505.679	Dinas PPO

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribuan)	
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)	Target	Rp. (Ribuan)			
		d. Meningkatnya prestasi olahraga		1.18 1.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	- Meningkatnya Pemahaman Pemuda tentang bahaya Penyalahgunaan Narkoba	-													Dinas PPO
				1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	- Meningkatnya Kualitas SDM dan Sistem Manajemen Olah Raga	-													Dinas PPO
				1.18 1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	- Meningkatnya Prestasi Kepemudaan di Bidang Olah Raga	-	3 Kegiatan	425,000	4 Kegiatan	488,750	5 Kegiatan	562,063	6 Kegiatan	646,372	7 Kegiatan	743,328	7 Kegiatan	2,865,512	Dinas PPO
				1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga yang memadai	2 Kegiatan	3 Kegiatan	350,000	1 Kegiatan	402,500	1 Kegiatan	462,875	1 Kegiatan	531,306	3 Kegiatan	611,002	3 Kegiatan	2,357,684	Dinas PPO
<b>Urusan Perpustakaan</b>																			
7.	<b>Pengembangan pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT</b>	a. Meningkatkan minat baca masyarakat  b. Meningkatnya pelestarian dan koleksi bahan pustaka  c. Tersedianya perpustakaan Kota Kupang yang berbasis IT		1.26.1.15 Program pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	51 Perpustakaan Kelurahan ; 160 Perpustakaan Sekolah ; 10 Perpustakaan Puskesmas dan 1 Perpustakaan Keliling	100%	567,000	100%	710,100	100%	750,500	100%	800,000	100%	850,000	100%	3,677,600	Badan Perpustakaan dan Kantor Arsip Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017

**VISI** : " MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN"  
**MISI III** : Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakkan Supremasi Hukum  
 (dalam Ribu)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																				
1.	Pembangunan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip Good Governance	a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum	1.19.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbang, Pol&Linmas, Satpol PP
		b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada					2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c. Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		1.19.1.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Terselenggaranya Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta	39 orang	-	-	200 orang	100,000	98 orang	150,000	-	-	250 orang	250,000	584 orang	500,000	Setda(Bag. Sos)
		d. Meningkatnya toleransi kerukunan hidup beragama				2. Meningkatnya kesadaran kerukunan hidup inter dan antar umat beragama	2 Paket 594.220.500	2 Paket (Ut Sawa dan Mudika)	957,500	3 Paket (Pesparawi, Ut Sawa)	1.825.000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																				
				1.20.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Pembahasan rancangan peraturan daerah	paket	paket	135,240	paket	149,000	paket	163,900	paket	180,000	paket	198,000	paket	826,140	Setwan
						2. Terlaksananya Rapat alat kelengkapan dewan	48 kali	48 kali	120,000	48 kali	132,000	48 kali	145,200	48 kali	159,720	48 kali	175,692	240 kali	732,612	Setwan
						3. Reses Anggota DPRD	30 orang	30 orang	900,000	40 orang	1,050,000	40 orang	1,200,000	40 orang	1,200,000	40 orang	1,200,000	40 orang	5,550,000	Setwan

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	30 orang	30 orang	3,660,000	40 orang	4,880,000	40 orang	5,368,000	40 orang	5,904,800	40 orang	6,495,000	40 orang	26,307,800	Satwan
					5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah	30 orang	30 orang	300,000	40 orang	350,000	40 orang	408,300	40 orang	416,500	40 orang	424,800	40 orang	1,899,600	Satwan
					6 Fasilitas dan penyediaan jasa advokasi DPRD	1 paket	30 orang	50,000	40 orang	58,500	40 orang	78,000	40 orang	80,000	40 orang	81,600	40 orang	348,100	Satwan
					7 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	paket	1 paket	15,000	1 paket	16,500	1 paket	18,200	1 paket	20,000	1 paket	22,000	1 paket	91,700	Satwan
					8 Rapat-rapat paripurna	paket	1 paket	335,000	1 paket	341,700	1 paket	348,500	1 paket	355,500	1 paket	362,600	1 paket	1,743,300	Satwan
<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>																			
2.	<b>Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city</b>	a. Meningkatnya kualitas informasi pemerintahan melalui <i>electronic government</i> di lingkungan Pemerintahan Kota Kupang		1.06 1.15 Program Pengembangan Data/Informasi	- Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasiya	Terbitnya buku Penyebaran Informasi Pembangunan	300 buku	35,000	300 buku	35,000	300 buku	35,000	300 buku	35,000	300 buku	35,000	1500 buku	175,000	Bappeda
				1.06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan	- Tingkat kemandirian kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	Kerjasama dengan LSM/NGO sudah mulai terjalin dan perlu dilanjutkan	Kerjasama dengan semua LSM NGO yang beroperasi di Kota Kupang	100,000	Kerjasama dengan semua LSM NGO yang beroperasi di Kota Kupang	100,000	Kerjasama dengan semua LSM/NGO yang beroperasi di Kota Kupang	100,000	Kerjasama dengan semua LSM/NGO yang beroperasi di Kota Kupang	100,000	Kerjasama dengan semua LSM/NGO yang beroperasi di Kota Kupang	100,000	Kerjasama dengan semua LSM/NGO yang beroperasi di Kota Kupang	500,000	Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)			
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah	Paket	125,000	Paket	125000	Paket	125000	Paket	125000	Paket	125000	Paket	625,000	Bappeda		
						Koordinasi kerjasama dan pengendalian program bantuan luar negeri, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lainnya	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	4 dokumen laporan Koordinasi, 75 buku	100,000	100,000	Bappeda	
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	20 kali	500,000	Bappeda
				1.06 1.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Koordinasi Pembentukan Sekretariat Terpadu	SK, 2 kali rapat	30,000	1 paket, 2 kali koord	100,000	2 kali koordinasi	50,000	2 kali koordinasi	50,000	2 kali koordinasi	50,000	10 kali koordinasi	280,000	Bappeda		
				1.06 1.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	- Tingkat kemandirian wilayah strategis dan cepat tumbuh di kawasan strategis provinsi dan kota	-	-	Dokumen, 2 kali koordinasi	75,000	Dokumen, 2 kali koordinasi	75,000	Dokumen, 2 kali koordinasi	75,000	Dokumen, 2 kali koordinasi	75,000	Dokumen, 8 kali koordinasi	300,000	Bappeda		
				1.06 1.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	49 Kel	75,000	51 Kel	75,000	51 Kel	75,000	51 Kel	75,000	51 Kel	75,000	51 Kel	375,000	Bappeda	
						- Terlaksananya koordinasi, konsolidasi, konsultasi, movev	Koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah (PNPM)	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	200,000	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	200,000	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	200,000	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	200,000	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	200,000	Rapat koordinasi 2 kali dan dokumen	1,000,000	Bappeda	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana		1.06 1.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	4 kali	100,000	20 kali	500,000	Bappeda	
		c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		1.06 1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi RPJMD Kota Kupang tahun 2013-2017	-	-	-	-	Evaluasi RPJMD	200,000	-	-	Evaluasi RPJMD	50,000	-	250,000	Bappeda	
					2. Tersusunnya Rancangan Dokumen RKPD	Dokumen RKPD tersusun tiap tahun	1 dokumen	80,000	1 dokumen	80,000	1 dokumen	80,000	1 dokumen	80,000	1 dokumen	80,000	1 dokumen	80,000	400,000	Bappeda
					3. Terselenggaranya Musrenbang RKKPD	Musrenbang dilaksanakan tiap tahun	1 kali	350,000	1 kali	350,000	1 kali	350,000	1 kali	350,000	1 kali	350,000	1 kali	350,000	1,750,000	Bappeda
					4. Penetapan dokumen RKKPD	Tersedianya dokumen RKKPD	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	5 dokumen	50,000	Bappeda	
					5. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen Laporan kinerja pemerintah daerah	100 buku	120,000	100 buku	120,000	100 buku	120,000	100 buku	120,000	100 buku	120,000	500 buku	600,000	Setda Bag Pemerintahan	
					6. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Dokumen Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	100 buku	250,000	100 buku	250,000	100 buku	250,000	100 buku	250,000	100 buku	250,000	500 buku	1,250,000	Setda Bag Pemerintahan	
					7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Dokumen hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	2 dokumen	150,000	2 dokumen	150,000	2 dokumen	150,000	2 dokumen	150,000	2 dokumen	150,000	10 dokumen	750,000	Bappeda	
					8. Penyusunan KU APBD	Dokumen KU APBD	2 dokumen	200,000	2 dokumen	200,000	2 dokumen	200,000	2 dokumen	200,000	2 dokumen	200,000	10 dokumen	1,000,000	Bappeda	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				1.06 1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	9. Penyusunan LAKIP Walikota Kupang	Dokumen LAKIP Walikota Kupang	1 dokumen	85,000	1 dokumen	85,000	1 dokumen	85,000	1 dokumen	85,000	1 dokumen	85,000	5 dokumen	425,000	Bag. Orta
					10. Penyusunan penetapan kinerja SKPD	Dokumen penetapan kinerja SKPD	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	10 dokumen RKT/PKK	375,000	Bag. Orta
					1. Terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang pembangunan Ekonomi	Dokumen dan 2 kali Monev	Dokumen dan 2 kali Monev	100,000	Dokumen dan 2 kali Monev	100,000	Dokumen dan 2 kali Monev	100,000	Dokumen dan 2 kali Monev	100,000	Dokumen dan 2 kali Monev	100,000	10 kali	500,000	Bappeda
					2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	10 kelurahan Anggaran Merah	20 Kel	100,000	20 Kel	100,000	20 Kel	100,000	20 Kel	100,000	20 Kel	100,000	20 Kel	500,000	Bappeda dan BPMK
					3. Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 4 kali, dokumen	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 20 kali, dokumen	1,000,000	Bappeda
					4. Pemberdayaan lingkungan perkotaan berbasis komunitas	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (1 Kel)	50,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (2 Kel)	100,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (3 Kel)	150,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (4 Kel)	200,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (5 Kel)	250,000	Koordinasi, konsultasi, Monev 2 kali, dokumen (5 Kel)	750,000	Bappeda
					5. Kajian penataan dan pembinaan pedagang kaki lima	-	3 lokasi	100,000	4 lokasi	150,000	-	-	-	-	-	-	7 Lokasi	250,000	Litbang
					6. Kajian peningkatan Daya saing UMKM	-	-	-	6 Kecamatan	400,000	-	-	-	-	-	-	6 Kec	400,000	Litbang
					7. Kajian Program Pemberdayaan ekonomi	-	-	-	-	-	51 Kel	500,000	-	-	-	-	51 Kec	500,000	Litbang

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					8 Kajian Potensi PAD dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi parkir		1 dokumen	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	240,000	Litbang
				1.06 1.23 Program Perencanaan Sosial Budaya	1. Terlaksananya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Dokumen dan 2 kali Monev	Dokumen dan 2 kali Monev	125,000	Dokumen dan 2 kali Monev	125,000	Dokumen dan 2 kali Monev	125,000	Dokumen dan 2 kali Monev	125,000	Dokumen dan 2 kali Monev	125,000	Dokumen dan 10 kali Monev	625,000	Bappeda
					2 Kajian tentang mutu pendidikan di Kota Kupang	-	-	-	SD, SMP, SMU/SMK	250,000	-	-	-	-	-	-	SD, SMP, SMU/SMK	250,000	Litbang
					3 Kajian pelayanan kesehatan RSUD Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	RSUD	250,000	-	-	RSUD	250,000	Litbang
				1.06 1.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1. Terlaksananya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayah	Dokumen dan 2 kali Monev	Dokumen dan 2 kali Monev	80,000	Dokumen dan 2 kali Monev	80,000	Dokumen dan 2 kali Monev	80,000	Dokumen dan 2 kali Monev	80,000	Dokumen dan 2 kali Monev	80,000	Dokumen dan 10 kali Monev	400,000	Bappeda
				1.06 1.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan	1. Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 2012	6 BKM	4 BKM	200,000	4 BKM	200,000	4 BKM	200,000	4 BKM	200,000	4 BKM	200,000	26 BKM	1,000,000	Bappeda
					2 Kajian tentang pencrapan PP 41 tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat daerah	-	-	-	SKPD se Kota Kupang	250,000	-	-	-	-	-	-	SKPD se Kota Kupang	250,000	Litbang



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Pertanahan</b>																			
				1.09 1.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	251 bidang	6 bidang	930,900	5 bidang	4,000,000	5 bidang	4,500,000	5 bidang	5,000,000	5 bidang	5,500,000	20 bidang	19,930,900	Sekretariat Daerah (Bag. Pem)
					2 Penertiban tanah pemerintah	1455 pilar	100 pilar, 17 papan, pengamanaan dan penertiban	135,000	100 pilar, 17 papan, pengamanaan dan penertiban	142,000	100 pilar, 17 papan, pengamanaan dan penertiban	148,000	100 pilar, 17 papan, pengamanaan dan penertiban	154,000	100 pilar, 17 papan, pengamanaan dan penertiban	160,000	500 pilar, 85 papan, pengamanaan dan penertiban	739,000	Sekretariat Daerah (Bag. Pem)
				1.09 1.19 Program Pengelolaan Tanah	3 Perschatian batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan	4 Kelurahan	5 Kelurahan	85,000	11 Kelurahan	175,000	11 Kelurahan	184,000	11 Kelurahan	193,000	11 Kelurahan	202,000	54 kel	839,000	Sekretariat Daerah (Bag. Pem)
					4 Kajian persehatian batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	Kec. Alak, Kec Ocbobo	250,000	Kec. Kelapa Lima, Kec Koia lama	250,000	Kec. Kota raja, Kec. Maulafa	250,000			6 Kec, 51 Kelurahan	750,000	Litbang
<b>Urusan Statistik</b>																			
				1.23 1.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	- Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	Buku Koia Kupang dalam Angka, Kecamatan dalam angka, PDRB, Indikator Ekonomi, dan Indikator Kcsra	5 dokumen, (@ 500 buku)	225,000	7 dokumen, (@ 500 buku)	250,000	7 dokumen, (@ 500 buku)	275,000	7 dokumen, (@ 500 buku)	300,000	7 dokumen, (@ 500 buku)	325,000	33 dokumen (2500 buku)	1,375,000	Bappda dan BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																				
3.	Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.20.1.17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah  2. Tersedianya Aparatur Pengelola Barang Daerah yang berkualitas serta tersedianya dokumen Inventarisasi Barang Daerah yang akurat  3 Tersedianya produk hukum (Perda, Perwali) sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya SDM aparatur pengelolaan keuangan daerah yang handal	62,104,555,364	15%	71,420,239	15%	82,133,275	15%	94,453,266	15%	108,621,256	15%	124,914,444				Dispenkcuk
		b. Perda dan Perwali APBD Kota Kupang				3 dokumen, 150 peserta bintek	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	637,900	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	669,795	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	703,285	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	738,449	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	775,371	100% (3 dokumen, 150 peserta bintek)	3,524,800	Setda (Bagian Umum dan Perlingkapan)	
		c. Optimalisasi pengelolaan asset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data asset yang akurat			1. Tertib administrasi keuangan daerah  2. Akuntabilitas administrasi keuangan daerah	10 produk hukum														

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		c. Terwujudnya terib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota	3. Ketersediaan pramata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah															Dispenkeu, Setda
				1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah	4. Terbentuk unit pelayanan pengadaan (ULP) Kota Kupang															Dispenkeu, Setda
				1.20.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	5. Ketersediaan pramata pelaksanaan pembangunan di Kota Kupang															
					- Tingkat kemampuan/kapasitas aparatur dalam															
					1. Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah															
					2. Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah															
					1 Tersedianya buku sisdu pengelolaan keuangan daerah	200 buku	200 buku	85,000			200 buku	97,700			200 buku	112,400	600 buku	295,100		
					2 Tersedianya Nota Keuangan, dan Ranperda APBD (murni dan perubahan )	1200 buku	1200 buku	978,500	1200 buku	1,076,000	1200 buku	1,183,000	1200 buku	1,301,000	1200 bk	1,432,000	6000 buku	5,970,500		

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 Tersedianya Perwali Penjabaran APBD (murni dan perubahan)	600 buku	600 buku	703,000	600 buku	773,000	600 buku	850,000	600 buku	935,000	600 buku	1,029,000	3000 buku	4,290,000	
					4 Tersedianya buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200 buku	200 buku	385,000	200 buku	443,000	200 buku	509,000	200 buku	585,000	200 buku	575,000	1000 buku	2,497,000	
					5 Tersedianya buku penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	300 buku	300 buku	145,800	300 buku	167,600	300 buku	192,700	300 buku	221,000	300 buku	254,000	1500 buku	981,100	
					6 Terlaksananya sosialisasi sisdu pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan Perda APBD	300 aparatur	300 aparatur	200,000	300 aparatur	230,000	300 aparatur	264,500	300 aparatur	304,000	300 aparatur	349,000	1500 aparatur	1,347,500	
					7 Meningkatnya pengetahuan aparatur pengelola keuangan	200 aparatur	200 aparatur	420,000	200 aparatur	483,000	200 aparatur	555,000	200 aparatur	638,000	200 aparatur	734,000	1000 aparatur	2,830,000	
					8 Tersedianya buku standarisasi sistem akuntansi pemerintah daerah	200 buku	200 buku	85,000			200 buku	97,800			200 buku	112,400	600 buku	295,200	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab						
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)							
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																									
4.	Pembangunan budaya kerja aparatur yang professional, bersih, beretika dan berwibawa serta anti KKN dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta system informasi manajemen yang transparan	a. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, berwibawa serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel		1.20 1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH	6 Laporan	100%	1,500,000	100%	1,575,000	100%	1,653,750	100%	1,736,438	100%	1,823,259	100%	8,288,447	Setda					
					Tersedianya Informasi Timbal balik Pemerintah dan Masyarakat.																	Setda (Bagian Umum dan Perlengkapan)			
		b. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah		1.20 1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler sesuai program kerja pengawasan tahunan	167	167	638,775	167	702,653	167	772,918	167	850,210	167	935,230	167	3,899,786	167	3,899,786	Setda, Inspektora		
						2.	Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	-	18	170,100	18	187,110	18	205,821	18	226,403	18	249,043	18	249,043	18	1,038,477	18	1,038,477	Inspektora
						3.	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat	65	65	497,250	65	546,975	65	601,673	65	661,839	65	728,024	65	728,024	65	3,035,761	65	3,035,761	Inspektora
						4.	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	55%	58%	189,489	62%	208,438	66%	229,282	70%	252,210	70%	277,431	75%	1,156,850	75%	1,156,850	75%	1,156,850	Inspektora
5.	Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	146,500	100%	161,150	100%	177,265	100%	194,992	100%	214,491	100%	214,491	100%	894,398	100%	894,398	Inspektora						

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					6. Terlaksananya kegiatan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan	100%	100%	36,000	100%	39,600	100%	43,360	100%	47,916	100%	52,708	100%	219,584	Inspektorat
		c. Peningkatan hubungan kerjasama antara swasta, pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain, Propinsi, Pusat dan Luar Negeri		1.20.1.21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Tersedianya tenaga fungsional bersertifikat	5	15	341,250	15	242,500	15	266,750	15	293,425	15	161,384	50	1,011,884	Inspektorat
					2. Meningkatnya pengetahuan teknis pemeriksa	1	10	146,250	10	160,875	10	176,963	10	194,659	10	214,125	50	698,213	Inspektorat
					3. Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan	15	15	485,000	15	533,500	15	586,850	15	645,535	15	710,089	75	2,315,439	Inspektorat
		d. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		1.20.1.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	- Terlaksananya kebijakan dan pelaporan hasil pengawasan	232	250	76,500	250	84,150	250	92,565	250	101,822	250	112,004	1,250	467,041	Inspektorat
				1.20.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Meningkatnya kualitas akses Informasi bagi Masyarakat dan Pemerintah	13 ljin	54 ljin	784,053	118 ljin	862,458	118 ljin	948,704	118 ljin	1,043,575	118 ljin	1,147,932	118 ljin	4,786,722	BPPT
					2. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	10%	20%	29,000	30%	32,000	40%	37,500	50%	45,000	60%	52,000	100%	195,000	Setda (PDE)
					3. Jumlah Web Kota yang aktif.	4	9	20,000	9	25,000	9	30,000	9	35,000	9	42,000	9	152,000	Setda (PDF)
					4. Jumlah SKPD yg terpasang jaringan internet	5	9	237,540	9	315,417	9	344,922	9	422,802	9	750,734	9	2,071,415	Setda (PDE)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.20 1.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-- Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	20 kasus	5 kasus	175,000	6 kasus	210,000	7 kasus	245,000	7 kasus	245,000	8 kasus	280,000	38 kasus	1,155,000	Setda
				1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembaga/institusi	8 MOU	9 MOU	425,000	10 MOU	467,000	11 MOU	51,409	12 MOU	56,550	13 MOU	62,205	55 MOU	1,062,164	Bappeda
					2. Jumlah perjanjian/ kerjasama kemiripan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan	8 MOU	9 MOU	425,000	10 MOU	467,000	11 MOU	51,409	12 MOU	56,550	13 MOU	62,205	55 MOU	1,062,164	Bappeda
					3. Jumlah kegiatan kerjasama kemiripan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembaga pemerintah daerah (kegiatan/dialog/workshop/pameran dll)														
		c. Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan Pemerintah		1.20 1.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwali	23	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	Setda
					2. Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	2	2	20,000	2	20,000	3	30,000	2	20,000	3	30,000	14	120,000	
					3. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	23	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	Setda, Kominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4. Pranata Retribusi Kebersihan				Perda	60,000	-	-	-	-	-	-	Perda	60,000	Dinas Kebersihan dan pertamanan
					5. Pembuatan dan Revisi Perda RSUD Kota Kupang	Perda retribusi dan Master plan RSU	(100%) Revisi Perda Retribusi dan Master Plan	500,000	(100%) Perda SPM dan Strukt Pelayan	200,000	-	-	-	-	-	-	100%	700,000	RSUD
		f. Meningkatnya kinerja lembaga/aparat ur		1.20 1.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	1. Terlaksananya rintisan keurahan sebagai SKPD dan 51 Kelurahan	-	10	60,000	10	60,000	10	60,000	10	60,000	11	65,000	51	305,000	Setda (bag. Orta)
					2. Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi/kelmb agaan penyelenggaraan pemerintahan.	37 SKPD	37 SKPD	70,000	37 SKPD	70,000	37 SKPD	75,000	37 SKPD	75,000	37 SKPD	80,000	37 SKPD	370,000	Setda (bag. Orta)
					3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan	-	50 Dokumen	70,000	50 Dokumen	70,000	50 Dokumen	75,000	50 Dokumen	75,000	50 Dokumen	80,000	50 Dokumen	370,000	Setda (Bag. Orta)
					4. Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD														Setda (Bag. Orta)
					5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan														BPPT, Setda



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		g. Meningkatnya kualitas pembangunan		1.20.04.32 Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan	3 dokumen	100% (3 dok)	131,000	100% (3 dokumen)	131,000	100% (3 dok)	131,000	100% (3 dok)	131,000	100% (3 dok)	131,000	100% (15 dokumen)	655,000	Setda(Ekban g)
				1.20.04.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	Terpublikasinya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%	100%	235,000	100%	235,000	100%	235,000	100%	235,000	100%	235,000	100%	1,175,000	Setda(Ekban g)
					Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	-	paket	350,000	paket	400,000	paket	450,000	paket	500,000	paket	550,000	paket	2,250,000	BPPT
					Tersedianya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat dan Kualitas layanan kecamatan	-	2 dokumen	432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1. dokumen	432,000	Litbang
					Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	paket	paket	36,400	paket	38,200	paket	40,000	paket	41,800	paket	43,600	paket	200,000	Setda (bag. Pem)
				1.20.04.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Daerah	Tersedianya data dan informasi sumber-sumber PAD (SITU, SITP MB) yang akurat.	100%	20%	85,000	40%	85,000	60%	85,000	80%	85,000	100%	85,000	100%	425,000	Setda(Ekban g)
				1.20.04.1. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Meningkatnya akses informasi berbasis IT	-	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	750,000	Setda(Ekban g)
				1.20.1.41 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1. Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorar	-	230 orang	1,137,000	370 orang	1,730,000	370 orang	1,730,000	370 orang	1,730,000	370 orang	1,730,000	1,710	8,057,000	Badan Diklat

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					2. Pengiriman Diklat Pim Tk II	-	10 orang	553,000	18	950,000	18	950,000	18	950,000	18	950,000	82	4,353,000	Badan Diklat
					PIM Tk III	-	20	545,000	20	545,000	20	545,000	20	545,000	20	545,000	100	2,725,000	
					PIM Tk IV	-	40	950,000	40	950,000	40	950,000	40	950,000	40	950,000	200	4,750,000	
					Diklat Teknis Fungsional	-	180	280,000	200	315,000	225	400,000	250	450,000	300	525,000	1155	1,970,000	
			1.20	1.42	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Persentase jumlah apratur pemerintah yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	50 orang	183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	183,000	Seida (Bag. Orta)
					2. Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan														
					3. Terpenuhinya Hak PNS yang Pensiun dan Menduduki Jabatan	BUP 91 Orang Janda 7 Orang Duda 4 Orang Jumlah 102 Orang	BUP 100 Orang Janda 10 Orang Duda 8 Orang Jumlah 118 Orang	229,600	BUP 110 Orang Janda 15 Orang Duda 12 Orang Jumlah 137 Orang	230,000	BUP 115 Orang Janda 20 Orang Duda 20 Orang Jumlah 145 Orang	250,000	BUP 120 Orang Janda 25 Orang Duda 25 Orang Jumlah 170 Orang	255,000	BUP 125 Orang Janda 30 Orang Duda 30 Orang Jumlah 185 Orang	260,000	BUP 125 Orang Janda 30 Orang Duda 30 Orang Jumlah 185 Orang	1,224,600	BKD
					4. Terpenuhinya Kebutuhan PNSD Kota Kupang Sesuai Formasi	Tidak Ada Penerimaan PNS Akan Tetapi Pengangkatan Tenaga PTT Menjadi PNS Sebanyak 218 Orang	210 Orang	1,202,500	305 Orang	1,230,000	405 Orang	1,250,000	505 Orang	1,300,000	605 Orang	1,350,000	2,030	6,332,500	BKD
					5. Pengambilan Sumpah PNS	550 Orang	450 Org	451,000	300 Org	320,000	250 Org	300,000	200 Org	250,000	150 Org	200,000	1,350 Org	1,521,000	BKD

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6.	Terpenuhinya Hak PNSD yang Naik Pangkat Periode April & Oktober				1.252 Orang	1.350 Org	571,000	1.450 Org	600,000	1.550 Orang	620,000	1.650 Orang	640,000	1.775 Orang	650,000	7.775 Orang	3,081,000	BKD	
7.	Terpenuhinya Hak PNSD Dalam Pemilikan KARIS, KARSU/ KARPEFG Serta Tersedianya Kelengkapan File				KARIS 209 Orang, KARSU 244 Orang, KARPEFG 295 Orang	KARIS 215 Orang, KARSU 230 Orang, KARPEFG 497 Orang	278,000	KARIS 230 Orang, KARSU 235 Orang, KARPEFG 510 Orang	279,000	KARIS 245 Orang, KARSU 250 Orang, KARPEFG 525 Orang	281,000	KARIS 265 Orang, KARSU 270 Orang, KARPEFG 555 Orang	283,000	KARIS 286 Orang, KARSU 290 Orang, KARPEFG 580 Orang	285,000	KARIS 1.241 Orang, KARSU 1.275 Orang, KARPEFG 2.667 Orang	1,406,000	BKD	
8.	Pemberian Satya Lencana				323 Orang	350 Orang	97,000	450 Orang	98,000	550 Orang	100,000	650 Orang	120,000	750 Orang	14,000	2.750 Orang	429,000	BKD	
9.	Terselesaikannya Kasus Pelanggaran Disiplin				20	17	217,500	15	200,000	13	180,000	10	160,000	5	140,000	60	897,500	BKD	
10.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur				Tugas Belajar 48 Orang, Ijin Belajar 124 Orang	Tugas Belajar 70 Orang, Ijin Belajar 145 Orang	1,018,200	Tugas Belajar 100 Orang, Ijin Belajar 147 Orang	1,020,000	Tugas Belajar 85 Orang, Ijin Belajar 175 Orang	1,022,000	Tugas Belajar 100 Orang, Ijin Belajar 195 Orang	1,024,000	Tugas Belajar 115 Orang, Ijin Belajar 165 Orang	1,026,000	Tugas Belajar 470 Orang, Ijin Belajar 827 Orang	5,110,200	BKD	
11.	Seleksi Calon Praja IPDN				8 Orang	10 Orang	70,000	12 Orang	80,000	14 Orang	90,000	16 Orang	100,000	18 Orang	110,000	70 Orang	450,000	BKD	
12.	Mutasi Wilayah Kerja				Pindah Masuk 106 Orang, Pindah Keluar 33 Orang, Titipan 50 Orang	Pindah Masuk 120 Orang, Pindah Keluar 40 Orang, Titipan 55 Orang	100,000	Pindah Masuk 130 Orang, Pindah Keluar 50 Orang, Titipan 60 Orang	110,000	Pindah Masuk 145 Orang, Pindah Keluar 60 Orang, Titipan 70 Orang	120,000	Pindah Masuk 155 Orang, Pindah Keluar 70 Orang, Titipan 80 Orang	130,000	Pindah Masuk 175 Orang, Pindah Keluar 90 Orang, Titipan 90 Orang	140,000	Pindah Masuk 725 Orang, Pindah Keluar 310 Orang, Titipan 355 Orang	600,000	BKD	
13.	Pelayanan TAPERUM					1 Paket	12,000	1 Paket	12,000	1 Paket	12,000	1 Paket	12,000	1 Paket	12,000	1 Paket	60,000	BKD	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																			
5	Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima.	a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat  b. Meningkatkan standar mutu pelayanan  c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi  d. Terwujudnya pengelolaan terrib administrasi kependudukan		1.10 1.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Rasio Penduduk ber-KTP : - sudah ber-KTP - Belum ber-KTP 2. Rasio Bayi berakic kelahiran 3. Rasio Pasangan berakic nikah 4. Rasio keluarga ber KK 5. Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran/1000 6. Rasio penduduk ber NIK 7. Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian 8. Rasio penduduk meninggal berakta kematian 9. Tersedianya pranata dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam terrib administrasi kependudukan	369.800, sudah ber-KTP 151.016, belum ber-KTP 218.791 48,942 26,663 127,061 125,807 492,104 206 3,355 8 Orang 8 set	48,234 6,569 2,500 27,103 21,135 502,036 47 505 6 Orang 1 set	1,205,850 328,450 337,500 216,824 24,215 512,123 3,525 5,100 90,000 50,000	48,234 6,563 2,750 28,125 24,215 512,123 55 496 6 Orang 2 set	1,205,850 328,150 371,250 225,000 25,272 524,033 4,125 5,000 90,000 100,000	51,133 7,561 3,000 31,624 25,272 524,033 62 470 6 Orang 1 set	1,278,325 378,050 405,000 252,992 26,342 530,311 4,650 4,700 90,000 50,000	53,402 7,536 3,250 36,331 26,342 530,311 70 481 6 Orang 1 set	1,335,050 376,800 438,750 290,648 41,108 545,471 5,250 4,900 90,000 50,000	57,134 8,514 3,500 41,108 28,153 545,471 75 472 6 Orang 2 set	1,428,350 425,700 472,500 328,864 127,117 545,471 5,625 4,800 90,000 100,000	258,137 36,743 15,000 164,291 127,117 2,613,976 309 2,424 30 Orang 7 set	6,453,425 1,837,150 2,025,000 1,314,328 450,000 350,000	Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk Dinpenduk
<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan</b>																			
				1.20 1.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Meningkatnya kualitas akses Informasi bagi Masyarakat dan Pemerintah 2. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Jumlah Web Kota yang aktif, 4. Jumlah SKPD yg terpasang jaringan internet	13 Ijin 10% 4 5	54 Ijin 20% 9 9	784,100 29,000 20,000 237,540	118 Ijin 30% 9 9	862,500 32,000 25,000 315,417	118 Ijin 40% 9 9	948,800 37,500 30,000 344,922	118 Ijin 50% 9 9	1,043,600 45,000 35,000 422,802	118 Ijin 60% 9 9	1,148,000 52,000 42,000 750,734	118 Ijin 100% 9 9	4,787,000 195,000 152,000 2,071,415	BPPT Setda (PDF) Setda (PDE) Setda (PDE)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Kearsipan</b>																			
				1.24.1.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1. Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	17 SKPD	20 SKPD	31,000	25 SKPD	50,000	8 SKPD + 20 Kelurahan	65,000	31 Kelurahan	75,000	20 Sekolah Dasar	60,000	53 SKPD - 51 Kelurahan + 20 SD	281,000	Badan Perpustakaan dan kantor Arsip
				1.24.1.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Jumlah dokumen arsip daerah yang disklamatkan /dipelihara	7 SKPD	1 SKPD	50,000	3 SKPD	75,000	5 SKPD	85,000	5 SKPD	90,000	7 SKPD	100,000	21 SKPD	400,000	Badan Perpustakaan dan kantor Arsip
				1.24.1.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	1. Rasio ketersediaan Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	1860 Box Arsip	20 Rak Arsip	27,000	2000 box Arsip	75,000	Pembangunan Gedung Kantor Arsip	750,000	Pembangunan Depo Arsip	800,000	100 Rak Arsip	150,000	Gedung Kantor + Depo + 120 rak + 2000 Box Arsip	1,802,000	Badan Perpustakaan dan kantor Arsip
				1.24.1.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Aksesibilitas/ ketersediaan layanan informasi kearsipan	51 Kelurahan	Monitoring 51 Kelurahan	20,000	Monitoring 100 sekolah	50,000	Sosialisasi 53 SKPD	60,000	Bintek Kearsipan bagi 51 Kelurahan	75,000	Bintek kearsipan bagi Tata Usaha sekolah	100,000	51 Kel.+100 Sekolah / 53 SKPD	305,000	Badan Perpustakaan dan kantor Arsip, Kominfo
<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																			
6.	Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai	a. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Meningkatkan pemberdayaan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekai) lainnya		1.19.1.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	70%	20%	250,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	250,000	100%	1,250,000	Badan Kesbang, Pol&Linmas
				1.19.1.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Meningkatnya Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	80%	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	100%	1,750,000	Badan Kesbang, Pol&Linmas
				1.19.1.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan RI 2. Bertambahnya jumlah Pasutri 3. Upacara Hari-Hari Besar lainnya (Paska, Buka Pansa, Natal, Hut Kota, Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, Hardiknas, Harkitnas)	1,500 peserta upacara 300 Pasutri 3 paket	100% 325 Pasutri 8 paket	145,700 74,670 650,000	100% 350 Pasutri 8 paket	152,985 89,604 780,000	100% 375 Pasutri 8 paket	160,634 107,524 936,000	100% 400 Pasutri 8 paket	168,666 129,028 1,123,200	100% 425 Pasutri 8 paket	177,099 154,833 1,347,840	100% 1,875 Pasutri 8 paket	194,809 555,659 4,837,040	Setda (Bagian Umum dan Perencanaan) Setda (Bag. Sos) Setda (Bag. Sos)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab wab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					4. Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji	1 paket	1 paket	45,000	1 paket	54,000	1 paket	64,000	1 paket	77,000	1 paket	93,000	1 paket	333,000	Setda(Bag. Sos)	
					5. Terselenggaranya MTQ/STQ	32 orang	32 orang	40,000	32 orang	45,000	32 orang	50,000	32 orang	55,000	32 orang	60,000	160 orang	250,000	Setda(Bag. Sos)	
					6. Terselenggaranya Upacara Peringatan IIUT RI	70 orang	74 orang	812,750	74 orang	975,300	74 orang	1,170,000	74 orang	1,404,430	74 orang	168,530	74 orang	4,531,010	Setda(Bag. Sos)	
		c. Meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat (Limmas)		1.19.1.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah gangguan kamtibmas terkait ketertiban dan keamanan sebanyak 52 kasus	5%	200,000	7%	225,000	9%	250,000	12%	255,000	15%	265,000	48%	1,195,000	Badan Kesbang, Pol&Linmas, Satpol PP	
				2. Menurunnya jumlah pelanggaran perda 10 % per tahun	Pelanggaran Perda Sebanyak 157 Kasus	5%	400,000	8%	425,000	10%	450,000	14%	470,500	18%	500,000	55%	2,245,500	Badan Kesbang, Pol&Linmas, Satpol PP		
				1.19.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penyakit Masyarakat dalam Pemberantasan penyakit masyarakat	5%	100,000	9%	125,000	11%	140,000	15%	160,000	20%	175,000	60%	700,000	Badan Kesbang, Pol&Linmas, Satpol PP	
				1.19.1.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	60%	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	100%	500,000	Badan Kesbang, Pol&Linmas
				1.19.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya penanggulangan korban bencana alam														Badan Kesbang, Pol&Linmas, Setda, Badan Penanggulangan Bencana
					1.19.1.24	Program Hari Anti Narkoba Internasional	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba													Dinas Sosial dan PPO

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Informasi dan Komunikasi</b>																			
7.	Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsive	a. Meningkatkan keterbukaan informasi publik		1.25.1.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Jumlah SIM di SKPD yang terbangun														Kominfo
		b. Meningkatkan hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Masa			2. Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat	100%	-	-	50%	62,500	-	0	100%	125,000	100%	125,000	100%	312,500	Kominfo
		c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah			3. Jumlah peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 500 kali	80 kl	100 kl	16,000	100 kl	16,000	100 kl	16,000	100 kl	16,000	100 kl	16,000	500 kl	80,000	Kominfo, Setda
				4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi 100 %	75%	100%	121,800	100%	121,800	100%	121,800	100%	121,800	100%	121,800	1	609,000	Kominfo	
				5 Tersediaanya jasa informasi dan komunikasi	paket	12 bln	445,500	12 bln	490,000	12 bln	534,500	12 bln	579,000	12 bln	623,500	12 bulan	2,672,500	Setda (Bag. Humas)	
				1.25.1.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1. Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi	4%	0%	0	50%	175,000	50%	175,000	0%	0	0%	0	100%	350,000	Kominfo
				1.25.1.18 Program kerjasama informasi dan media massa	1 Jumlah Dialog interaktif 218 kali	10 Kali	24 Kali	12,900	38 Kali	160,000	50 Kali	200,000	62 Kali	225,000	74 Kali	235,000	218 Kali	832,900	Kominfo
					2 Jumlah kegiatan Sosialisasi di Masyarakat 13 kali	1 Kl	3 kl	73,515	4 Kl	100,000	3 Kl	73,000	3 Kl	73,000	3 Kl	73,000	13 Kl	392,515	Kominfo
					3 Jumlah kegiatan pertunjukan rakyat 17 kali	0	0	0	2	50,000	4	100,000	5	125,000	6	150,000	17	425,000	Kominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4 Jumlah kegiatan Walikota Menyapa 20 kali	1 Kl	4 kl	50,000	4 kl	50,000	4 kl	50,000	4 kl	50,000	4 kl	50,000	20 kl	250,000	Kominfo
					5 Jumlah kegiatan Ruang Ekspresi Publik 20 kali	1 Kl	4 kl	100,000	4 kl	100,000	4 kl	100,000	4 kl	100,000	4 kl	100,000	4 kl	500,000	Kominfo
					6 Jumlah kegiatan penybarluasan informasi Pemerintahan Daerah 12 media	12 Media	12 Media	473,600	12 Media	500,000	12 Media	500,000	12 Media	500,000	12 Media	500,000	12 Media	2,473,600	Kominfo



**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017**

**VISI** : "MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN"  
**MISI IV** : Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  
 (dalam Ribu)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Penataan Ruang</b>																			
1	Peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang konsisten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	a. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW /RDTR	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	1.05.1.15 Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen revisi Dokumen dan Perda RDTR Kota Kupang  Tersedianya Revisi dokumen RTRW Kota Kupang  Tersedianya dokumen Sinkronisasi Dokumen dan Perda Zoning Regulation Kota Kupang  Tersedia aparat dalam perencanaan tata ruang  Kajian tentang perubahan fungsi ruang terbuka hijau, punggung bukit, DAS dan pesisir Kota Kupang	Dokumen 7 BWK dan Perda RDTR  Dokumen dan Perda RTRW  Dokumen 7 BWK Zoning Regulation  -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7 BWK Kota Kupang  RTRW Kota Kupang  -	2,500,000  500,000  -	- - -	- - -	Dokumen dan Perda RDTR Kota Kpg  Dokumen dan Perda RTRW  Kota Kupang  3,000,000  -	2,500,000  500,000  3,000,000  -	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.  Bappeda  Dinas Perumahan dan Tata Ruang.  Dinas Perumahan dan Tata Ruang.  Litbang
				1.05.1.16 Program Pemanfaatan ruang	Tersedianya sosialisasi RDTRK dan RTRW Kota Kupang	Tersedianya papan informasi sebanyak 30 papan di 6 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	30 papan informasi RDTR	-	500,000	30 Papan informasi RDTR	500,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedia Pelatihan aparat dalam pemanfaatan tata ruang	-	-	-	Tersedianya papan informasi RTRW Kota Kupang sebanyak 6 papan di 6 Kecamatan	120,000	-	-	-	-	-	-	Tersedianya papan informasi RTRW Kota Kupang sebanyak 6 papan di 6 Kecamatan	120,000	Bappeda
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pemanfaatan tata ruang	-	-	-	Tersebar nya brosur leaflet sejumlah 1000 buah	10,000	-	-	-	-	-	-	b. Tersebar nya brosur leaflet sejumlah 1000 buah	10,000	Bappeda
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pemanfaatan tata ruang	-	-	Soialisasi Perda RDTR	100,000	-	-	-	-	-	-	-	Soialisasi Perda RDTR	100,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pemanfaatan tata ruang	-	-	-	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	8 staf teknis	160,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pemanfaatan tata ruang	-	-	-	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	8 staf teknis	160,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pengendalian tata ruang	-	-	-	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	8 staf teknis	160,000	Bappeda
					Tersedia Pelatihan aparat dalam pengendalian tata ruang	-	-	-	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	2 staf teknis	40,000	8 staf teknis	160,000	Bappeda
					Tersedianya bahan Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan ruang	-	6 kec, sosialisasi Perda IMB tahun 2003	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kec, sosialisasi Perda IMB tahun 2003	65,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
					Tersedianya bahan Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan ruang	-	6 kec, sosialisasi Perda IMB tahun 2003	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kec, sosialisasi Perda IMB tahun 2003	65,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		b. Meningkatnya penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya			<p>Terlaksananya monev papan reklame</p> <p>Tersedianya buku standar harga bangunan dan konstruksi</p> <p>Adanya Fasilitas dan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>Terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian dan pengawasan bangunan</p> <p>Tersedianya dokumen kawasan bangunan cagar budaya 100 %</p>	-	6 kec,	15,000	6 kec,	25,000	6 kec,	35,000	6 kec,	45,000	6 kec,	55,000	6 kec, dan laopran hasil monev	175,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
						-	-	-	buku standar harga bangunan dan konstruksi	100,000	buku standar harga bangunan dan konstruksi	100,000	buku standar harga bangunan dan konstruksi	100,000	buku standar harga bangunan dan konstruksi	100,000	buku standar harga bangunan dan konstruksi	400,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
						-	-	-	terbentuknya forum peduli lingkungan dan bangunan perkotaan	150,000	terbentuknya forum peduli lingkungan dan bangunan perkotaan	150,000	terbentuknya forum peduli lingkungan dan bangunan perkotaan	150,000	terbentuknya forum peduli lingkungan dan bangunan perkotaan	150,000	terbentuknya forum peduli lingkungan dan bangunan perkotaan	600,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
						-	-	-	Tim Terpadu Pengawasan bangunan di 6 Kecamatan	50,000	Tim Terpadu Pengawasan bangunan di 6 Kecamatan	60,000	Tim Terpadu Pengawasan bangunan di 6 Kecamatan	70,000	Tim Terpadu Pengawasan bangunan di 6 Kecamatan	80,000	Tim Terpadu Pengawasan bangunan di 6 Kecamatan	260,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
						-	-	-	Dokumen bangunan dan cagar budaya (100%)		Dokumen bangunan dan cagar budaya (100%)	150,000				Dokumen bangunan dan cagar budaya	150,000	Bappeda	
<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>																			
2.	Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture )	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota 61%	Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota 44 %	3%	13,000,000	3,0%	14,300,000	3%	11,500,000	3,0%	12,600,000	4%	15,800,000	61%	67,200,000	Dinas PU

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kawasan perumahan	Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kawasan perumahan 10 %	2% (2 kawasan perumahan)	350,000	2% (2 kawasan perumahan)	350,000	2% (2 kawasan perumahan)	350,000	2% (2 kawasan perumahan)	350,000	2% (2 kawasan perumahan)	350,000	20% (10 kawasan perumahan)	1,750,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
				1.03.1.16 Program Pembangunan Saluran Drainase gorong-gorong	Mengurangi jumlah titik genangan sebesar 70% dengan mempercepat durasi genangan dan optimalisasi fungsi sistem jaringan drainase eksisting	30 titik	3 titik	300,000	3 titik	300,000	4 titik	400,000	6 titik	600,000	5 titik	500,000	51 titik genangan	2,100,000	Dinas PU
						15 Km	3 Km	1,650,000	3 km	1,650,000	3 km	1,650,000	3 km	1,650,000	3 km	1,650,000	27 km	8,250,000	Dinas PU
					Inventarisasi -Identifikasi dan Penyusunan Data Base Jaringan Drainase Kota Kupang secara elektronik	-	-	-	100%	250,000	-	-	-	-	-	-	100% Dokumen Data Base secara elektronik	250,000	Dinas PU
		b. Meningkatnya sarana dan prasarana estetika kota		1.03.1.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya prasarana sanitasi komunal sebesar 30% (25 unit)	15 unit	5 unit	2,000,000	5 unit	1,500,000	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	40 unit	9,500,000	
					Tersedianya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi masyarakat (PAMSIMAS) sebesar 12%	3%	3%	100,000	3%	100,000	3%	100,000	3%	100,000	3%	100,000	18%	500,000	
				1.04.03.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya sarana prasarana dasar pemakaman yang layak 50%	20%	-	-	12.5%	375,000	12.5%	375,000	12.5%	375,000	12.5%	375,000	70 % utk 7 TPU di Kota Kupang	1,500,000	Dinas PU
				1.04.03.21 Program Penataan Kawasan Kumuh	Tersedianya data kawasan kumuh dan padat serta sarana prasarana dasar penunjang kawasan tersebut	0%	-	-	100%	250,000	-	-	-	-	-	-	100% Dokumen Data Base secara elektronik	250,000	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.			
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3.	Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase	c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan		1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit sarana prasarana pemerintahan yang terbangun 25 unit	25 unit	2 unit	5.950,000	2 unit	10.850,000	1 unit	8.250,000	1 unit	9.250,000	-	-	6 unit	34,300,000		
					Optimalisasi fungsi sarana prasarana aparatur	rehabilitasi	1 unit	250,000	1 unit	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	500	
				1.03.1.17	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Terpantainya pelaksanaan PNPM-MP di 51 Kelurahan	30%	20%	60,000	20%	60,000	10%	60,000	10%	60,000	10%	60,000	10%	60,000	100%	300,000
		1.03.1.18		Program rehabilitasi/peeliharaan Jalan & Jembatan	Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 30 %	25%	5.5%	3,225,000	5.5%	1,385,000	6%	2,415,000	6.5%	1,465,000	6%	1,775,000	55%	10,265,000			
				Jumlah prasarana jalan dan jembatan di kawasan perumahan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 15 %	15%	3 kawasan (3 %)	900,000	3 kawasan (4 %)	1,000,000	3 kawasan (4 %)	1,000,000	3 kawasan (4 %)	1,000,000	3 kawasan (4 %)	1,000,000	15 kawasan (34 %)	4,900,000				Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
		1.03.1.19		Program rehabilitasi/peeliharaan talud/bronjong	Meningkatnya jumlah prasarana pengendali banjir, tanah lonsor dan abrasi pantai yang terpeliharaan dan berfungsi 30 %	50%	10%	500,000	10%	500,000	10%	500,000	10%	500,000	10%	500,000	80%	2,500,000			
	b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase	1.03.1.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan 100 %	20%	20%	100,000	20%	100,000	20%	50,000	10%	50,000	10%	50,000	35%	350,000		Dinas PU		

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.	Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku	a. Terpenuhi sarana dan prasarana air baku		1.03.1.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara	25%	1%	130,000	6%	780,000	6%	780,000	6%	780,000	6%	780,000	50%	3,250,000	Dinas PU
				1.03.1.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya	Tersedianya jaringan transmisi dan distribusi untuk sambungan rumah 1000 SR	15 kawasan	-	-	3 kawasan, (250 SR)	2,000,000	3 kawasan, (250 SR)	2,000,000	3 kawasan, (250 SR)	2,000,000	3 kawasan, (250 SR)	2,000,000	12 kawasan, (1000 SR)	8,000,000	Dinas PU
					Penyusunan Rencana Induk SPAM	2%	-	-	98%	200,000	-	-	-	-	-	-	-	100% Dokumen Data Base	200,000	
				Masterplan Air Bersih	-	-	-	100%	250,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	250,000		
		1.03.1.25		Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi meningkat 18,2 %	60%	3,2%	1,125,000	3,8%	1,343,000	4,2%	1,463,000	3,7%	1,313,000	3,2%	1,125,000	78,1%	6,369,000	Dinas PU	
				b. Terpenuhi sarana dan prasarana air irigasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Meningkatkan Debit Air Permukaan dan Meninggikan Muka Air Tanah			1.03.1.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, darau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Prasarana Sumber air permukaan dan air tanah yang terpelihara dan berfungsi meningkat sebesar 5 %	20%	1%	750,000	-	-	2%	1,500,000	-	-	2%	1,500	25,0%	2,251,500	Dinas PU
					Tingkat ketersediaan data dan informasi jaringan irigasi	-	2 lokasi	150,000	2 lokasi	150,000	-	-	-	-	-	-	100% (dokumen)	300,000		

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		d. Terpenuhi Sarana & Prasarana Pengendalian Daya Rusak air		1.03.1.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tervujudnya prasarana sanitasi komunal sebesar 30% (25 unit)	15 unit	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	5 unit	2,000,000	40 unit	10,000,000	Dinas PU
				1.03.1.28 Program pengendalian banjir	Meningkatnya Jumlah Prasarana pengendalian banjir, tanah longsor dan abrasi pantai yang terbangun dan berfungsi sebesar 30 %	40%	10%	1,130,000	5%	600,000	5%	600,000	5%	600,000	5%	600,000	70.0%	3,530,000	Dinas PU
					Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA wilayah sungai dan Pantai	-	-	-	100%	50,000	-	-	-	-	-	-	100.0%	50,000	
<b>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>																	100%		
5	Meningkatkan pengendalian, pengawasan usaha pertambangan dan energi, LPJU, energi non migas baru dan terburukan, penertiban dan pengelolaan air bawah tanah.	a. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan		2.03.15 Program pembinaan dan pengawasan program pertambangan	Monitoring dan evaluasi 12 kali terhadap 14 pengusaha	9 kali, 2 pengusaha	9 kali, 8 pengusaha	50,000	9 kali, 10 pengusaha	50,000	9 kali, 11 pengusaha	50,000	9 kali, 12 pengusaha	50,000	9 kali, 14 pengusaha	50,000	45 kali, 14 pengusaha	250,000	Distamben
					Pembinaan dan pengawasan terhadap 16 pengusaha tambang	3 kali, 10 pengusaha	4 kali, 10 pengusaha	75,000	4 kali, 10 pengusaha	75,000	4 kali, 10 pengusaha	75,000	4 kali, 10 pengusaha	75,000	4 kali, 10 pengusaha	75,000	20 kali, 16 pengusaha	375,000	Distamben
		b. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur terhadap pengelolaan LPJU		2.03.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Lerlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap 5588 titik LPJU	3 x thdp 4200 lpu	4223 LPJU	200,000	4473 LPJU	202,500	4773 LPJU	210,000	5173 LPJU	240,000	5588 LPJU	260,000	24230 LPJU	1,112,500	Distamben.& Setda
					Terpasangnya alat ukur pengukuran, pembagi, instalasi LPJU sebanyak 280 unit	-	pemasangan meterisasi LPJU 56 unit	100,000	pemasangan meterisasi LPJU 56 unit	100,000	pemasangan meterisasi LPJU 56 unit	100,000	pemasangan meterisasi LPJU 56 unit	100,000	pemasangan meterisasi LPJU 56 unit	100,000	pemasangan meterisasi LPJU 280 unit	500,000	Distamben.& Setda
					Terpasang listrik prabayar utk KK Miskin sebanyak 570 KK	-	terpasang bagi 50 KK miskin	100,000	terpasang bagi 70 KK miskin	140,000	pemasangan bagi 100 KK miskin	200,000	terpasang bagi 150 KK miskin	300,000	terpasang bagi 200 KK miskin	400,000	terpasang bagi 570KK miskin	1,140,000	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Terpasang instalasi biogas 25 unit		instalasi biogas pada 5 tempat	50,000	50,000	instalasi biogas pada 5 tempat	50,000	instalasi biogas pada 5 tempat	50,000	instalasi biogas pada 5 tempat	50,000	instalasi biogas pada 25 tempat	250,000	Distamben		
				2.03.18	Program pembinaan dan pengawasan air tanah	Monev 65 pengusaha dari 110 pengusaha	13 kali,65 pengusaha	16 kali,75 pengusaha	75,000	16 kali,85 pengusaha	85,000	16 kali,95 pengusaha	95,000	16 kali,105 pengusaha	105,000	16 kali,110 pengusaha	110,000	80 kali,110 pengusaha	470,000	Distamben
					Pemasangan Watermeter 175 unit	-	65 unit	142,000	20 unit	45,000	30 unit	67,500	30 unit	67,500	30 unit	67,500	175 unit	389,500	Distamben	
		c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian bahan bakar minyak dan gas		2.03.19	Program pembinaan dan pengawasan pengusaha migas	Monitoring, pembinaan dan pengawasan 600 pengusaha migas	3 kali, 582 pengusaha	4 kali, 600 pengusaha	170,000	4 kali, 600 pengusaha	170,000	4 kali, 600 pengusaha	170,000	4 kali, 600 pengusaha	170,000	4 kali, 600 pengusaha	170,000	20 kali, 600 pengusaha	850,000	Distamben
					Kajian penggunaan energi alternatif	-	-	-	-	-	-	-	solar cell, air laut, angin dan biogas	250,000	-	-	solar cell, air laut, angin dan biogas	250,000	Litbang	
		d. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral		2.03.20	Program konservasi bidang geologi dan air tanah	Monitoring dan inventarisasi potensi dan pemanfaatan sumber daya mineral	-	16 kali	100,000	16 kali	100,000	16 kali	100,000	16 kali	100,000	16 kali	100,000	80 kali	500,000	Distamben
					pembuatan sumur resapan 30 unit	-	6 unit	65,000	6 unit	65,000	6 unit	65,000	6 unit	65,000	6 unit	65,000	30 unit	325,000	Distamben	
					Pembuatan UPL/UKL untuk 25 pengusaha	-	5 pengusaha	60,000	5 pengusaha	60,000	5 pengusaha	60,000	5 pengusaha	60,000	5 pengusaha	60,000	25 pengusaha	300,000	Distamben	
<b>Urusan Perumahan</b>																				
6.	Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya	a. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	1.04 1.15	Program Pengembangan Perumahan	Tingkat Ketersediaan Perumahan bagi masyarakat	1 rusunawa 10 %	-	-	-	-	-	rusunawa bagi nelayan/MBR Kota Kupang (1 unit)	10,000,000	-	-	2 unit (20 %)	10,000,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang	
		b. Meningkatnya pemerataan perumahan di kawasan kumuh				Peningkatan Kualitas (PK) Kawasan Perumahan melalui Lisiba dan Kasiba (40 %)	-	-	-	Pemctangan lahan Kasiba/lisiba 10 %	300,000	Pemctangan lahan Kasiba/lisiba 10 %	300,000	Pemctangan lahan Kasiba/lisiba 10 %	300,000	Pemctangan lahan Kasiba/lisiba 10 %	300,000	4 Kawasan Kasiba/lisiba (40 %)	1,200,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum		1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10%	-	-	1 kawasan (drainase, air bersih, listrik) 5 %	400,000	1 kawasan (drainase, air bersih, listrik) 5 %	400,000	1 kawasan (drainase, air bersih, listrik) 5 %	400,000	1 kawasan (drainase, air bersih, listrik)	400,000	4 kawasan (drainase, air bersih, listrik) 30 %	1,600,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang
				1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman 20 %	-	-	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	4 kawasan) 20 %	200,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang	
				1.04 1.19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kapasitas aparatur 80 %	5%	15%	150,000	15%	165,000	15%	181,500	15%	199,650	15%	219,615	80%	915,765	Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Pemadam Kebakaran
					Meningkatnya kapasitas kelembagaan, UPTD pada 6 Kecamatan (60 %)	-	-	-	20%	500,000	20%	500,000	20%	500,000	-	6 kecamatan (60%)	1,500,000	Pemadam Kebakaran	
					Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	30%	3%	85,000	5%	100,000	5%	100,000	5%	100,000	5%	100,000	53%	485,000	Pemadam Kebakaran
<b>Urusan Perhubungan</b>																			
7.	Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi	a. Meningkatnya prasarana dan fasilitas di sektor perhubungan	100%	1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.) Tingkat ketersediaan aturan/ kebijakan/ norma dibidang perhubungan	2 perda 20%	revisi Perda 20 %	60,000	tersusunnya 3 Perda baru dan revisi 1 Perda 20%	150,000	tersusunnya 1 Perda baru dan revisi 1 Perda	150,000	tersusunnya 1 Perda baru	75,000	tersusunnya 1 Perda baru	75,000	100%	510,000	Dishub
					2.) Pemantauan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	kelengkapan jalan 30%	20,000	kelengkapan jalan 30%	25,000	kelengkapan jalan 30%	30,000	kelengkapan jalan 30%	35,000	kelengkapan jalan 30%	40,000	100%	150,000	Dishub
					3.) Koordinasi fasilitas perhubungan	-	Dokumen darat, laut dan udara 20%	30,000	Dokumen darat, laut dan udara 20%	40,000	Dokumen darat, laut dan udara 20%	50,000	Dokumen darat, laut dan udara 20%	60,000	Dokumen darat, laut dan udara 20%	75,000	100%	255,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		b. Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ		1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.) Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan	-	1 dokumen jaringan lintas angkutan barang 20%	260,000	4 dokumen (DED, SID, AMDAL, ANDALALIN Terminal)	350,000	Sosialisasi 100%	50,000	Sosialisasi 100%	50,000	Sosialisasi 100%	50,000	100%	760,000	Dishub
					5.) Tingkat ketersediaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Sumber Dana APBN)	Dokumen perencanaan (DED, SID, AMDAL, ANDALALIN) Terminal Tipe A	Pembangunan fisik 63%	15,000,000	Pembangunan fisik 21%	5,000,000	Pembangunan fisik 17%	4,000,000	Pemeliharaan 50%	100,000	Pemeliharaan 50%	100,000	100%	24,200,000	Dishub
					1.) Terpeliharanya fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan alat PKB	1 Paket 100%	17,500	1 Paket 100%	20,000	1 Paket 100%	22,500	1 Paket 100%	25,000	1 Paket 100%	30,000	100%	115,000	Dishub
					2.) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dinas perhubungan kota kupang	-	Rehab sedang/ berat gedung kantor dishub kota kupang 100%	125,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dishub kota kupang 100%	50,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dishub kota kupang 100%	50,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dishub kota kupang 100%	50,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dishub kota kupang 100%	100,000	100%	375,000	Dishub
					3.) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pos Pemantau LLAJ	6 Pos Pemantau	Rehab berat 2 Pos Pemantau 100%	-	Rehab berat 2 Pos Pemantau 100%	100,000	Rehab berat 2 Pos Pemantau 100%	100,000	Rehab berat 2 Pos Pemantau 100%	100,000	Pemeliharaan 4 Pos Pemantau 100%	30,000	100%	330,000	Dishub
					4.) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	29 halte	Rehab 29 halte 50%	5,000	Rehab 29 halte 50%	10,000	Rehab 29 halte 50%	10,000	Rehab 29 halte 50%	10,000	Rehab 29 halte 50%	10,000	100%	45,000	Dishub
					5.) Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin Rambu - rambu lalu lintas/ Guard Rail, Delineator	306 rambu - rambu lalu lintas, 2123 m <sup>2</sup> marka jalan, 520,6 m	Rambu - rambu lalu lintas, RPPJ, pagar pengaman jalan, delineator 100%	5,000	Rambu - rambu lalu lintas, RPPJ, pagar pengaman jalan, delineator 100%	10,000	Rambu - rambu lalu lintas, RPPJ, pagar pengaman jalan, delineator 100%	10,000	Rambu - rambu lalu lintas, RPPJ, pagar pengaman jalan, delineator 100%	10,000	Rambu - rambu lalu lintas, RPPJ, pagar pengaman jalan, delineator 100%	10,000	100%	45,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					6). Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin APILL	8 unit APILL	Pemeliharaan APILL 10 unit	50,000	Pemeliharaan APILL 10 unit 100%	60,000	Pemeliharaan APILL 10 unit 100%	70,000	Pemeliharaan APILL 10 unit 100%	70,000	Pemeliharaan APILL 10 unit 100%	70,000		320,000	Dishub
					7). Koordinasi penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	Pelaporan tingkat daerah dan pusat terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		Pelaporan tingkat daerah dan pusat terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100%	75,000	Pelaporan tingkat daerah dan pusat terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100%	75,000	Pelaporan tingkat daerah dan pusat terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100%	75,000	Pelaporan tingkat daerah dan pusat terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100%	75,000	100%	300,000	Dishub
		c. Meningkatkan pelayanan angkutan di sektor darat, laut dan udara		1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan angkutan	1.) Tersedianya Pelayanan angkutan umum	-	Pemantauan dan uji petik angkutan umum		Pemantauan dan uji petik angkutan umum 100%	40,000	Pemantauan dan uji petik angkutan umum 100%	40,000	Pemantauan dan uji petik angkutan umum 100%	40,000	Pemantauan dan uji petik angkutan umum 100%	40,000	100%	160,000	Dishub
					2.) Menurunnya tingkat pelanggaran angkutan umum	-	Penertiban angkutan umum		Penertiban angkutan umum 100%	80,000	Penertiban angkutan umum 100%	80,000	Penertiban angkutan umum 100%	80,000	Penertiban angkutan umum 100%	80,000	100%	320,000	Dishub
					3.) Peningkatan pelayanan angkutan kota	-	Evaluasi dan penataan Jaringan trayek angkutan kota 100%		Dokumen Perencanaan pengembalian angkutan umum massal 100%	300,000	Dokumen perilaku pengguna jasa angkutan kota 100%	200,000	Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan kota yang mudah, murah, nyaman serta selamat 100%	200,000	Sosialisasi rencana penerapan pengembalian angkutan umum massal 100%	100,000	100%	800,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4.) Meningkatkan pemahaman awak angkutan umum akan kebijakan/ norma/ aturan di sektor perhubungan	-	Pelaksanaan kegiatan awak angkutan umum teladan (AKUT) 100%	16,000	Pelaksanaan kegiatan awak angkutan umum teladan (AKUT) 100%	17,500	Pelaksanaan kegiatan awak angkutan umum teladan (AKUT) 100%	17,500	Pelaksanaan kegiatan awak angkutan umum teladan (AKUT) 100%	17,500	Pelaksanaan kegiatan awak angkutan umum teladan (AKUT) 100%	17,500	100%	86,000	Dishub
					5. Identifikasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan	-	Survei Evaluasi penyelenggara angkutan (Jasa Konsultansi) 100%		Survei Standar Pelayanan angkutan (Jasa Konsultansi) 100%	75,000	Workshop penciptaan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah 100%	100,000	Evaluasi kinerja jaringan trayek perintis angkutan umum 100%	100,000	-	100,000	100%	375,000	Dishub
					6. Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	-	Koordinasi ke tingkat Provinsi dan Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	75,000	Koordinasi ke tingkat Provinsi dan Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	75,000	Koordinasi ke tingkat Provinsi dan Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	75,000	Koordinasi ke tingkat Provinsi dan Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	75,000	Koordinasi ke tingkat Provinsi dan Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	75,000	100%	375,000	Dishub
					7. Pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	-	Pengawasan rutin angkutan umum 100%	72,500	Pengawasan rutin angkutan umum 100%	72,500	Pengawasan rutin angkutan umum 100%	72,500	Pengawasan rutin angkutan umum 100%	72,500	Pengawasan rutin angkutan umum 100%	72,500	100%	362,500	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					8. Tersedianya data base di sektor pelayanan angkutan	-	Penyusunan data base angkutan umum mengenai load faktor angkutan umum (Jasa Konsultansi) 100%	110,000	Penyusunan data base angkutan umum mengenai load faktor angkutan umum (Jasa Konsultansi) 100%	110,000	Penyusunan data base angkutan umum mengenai load faktor angkutan umum (Jasa Konsultansi) 100%	110,000	Penyusunan data base angkutan umum mengenai load faktor angkutan umum (Jasa Konsultansi) 100%	110,000	Penyusunan data base angkutan umum mengenai load faktor angkutan umum (Jasa Konsultansi) 100%	100%	550,000	Dishub	
					9. Peningkatan SDM di sektor perhubungan	-	Diklat manaj. Pengelolaan terminal, kepala terminal, TDM, Planning Policy, Andalalin, Manaj & rekayasa lain, penyegaran kepala dinas, penyegaran kabin perhub darat, dan diklat teknis	51,000	Diklat manaj. Pengelolaan terminal, kepala terminal, TDM, Planning Policy, Andalalin, Manaj & rekayasa lain, penyegaran kepala dinas, penyegaran kabin perhub darat, dan diklat teknis	60,000	Diklat manaj. Pengelolaan terminal, kepala terminal, TDM, Planning Policy, Andalalin, Manaj & rekayasa lain, penyegaran kepala dinas, penyegaran kabin perhub darat, dan diklat teknis	70,000	Diklat manaj. Pengelolaan terminal, kepala terminal, TDM, Planning Policy, Andalalin, Manaj & rekayasa lain, penyegaran kepala dinas, penyegaran kabin perhub darat, dan diklat teknis	80,000	Diklat manaj. Pengelolaan terminal, kepala terminal, TDM, Planning Policy, Andalalin, Manaj & rekayasa lain, penyegaran kepala dinas, penyegaran kabin perhub darat, dan diklat teknis	100%	341,000	Dishub	
					10. penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal		meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	102,000	meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	102,000	meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	102,000	meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	102,000	meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal		510,000	Dishub	
					11. Fasilitas perijinan dibidang angkutan		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	75,500	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	80,000	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	85,000	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	90,000	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	95,000	425,500	Dishub	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tabun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					12. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan		Meningkatkan yakesadaran berlalulintas	5,500	Meningkatkan yakesadaran berlalulintas	6,000	Meningkatkan yakesadaran berlalulintas	6,500	Meningkatkan yakesadaran berlalulintas	7,000	Meningkatkan yakesadaran berlalulintas	7,500		32,500	Dishub
				1.07.1.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tingkat ketersediaan fasilitas terminal tipe A, B, C	-	-	Pembangunan prasarana terminal oebobo (jalur keberangkatan dan kedatangan, ruang tunggu, dan pelataran parkir 100%	700,000	Pembangunan pos pemantau di bimoku	150,000	Pembangunan pos pemantau di pentui	150,000	Pembangunan fasilitas terminal beclo	150,000	100%	1,150,000	Dishub	
					Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 1 titik 100%	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 1 titik 100%	200,000	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 1 titik 100%	200,000	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 1 titik 100%	200,000	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 1 titik 100%	200,000	100%	800,000	Dishub
					Tingkat ketersediaan fasilitas parkir (off/on street)	-	-	Tersedianya fasilitas parkir berupa rambu dan marka parkir 100%	300,000	Pemeliharaan fasilitas parkir on/off street 100%	30,000	Pemeliharaan fasilitas parkir on/off street 100%	40,000	Pemeliharaan fasilitas parkir on/off street 100%	50,000	100%	420,000	Dishub	
					Tingkat ketersediaan dokumen kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	-	-	Dokumen master perencanaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Jasa Konsultansi) 100%	350,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	350,000	Dishub	

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Koordinasi dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	35,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	45,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	45,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	45,000	100%	170,000	Dishub
					Pembangunan Prasarana Perhubungan	-		-	Pembangunan gedung kantor UPTD Terminal 100%	550,000	Pembangunan gedung terminal angkutan barang 100%	16,000,000	Pemeliharaan gedung kantor updt terminal dan angkutan	50,000	Pemeliharaan gedung kantor updt terminal dan angkutan	75,000	100%	16,675,000	Dishub
		d. Meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas		1.07 1.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas	-	Pengendalian lalu lintas yang bersifat isidentil (terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang bersifat mendadak) 100%	10,000	Pengendalian lalu lintas yang bersifat isidentil (terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang bersifat mendadak) 80%	10,000	Pengendalian lalu lintas yang bersifat isidentil (terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang bersifat mendadak) 80%	10,000	Pengendalian lalu lintas yang bersifat isidentil (terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang bersifat mendadak) 80%	10,000	Pengendalian lalu lintas yang bersifat isidentil (terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang bersifat mendadak) 80%	10,000	100%	50,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas	-	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas : pada hari - hari besar daerah dan nasional dan hari - hari besar keagamaan 100%	55,000	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas : pada hari - hari besar daerah dan nasional dan hari - hari besar keagamaan 100%	55,000	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas : pada hari - hari besar daerah dan nasional dan hari - hari besar keagamaan 100%	55,000	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas : pada hari - hari besar daerah dan nasional dan hari - hari besar keagamaan 100%	55,000	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas : pada hari - hari besar daerah dan nasional dan hari - hari besar keagamaan 100%	55,000	80%	275,000	Dishub
					Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	-			Pengadaan APILL : 1 unit di 1 simpang 100%	400,000	Pengadaan LPJU Solar Cell : 10 unit	400,000	Pengadaan LPJU Solar Cell : 10 unit	400,000	Pengadaan LPJU Solar Cell : 10 unit	400,000	100%	1,600,000	Dishub
					Identifikasi kebutuhan fasilitas keselamatan perhubungan	-	Identifikasi kebutuhan fasilitas keselamatan perhubungan	250,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	250,000	Dishub
					Penyediaan kebutuhan fasilitas keselamatan perhubungan	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ Rp. 957.957.500,-	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ	1,110,000	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ	1,110,000	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ	1,110,000	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ	1,110,000	Dana alokasi khusus Keselamatan LLAJ	1,110,000	100%	5,550,000	Dishub
					Tervujudnya kawasan tertib lalu lintas	-			Study penetapan kawasan tertib lalu lintas 100%	150,000	Sosialisasi penetapan kawasan tertib lalu lintas 100%	50,000	Penerapan kawasan tertib lalu lintas 100%	100,000	Pemeliharaan kawasan tertib lalu lintas (KTL) 100%	50,000	100%	350,000	Dishub



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pelaksanaan dan peningkatan kegiatan zero accident dan wahana tata nugraha	-			Pelaksanaan agenda nasional dalam rangka mensukseskan program zero accident dan sebagai daerah yang memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (Jasa Konsultansi) 100%	50,000	Pelaksanaan agenda nasional dalam rangka mensukseskan program zero accident dan sebagai daerah yang memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (Jasa Konsultansi) 100%	50,000	Pelaksanaan agenda nasional dalam rangka mensukseskan program zero accident dan sebagai daerah yang memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (Jasa Konsultansi) 100%	50,000	Pelaksanaan agenda nasional dalam rangka mensukseskan program zero accident dan sebagai daerah yang memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (Jasa Konsultansi) 100%	50,000	80%	200,000	Dishub
					Peningkatan simpang koordinasi dan simpang Area Traffic Control System (ATCS)	-			Penyusunan dokumen teknis penerapan simpang koordinasi dan Area Traffic Control System (ATCS)	200,000	Pembangunan ruang kontrol Area Traffic Control System (ATCS)	750,000	Pelaksanaan ATCS 100%	100,000	Pelaksanaan ATCS 100%	100,000	100%	1,150,000	Dishub
					Koordinasi kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	-			Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan lalu lintas 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan lalu lintas 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan lalu lintas 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan lalu lintas 100%	75,000	100%	300,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Peningkatan SDM di sektor perhubungan	-	Diklat PPNS untuk 1 orang 100%	7,000	Diklat PPNS untuk 2orang 100%	20,000	Diklat PPNS untuk 2orang 100%	20,000	Diklat PPNS untuk 2orang 100%	20,000	Diklat PPNS untuk 2orang 100%	20,000	100%	87,000	Dishub
					Study manajemen dan rekayasa lalulintas	-	1 dokumen manajemen lalulintas simpang BTN	47,585	1 dokumen manajemen lalulintas	47,585	1 dokumen manajemen lalulintas	47,585	1 dokumen manajemen lalulintas	47,585	1 dokumen manajemen lalulintas	47,585		237,925	Dishub
		c. Meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan		1.07.1.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kendaraan lulus uji dan laik jalan	-	Pelaksanaan uji petik 2 kali dalam setahun 100%	11,000	Pelaksanaan uji petik 2 kali dalam setahun 100%	11,000	Pelaksanaan uji petik 2 kali dalam setahun 100%	11,000	Pelaksanaan uji petik 2 kali dalam setahun 100%	11,000	Pelaksanaan uji petik 2 kali dalam setahun 100%	11,000	100%	55,000	Dishub
					Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	-			Penyediaan fasilitas balai pengujian kendaraan bermotor : ruang	125,000	Pemeliharaan 100%	50,000	Pemeliharaan 100%	50,000	Pemeliharaan 100%	50,000	100%	275,000	Dishub
					Pembangunan prasarana pengujian kendaraan bermotor	-			Penyusunan dokumen kebutuhan lebar ruang parkir, lajur uji dll	150000	Pembangunan pengembangan Balai PKB	1,500,000	0%	-	0%	-	100%	1,650,000	Dishub
					Tingkat ketersediaan sarana pengujian kendaraan bermotor	1 unit headlight tester 100%	Pengadaan alat PKB 1 paket 100%	2,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2,000,000	Dishub

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Koordinasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	-			Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 100%	75,000	Koordinasi tingkat Prov dan Nasional dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 100%	75,000	100%	300,000	Dishub
					Peningkatan SDM penguji kendaraan bermotor	-	Diklat PKB Dasar untuk 2 orang, Diklat penyegaran Kepala UPT PKB	14,250	Diklat untuk 2 org : diklat PKB Lanjutan I dan Diklat penyegaran Kepala PKB	30,000	Diklat untuk 2 org : diklat PKB Lanjutan II dan Diklat penyegaran Kepala PKB	350,000	Diklat untuk 1 org : diklat PKB Penyelia dan Diklat penyegaran Kepala PKB	30,000	Diklat PKB Dasar : 4 orang dan Diklat penyegaran Kepala PKB : 1 orang	80,000	100%	504,250	Dishub
					Penyediaan dokumen data base kendaraan wajib uji	-			Penyusunan Dokumen data base Kendaraan wajib uji	200,000	Review dokumen potensi kendaraan wajib uji	50,000	Review dokumen potensi kendaraan wajib uji	50,000	Review dokumen potensi kendaraan wajib uji	50,000	100%	350,000	Dishub
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>																			
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah	a. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah		1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana persampahan kota  2. Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah	volume sampah terangkut 20 % dari 19 unit truck sampah	2 trek, 1 bulldoser, 1 anrol, 3 tps	10,000,000	luas areal 15 % dari luas wilayah kota kupang	20,000,000	luas areal 10 % dari luas wilayah kota kupang	35,000,000	luas areal 10 % dari luas wilayah kota kupang	35,000,000	luas areal 10 % dari luas wilayah kota kupang	10,000,000	luas areal 65 % dari luas wilayah kota kupang	110,000,000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Dinas Kebersihan dan Pertamanan

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair.			1. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan	-	Sosialisasi 4 SD dan 4 Kcl	40,000	Sosialisasi 6 SD dan 6 Kcl	60,000	Sosialisasi 8 SD dan 8 Kcl	80,000	Sosialisasi 10 SD dan 10 Kcl	100,000	Sosialisasi 12 SD dan 12 Kcl	120,000	Sosialisasi 40 SD dan 40 Kcl	400,000	BPLHD
					2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 kali	1 kali	173,500	1 kali	175,500	1 kali	175,500	1 kali	175,500	1 kali	175,500	1 kali	875,500	BPMK
9.	Meningkatkan penataan lahan kritis lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi	a. Meningkatnya pengelolaan dan penataan lahan kritis		1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat aksesibilitas informasi SDA dan LH	90 titik pantau Adipura, 75 % sarana dan prasarana LH, 12 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 58, UKL-UPL : 66, DPLH : 21	90 titik pantau Adipura, 77 % sarana dan prasarana LH, 15 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 78, UKL-UPL : 76, DPLH : 29, Sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 10 titik	2,500,000	90 titik pantau Adipura, 79 % sarana dan prasarana LH, 18 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 88, UKL-UPL : 81, DPLH : 33, sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 12 titik	2,500,000	90 titik pantau Adipura, 81 % sarana dan prasarana LH, 21 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 88, UKL-UPL : 81, DPLH : 37, sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 14 titik	2,700,000	90 titik pantau Adipura, 83 % sarana dan prasarana LH, 24 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 108, UKL-UPL : 98, UKL-UPL : 91, DPLH : 40, sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 16 titik	2,900,000	90 titik pantau Adipura, 84 % sarana dan prasarana LH, 27 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 108, UKL-UPL : 91, DPLH : 40, sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 16 titik	3,100,000	90 titik pantau Adipura, 84 % sarana dan prasarana LH, 27 Sekolah Adiwiyata, 25 org Tim UKL-UPL, Dokumen Amdal : 4, SPPL : 108, UKL-UPL : 91, DPLH : 40, sosialisasi dan monev CFC (gas rumah kaca) di 16 titik	13,700,000	BPLHD
		b. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan penguasaan air bawah tanah			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Jumat bersih	52 minggu	52 minggu	62,000	52 minggu	62,000	52 minggu	62,000	52 minggu	62,000	52 minggu	62,000	260 minggu	310,000	BPMK

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp.	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		c. Meningkatkan cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL		1.08 1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		-	1000 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	75,000	1200 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	90,000	1400 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	105,000	1600 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	120,000	1800 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	135,000	7000 anakan di daerah tangkapan air dan sumber air	525,000	Distamben & BPLHD
				1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Diklat LH : 2 Org	Diklat LH : 4 Org	60,000	Diklat LH : 6 Org	90,000	Diklat LH : 8 Org	120,000	Diklat LH : 10 Org	150,000	Diklat LH : 12 Org	180,000	Diklat LH : 40 Org	600,000	BPLDH
		d. Meningkatkan pengelolaan RTH Publik dan Perkantoran		1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan	Sosialisasi 50 Pengusaha	Sosialisasi 50 Pengusaha	18,500	Sosialisasi 70 Pengusaha	22,000	Sosialisasi 80 Pengusaha, pengukuran emisi udara di 6 Titik	100,000	Pengukuran emisi udara di 8 titik	100,000	Pengukuran emisi udara di 10 titik	125,000	Sosialisasi kepada 210 Pengusaha dan pengukuran emisi udara di 24 titik	365,500	BPLHD
					Kajian penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	3 Kec	250,000	3 Kec	250,000	6 Kec	500,000	Litbang
				1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPLHD, Perikanan dan Kelautan
				1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota 20 %	40 titik lokasi (20 %)	3,00%	125,000	3,00%	125,000	3,00%	125,000	3,00%	125,000	3,00%	125,000	35,00%	625,000	Dinas kebersihan dan pertamanan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017**

VISI : " MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN"  
MISI V : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat  
(dalam Ribu)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)					
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>Urusan Sosial</b>																							
1	Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif dan sinergis, guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin, dan Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, penyandang HIV-AIDS.	a. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.13.15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Persentase penanganan jumlah fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil PMKS Lainnya	12.879 (Fakir Miskin)	100%	54,375	100%	62,532	100%	71,911	100%	82,698	100%	95,102	100%	366,618	Dinsos				
						12 KUBE																	
						16 Pendamping dan Operator PKH																	
						1 Rumah Singgah	100%	87,875	100%	601,056	100%	116,215	100%	133,647	100%	153,694	100%	1,092,487	100%	1,092,487	Dinsos		
1		b. Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS		1.13.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Persentase peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Paket Tanggap Darurat																	
						2 Mr. "X"	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	2 Mr. "X"	10,000	Dinsos		
						-	10%	100,000	10%	100,000	10%	100,000	10%	100,000	10%	100,000	50%	500,000	Setda (Bag. Sos.)				
				1.13.17 Program pembinaan anak terlantar.	Persentase jumlah anak terlantar yang terbina	516 Anak Terlantar													Dinsos				

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.13.18 Program pembinaan penyandang cacat dan trauma.	Persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma	629 PACA	100%	73,500	100%	84,525	100%	97,204	100%	111,784	100%	128,552	100%	495,565	Dinsos & KPAD, Setda
						84 Penyandang Penyakit Kejiwaan													
				1.13.19 Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo.	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah	17 Panti Asuhan	100%	128,500	100%	147,775	100%	169,941	100%	195,432	100%	224,747	100%	866,395	Dinsos & Setda
		d. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS		1.13.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, eks psk, eks narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya persentase pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	83 eks napi	100%	75,250	100%	86,538	100%	99,518	100%	114,446	100%	131,613	100%	507,365	Dinsos & KPAD
						169 PSK 38 Waria													
				1.13.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	51 Karang Taruna	100%	82,084	100%	94,396	100%	108,556	100%	124,839	100%	143,565	100%	553,440	Dinsos
						-	1 sekretariat Komdak	100,000	1 sekretariat Komdak	125,000	1 sekretariat Komdak	150,000	1 sekretariat Komdak	175,000	1 sekretariat Komdak	200,000	1 sekretariat Komdak	750,000	Setda (Bag. Sos.)
						-	2 kali Rakor	75,000	2 kali Rakor	80,000	2 kali Rakor	85,000	2 kali Rakor	90,000	2 kali Rakor	95,000	10 kali Rakor	425,000	Setda (Bag. Sos.)

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Perumahan</b>																			
2	<b>Pembangunan dan pengembangan perumahan bagi masyarakat miskin</b>	a. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Peningkatan Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.04.15 Program Pengembangan Perumahan	1). Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin (1900 PSU)  2). Rehab rumah miskin (MBR) 6100 rumah	-  -	-  -	-  -	PSU (Jln, Drainase, Listrik)	2,375,000	PSU (Jln, Drainase, Listrik)	2,850,000	PSU (Jln, Drainase, Listrik)	3,325,000	PSU (Jln, Drainase, Listrik)	3,800,000	PSU untuk 1900 MBR	12,350,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang
				1.04.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	Rumah MBR 1.525 Unit	24,400,000	Rumah MBR 1.525 Unit	24,400,000	Rumah MBR 1.525 Unit	24,400,000	Rumah MBR 1.525 Unit	24,400,000	6100 Rumah yang akan di rehab	97,600,000	Dinas Perumahan dan Tata Ruang  Pemadam Kebakaran
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																			
3.	<b>Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi peningkatan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja, dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.</b>	a. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak  b. Peningkatan Gender Development Indeks (GDI)	<b>Peningkatan Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan dan Keadilan Gender</b>	1.11.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran	85%	86%	560,000	87%	570,000	88%	575,000	89%	580,000	90%	585,000	90%	2,870,000	Setda (Pemberdayaan Perempuan)
				1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi	95%	95,5%	543,000	96%	600,000	96,5%	650,000	97%	700,000	97,5%	750,000	97,5%	3,243,000	Setda (Pemberdayaan Perempuan)



NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		c. Mewujudkan Kota Layak Anak		1.11.17 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Menurunkan angka KDRT & anak	85%	86%	230,000	87%	250,000	88%	280,000	89%	310,000	90%	340,000	90%	1,410,000	Setda (Pemberdayaan Perempuan)
				1.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta	75%	76%	300,000	77%	350,000	78%	400,000	79%	450,000	80%	500,000	80%	2,000,000	Setda (Pemberdayaan Perempuan)
<b>Urusan Perumahan</b>																			
4.	<b>Peningkatan dan pengembangan manajemen mitigasi bencana.</b>	a. Meningkatnya penanganan korban bencana alam		1.04.1.18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam /sosial	Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran	-	seng, semen, paku, dll	50,000	seng, semen, paku, dll	60,000	seng, semen, paku, dll	70,000	seng, semen, paku, dll	80,000	seng, semen, paku, dll	90,000	seng, semen, paku, dll	350,000	BPBD
		b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.		1.04.1.19 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi	7 orang	7 orang	153,000	7 orang	153,000	7 orang	153,000	7 orang	153,000	7 orang	153,000	42 orang	765,000	Pemadam Kebakaran
				1.06.1.25 Program perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya penanganan Daerah rawan bencana														BPBD

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)		
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</b>																				
5	Pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	a. Menurunnya penduduk miskin	Peningkatan Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/kelurahan	Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah	1 kali	33,000	1 kali	39,000	1 kali	47,000	1 kali	57,000	1 kali	68,000	5 kali	244,000	BPMK		
		b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat			Facilitator mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik	1 kali kegiatan 51 kelurahan	1 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	25,000	1 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	25,000	1 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	25,000	1 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	25,000	1 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	25,000	5 kali kegiatan untuk 51 kelurahan	125,000	BPMK	
		c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan			1.22 1.15 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/kelurahan	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat KUB penerima Dana PEM	1 kali (51 Kelurahan)	1 kali (51 Kelurahan)	15,000	1 kali (51 Kelurahan)	20,000	1 kali (51 Kelurahan)	25,000	1 kali (51 Kelurahan)	30,000	1 kali (51 Kelurahan)	35,000	1 kali (51 Kelurahan)	125,000	BPMK
					Meningkatnya pengetahuan tentang promosi TTG	1 paket	1 paket	134,000	1 paket	139,000	1 paket	144,000	1 paket	149,000	1 paket	154,000	5 paket	720,000	BPMK	
					Meningkatnya Pengetahuan tentang penerapan Teknologi Tepat Guna	1 kali, 30 orang	1 kali, 30 orang	20,000	1 kali, 30 orang	22,000	1 kali, 30 orang	24,000	1 kali, 30 orang	26,000	1 kali, 30 orang	28,000	5 kali, 150 orang	120,000	BPMK	
					1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	51 Kelurahan 6 Kecamatan	51 Kelurahan 6 Kecamatan	1,003,000	1 Pkt	1,204,000	1 Pkt	1,455,000	1 Pkt	1,733,000	1 Pkt	2,080,000	5 Pkt	7,475,000	BPMK
						Tersedianya usulan rencana pembangunan dari Kelurahan dan Kecamatan	51 Kelurahan 6 Kecamatan	51 Kelurahan 6 Kecamatan	125,000	51 Kelurahan 6 Kecamatan	130,000	51 Kelurahan 6 Kecamatan	145,000	51 Kelurahan 6 Kecamatan	155,000	51 Kelurahan 6 Kecamatan	165,000	51 Kelurahan 6 Kecamatan	720,000	BPMK
		Terpenuhinya kebutuhan fasilitator Dana PEM	153 Orang	153 Orang	765,000	153 Orang	765,000	153 Orang	765,000	153 Orang	765,000	153 Orang	765,000	153 Orang	3,825,000	BPMK				

NO	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp. (Ribu)	
							Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)	Target	Rp. (Ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Terseleksinya Kelurahan Terbaik 3 kelurahan dari 51 Kel	3 kelurahan	3 kel	15,000	3 kel	16,000	3 kel	17,000	3 kel	18,000	3 kel	19,000	15 Kel	85,000	BPMK
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Bulan bakti gotong royong)	1 kali	1 kali	20,000	1 kali	25,000	1 kali	30,000	1 kali	35,000	1 kali	40,000	5 kali	150,000	BPMK
					Tersedianya Buku Profil Kelurahan	51 kelurahan	306 buku	20,000	306 buku	25,000	306 buku	30,000	306 buku	35,000	306 buku	40,000	1530 buku	150,000	BPMK
					Meningkatnya Pengetahuan Aparat Tenang pengisian Buku Profil Kelurahan	-	1 kali	20,000	1 kali	25,000	1 kali	30,000	1 kali	35,000	1 kali	40,000	5 kali	150,000	BPMK
				1.22 1.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan	Meningkatnya SDM aparatur kelurahan	1 kali	1 kali	35,000	1 kali	42,000	1 kali	54,400	1 kali	60,400	1 kali	72,500	5 kali	264,300	BPMK
				1.22. 1.19 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun kelurahan	-	1 Pkt	330,000	1 Pkt	396,000	1 Pkt	475,000	1 Pkt	570,000	1 Pkt	684,000	5 Pkt	2,455,000	BPMK
					Terlaksananya pelatihan LP3PKK	57 kader	57 kader	25,000	57 kader	30,000	57 kader	35,000	57 kader	40,000	57 kader	45,000	57 kader	175,000	BPMK
					Terseleksinya juara lomba kader	3 orang	3 orang	15,000	3 orang	16,000	3 orang	17,000	3 orang	18,000	3 orang	19,000	15 orang	85,000	BPMK
					Terlaksananya SIP dan temu kader posyandu	1 kali	1 kali	16,600	1 kali	17,000	1 kali	17,500	1 kali	18,000	1 kali	18,500	5 kali	87,600	BPMK
					Terlaksananya Jambore Posyandu	51 Kelurahan	51 Kel	15,000	51 Kel	16,000	51 Kel	17,000	51 Kel	18,000	51 Kel	19,000	51 Kel	85,000	BPMK
					Meningkatkan rasa kebersamaan sesama anggota PKK	100%	100%	15,000	100%	15,000	100%	17,000	100%	18,000	100%	19,000	100%	84,000	BPMK
					Terlaksananya Penilaian Posyandu	1 kali	1kali	10,000	1kali	11,000	1kali	12,000	1kali	13,000	1kali	14,000	5 kali	60,000	BPMK
					Terseleksinya kader posyandu yang berprestasi	18 kelompok	18 kelompok	42,700	18 kelompok	42,700	18 kelompok	42,700	18 kelompok	42,700	18 kelompok	42,700	23 kelompok	213,500	BPMK



## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan paramater kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- (1) Aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja
- (2) Aspek pelayanan umum meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, kriminalitas, dan penanaman modal.

Indikator kinerja daerah tahun 2013-2017 disusun untuk memprediksi kondisi daerah Kota Kupang 5 tahun kedepan dengan asumsi kondisi daerah dalam keadaan normal, dalam arti tidak terjadi peristiwa penting yang sangat mempengaruhi stabilitas daerah Kota Kupang. Prediksi indikator daerah 5 tahun kedepan ini akan sangat terpengaruh apabila terjadi kondisi-kondisi seperti terjadinya bencana alam, krisis yang berdampak luas dan kondisi yang tidak terduga lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja daerah Kota Kupang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 9.1 berikut:

**Tabel 9.1**  
**Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017**

No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>1</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.56	9.44	9.91	10.41	10.92	11.46	<b>11.46</b>
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	78.12	78.51	78.90	79.30	79.69	80.09	<b>80.49</b>
1.3	<b>PDRB (Rp) :</b>							
1.3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	6,531,971,667,262	7,794,679,154,939	9,261,554,263,259	10,962,165,979,363	12,929,594,662,149	15,200,855,591,389	15,200,855,591,389
1.3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2,434,183,177,903	2,687,045,612,628	2,962,965,459,693	3,264,034,245,984	3,592,487,730,305	3,950,723,547,821	3,950,723,547,821
1.4	Laju inflasi (%)	4.17	4.02	3.87	3.72	3.37	3.57	3.57
1.5	<b>PDRB per kapita (Rp) :</b>							
1.5.1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga berlaku	17,804,902	20,282,603	23,056,631	26,161,014	29,632,761	33,512,289	33,512,289
1.5.2	PDRB Per Kpita Atas Dasar Harga konstan	7,624,663	8,013,849	8,420,850	8,846,629	9,292,151	9,758,398	9,758,398
1.6	Persentase Rumah Tangga Miskin	13.67	11.44	9.56	7.99	6.67	5.57	5.57
1.7	<b>PENDAPATAN</b>							
1.7.1	Pendapatan Asli Daerah	61,379,555,364	71,636,739,364	80,369,257,892	90,166,270,429	101,157,538,794	113,488,642,772	<b>113,488,642,772</b>

No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.7.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27,931,487,000	31,210,643,573	34,874,773,129	38,969,071,495	43,544,040,488	48,656,110,842	<b>48,656,110,842</b>
1.7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16,005,575,228	17,884,629,759	19,984,285,294	22,330,440,387	24,952,034,088	27,881,402,890	<b>27,881,402,890</b>
1.7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,274,801,636	10,363,663,348	11,580,357,425	12,939,891,387	14,459,034,636	16,156,525,302	<b>16,156,525,302</b>
1.7.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,892,691,500	10,479,116,772	10,640,495,170	10,804,358,796	10,970,745,921	11,139,695,408	<b>11,139,695,408</b>
<b>1.7.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	525,570,823,222	629,346,316,765	656,218,669,034	733,258,740,779	819,343,316,946	915,534,222,355	<b>915,534,222,355</b>
1.7.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	40,326,478,222	45,060,806,765	50,350,945,479	56,262,146,479	62,867,322,475	70,247,946,134	<b>70,247,946,134</b>
1.7.2.2	Dana Alokasi Umum	453,986,555,000	527,785,630,000	581,461,428,570	640,596,055,856	705,744,674,737	777,518,908,158	<b>777,518,908,158</b>
1.7.2.3	Dana Alokasi Khusus	31,257,790,000	56,499,880,000	63,901,364,280	72,272,443,000	81,740,133,033	92,448,090,460	<b>92,448,090,460</b>
<b>1.7.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	102,081,381,630	107,420,317,745	120,031,463,049	134,123,156,811	149,869,215,420	167,463,861,311	<b>167,463,861,311</b>
<b>1.7.4</b>	<b>Pendapatan per Kapita (Rp) :</b>							-
1.7.4.1	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	15,134,667	17,146,697	19,389,162	21,887,707	24,670,089	27,766,503	<b>27,766,503</b>
1.7.4.2	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	6,619,415	6,948,330	7,291,942	7,651,019	8,026,334	8,418,675	<b>8,418,675</b>
<b>2</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>							
<b>2.1</b>	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1	Angka melek huruf (%)	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>

No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2.1.2</b>	<b>Angka Partisipasi Murni</b>							
2.1.2.1	SD/MI/Paket A	103.25	105.50	107.80	110.14	112.53	114.96	114.96
2.1.2.2	SLTP/MTs/Paket B	81.31	81.93	82.55	83.18	83.81	84.44	84.44
2.1.2.3	SMA/SMK/MA/Paket C	62.17	63.64	65.15	66.68	68.25	69.86	69.86
<b>2.1.3</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>							
2.1.3.1	SD/MI/Paket A	126.43	126.67	126.92	127.17	127.42	127.67	127.67
2.1.3.2	SLTP/MTs/Paket B	117.58	118.18	118.78	119.38	119.98	120.59	120.59
2.1.3.3	SMA/SMK/MA/Paket C	97.51	100.56	103.69	106.91	110.23	113.64	113.64
<b>2.1.4</b>	<b>Rasio Guru/Murid</b>							
2.1.4.1	- SD/MI	16.46	16.05	15.66	15.28	14.90	14.54	14.54
2.1.4.2	- SLTP/MTs	11.32	10.82	10.33	9.87	9.43	9.00	9.00
2.1.4.3	- SMA/SMK/MA	11.46	11.51	11.56	11.62	11.67	11.72	11.72
<b>2.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.2.1	Angka Kematian Bayi	4.92	4.48	4.08	3.71	3.38	3.07	3.07
2.2.2	Angka Harapan Hidup	73.43	73.83	74.23	74.63	75.03	75.43	75.43



No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.3	Persentase Gizi buruk	0.72	0.49	0.33	0.22	0.15	0.10	0.10
<b>2.3</b>	<b>Kesempatan Kerja</b>							
2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.62	75.15	76.70	78.29	79.91	81.55	81.55
2.3.2	Angka Pengangguran	6.30	5.74	5.17	4.66	4.17	3.73	3.73
<b>2.4.</b>	<b>Angka Kriminalitas</b>							
2.4.1	Rasio Kriminalitas (%)	4.61	4.37	4.14	3.92	3.71	3.51	3.51
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>							
<b>1.1.1</b>	<b>Sarana prasarana sekolah</b>							
1.1.1.1	Jumlah SD/MI	126	128	129	130	132	133	133
1.1.1.2	Jumlah SLTP/MTs	49	51	53	55	57	60	60
1.1.1.3	Jumlah SMA/SMK/MA	52	54	57	60	63	66	66
<b>1.1.2</b>	<b>Rasio Sekolah/Murid</b>							
1.1.2.1	SD/MI	386.83	428.76	474.64	524.84	579.78	639.88	639.88
1.1.2.2	SLTP/MTs	384.91	373.24	361.88	350.85	340.13	329.72	329.72

No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2.3	SMA/SMK/MA	409.79	396.33	383.27	370.60	358.32	346.42	346.42
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	173	190	207	227	247	270	270
2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.2.1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	33,530	32,172	30,860	29,596	28,380	27,211	27,211
2.2.2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	18,925	19,479	20,049	20,635	21,238	21,857	21,857
2.2.3	Rasio Pustu per satuan penduduk	10,882	11,185	11,496	11,814	12,140	12,475	12,475
2.3	Rasio RS per satuan penduduk	51,804	53,766	55,794	57,893	60,065	62,313	62,313
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	15,680	16,186	16,706	17,243	17,795	18,365	18,365
2.5	Rasio Apotik/Toko Obat per satuan penduduk	7,263	11,253	16,701	23,975	33,513	45,832	45,832
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	40.60	47.46	55.30	64.26	74.47	86.09	86
3.2	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	560.30	667.97	792.96	937.78	1,105.21	1,298.38	1,298.38
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>							
4.1	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	4,393	6,370	8,988	12,398	16,779	22,340	22,340

No.	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang	Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	67,693	72,064	76,679	81,554	86,709	92,161	92,161
<b>5</b>	<b>Perkembangan Penanaman Modal</b>							
2.5.1	PMDN	894	918	942	967	993	1,019	1,019
2.5.2	PMA	10	12	13	15	17	19	19



## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang 2013-2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Walikota Kupang Tahun 2013-2017 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Kupang Tahun 2017 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2017) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta mengingat waktu bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2017 untuk menyusun RPJMD Kota Kupang Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2017, maka RPJMD Kota Kupang 2013-2017 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk periode berikutnya.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

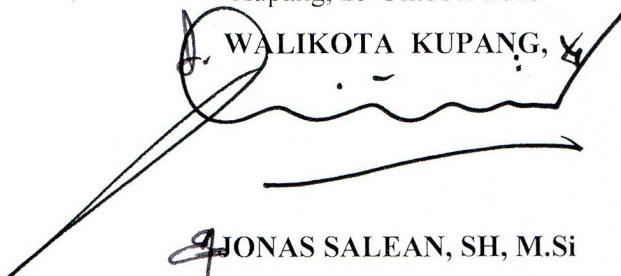
RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

RPJMD Kota Kupang Tahun 2013-2017 selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan sebaik-baiknya.
2. Walikota Kupang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Kupang 2013-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Kupang 2013-2017.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kupang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Kupang serta menjamin konsistensinya.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Kupang 2013-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Kupang 2013-2017 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kupang.
6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Kupang 2013-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang 2011-2031 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Kupang 2013-2017 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota Kupang terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Kupang.

8. Mengingat masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Kupang akan berakhir pada bulan juli tahun 2017, maka untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan sampai dengan berakhirnya RPJMD periode 2013-2017, maka dipandang perlu menyusun rencana program transisi tahun 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Kupang, 25 Oktober 2013  
WALIKOTA KUPANG,  
  
JONAS SALEAN, SH, M.Si